



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

**BIRO HUBUNGAN
MASYARAKAT
DAN KERJA SAMA
LUAR NEGERI**

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Kata Pengantar



*Biro HKLN berkomitmen dalam
pencapaian seluruh program
prioritas KKP di tahun 2022*

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN). Kami juga turut berterima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian dan Kelautan dan Perikanan (KKP) atas arahan dan bimbingan selama ini dalam penyusunan dan penyempurnaan Laporan Kinerja ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Kepala Biro Perencanaan untuk dukungan teknis dan substantifnya.

Pada tahun anggaran 2022, kinerja Biro HKLN selain dilaporkan secara triwulanan juga secara tahunan sebagai bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan. Laporan Kinerja ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja serta analisis dan rencana tindak lanjut untuk triwulan berikutnya.

Di tahun 2022, Biro HKLN mengemban 3 (tiga) sasaran kegiatan yaitu:

- Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang penyiapan produk hukum KKP;
- Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri; dan
- Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup biro hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri.

Berdasarkan ketiga sasaran kegiatan di atas, terdapat 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2022. Seluruh IKU tersebut telah melalui proses cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Jenderal.



Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini kami sadari masih jauh dari sempurna, untuk itu koreksi dan saran yang membangun dari setiap pembaca kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ari Prabowo

Daftar Isi

ii

Kata Pengantar

iv

Daftar Isi

v

Daftar Gambar

vi

Daftar Tabel

vii

Ringkasan
Eksekutif

01

BAB I
PENDAHULUAN

07

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

12

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

63

BAB IV
PENUTUP

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Tahun 2022 Biro HKLN memuat target, realisasi, capaian serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sepanjang tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan pada tahun ini, Biro HKLN telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra tersebut.

Terdapat 3 sasaran kegiatan yang menjadi target di tahun 2022, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik di bidang penyiapan produk hukum KKP; tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri; dan terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup biro hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri. Ketiga sasaran kegiatan ini kemudian ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang memuat 14 IKK.

Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengukuran oleh aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) nilai kinerja Biro HKLN pada tahun 2022 sebesar 108,64. Dari 14 IKK Biro HKLN tersebut, seluruh IKU telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian seluruh IKK tersebut, sebagai berikut.

- Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama, target 90% dan realisasi sebesar 100% (capaian 111,11%).
- Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 100%).
- Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung Jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target 3,65 dan realisasi sebesar 3,89 (capaian 106,58%).
- Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan, target 3,8 dan realisasi 3,91 (capaian 102,89%).
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target sebesar 92 dan realisasi sebesar 96,54 (capaian 104,93%).

- Nilai Keterbukaan Informasi Publik, target sebesar 90 dan realisasi sebesar 91,55 (capaian 101,72%).
- Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan, target >87% dan realisasi 99,26% (capaian 114,09%).
- Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui lembaga stakeholder lainnya, target 80% dan realisasi 100% (capaian 120%).
- Persentase pemanfaatan koleksi Perpustakaan KKP oleh anggota Perpustakaan KKP, target 10% dan realisasi 15,84% (capaian 120%).
- Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 100%).
- Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target sebesar 78 dan realisasi sebesar 79,29 (capaian 101,65%).
- Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, target 88% dan realisasi 100% (capaian 113,64%).
- Persentase jumlah Rekomendasi hasil pengawasan intern yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target 70% dan realisasi 83,33% (capaian 119,04%).
- Persentase penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target sebesar 95% dan realisasi sebesar 98,68% (capaian 103,87%)

Kinerja Anggaran

Pada tahun 2022 terdapat sebanyak empat kali refocusing anggaran di Biro HKLN sehingga anggaran yang semula sebesar Rp 33.617.911.000 menjadi Rp 26.556.093.000. Adapun realisasi anggaran Biro HKLN pada tahun 2022 sebesar Rp 26.205.903.531 atau sebesar 98,68% dari pagu anggaran setelah refocusing.

BAB I PENDAHULUAN



LKj Biro HKLN Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022. Selain memuat pencapaian kinerja, Laporan Kinerja Biro HKLN juga memuat pertanggungjawaban atas realisasi anggaran yang telah digunakan. Penyusunan Laporan Kinerja Biro HKLN Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro HKLN dalam rangka meningkatkan kinerja sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun progres dan pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh unit kerja lingkup Biro HKLN dengan cara menyampaikan pencapaian IKK yang menjadi tanggung jawab unit setiap triwulan kepada pengelola kinerja Biro HKLN. Selanjutnya, pengelola kinerja melaporkan pencapaian kepada Biro Perencanaan dan Sekretaris Jenderal melalui sistem informasi, yaitu aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id). Pembahasan atas realisasi dan capaian kinerja triwulanan dan tahunan juga dilakukan dengan pimpinan unit kerja di Biro HKLN sembari berkoordinasi dan berkonsultasi dengan ketua dan anggota Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2022.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Biro HKLN merupakan salah satu unit organisasi yang terdapat di Sekretariat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Biro HKLN terdiri atas Kepala Biro HKLN dan Kelompok Jabatan Fungsional.

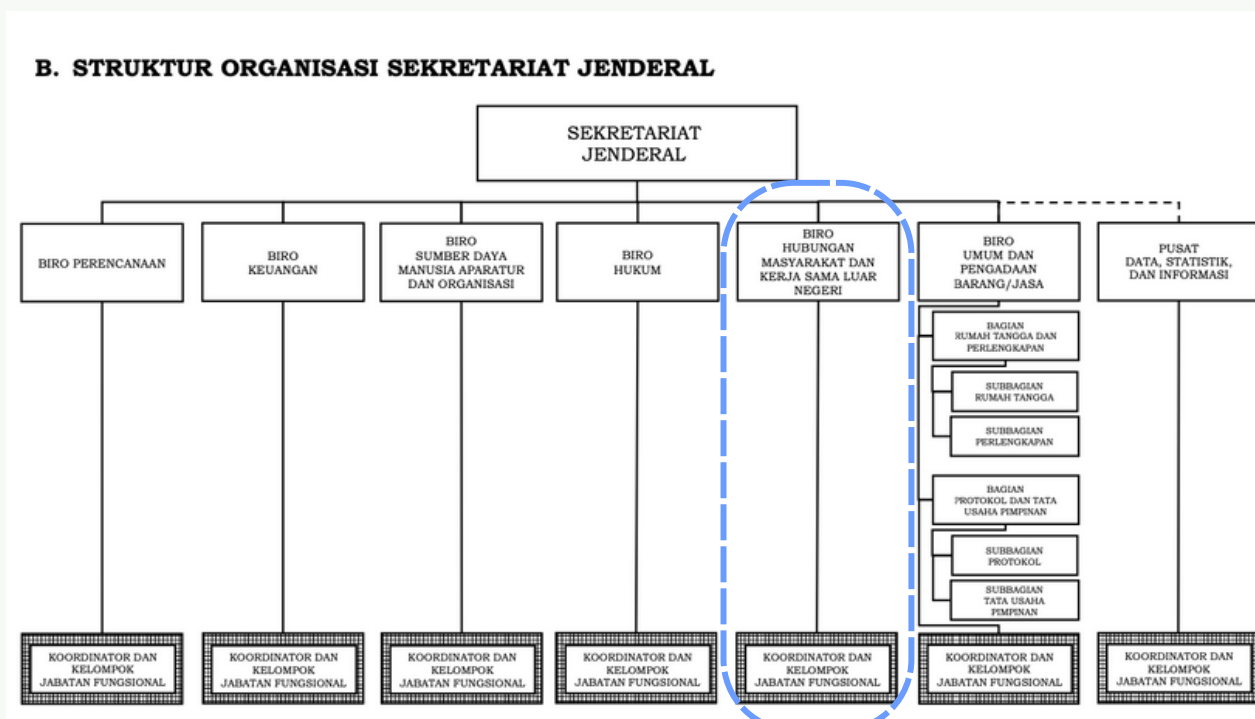
Tugas Biro HKLN adalah untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya Biro HKLN menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan;

- koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Biro HKLN dibantu oleh beberapa Koordinator dan 1 Subkoordinator yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro HKLN, yaitu:

- Koordinator Hubungan Masyarakat;
- Koordinator Kerja Sama Bilateral;
- Koordinator Kerja Sama Regional dan Multilateral; dan
- Subkoordinator Tata Usaha.



Gambar 1 Struktur organisasi Biro HKLN berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020

Pada tanggal 3 Juni 2022 telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 89/KP.930/UPF-JF/VI/2022 tentang Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Lingkup Sekretariat Jenderal yang berimplikasi pada struktur unit di Biro HKLN yang semula hanya terdiri atas 3 Koordinator dan 1 Subkoordinator menjadi 4 Koordinator dan 1 Subkoordinator. Penambahan 1 Koordinator yang semula Koordinator Hubungan Masyarakat menjadi (1) Koordinator Pemberitaan dan Opini Publik dan (2) Koordinator Hubungan Kemitraan yang secara rinci dapat dilihat pada bagan berikut.

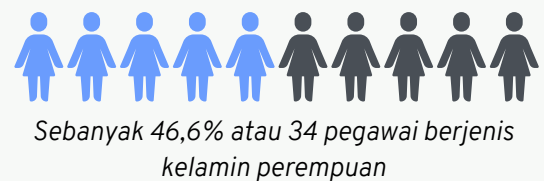
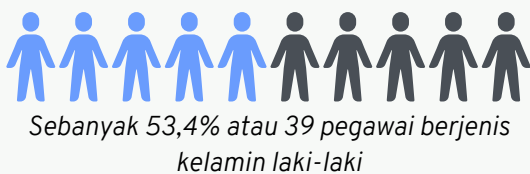


Gambar 2 Struktur unit Biro HKLN Sebelum Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 89/KP.930/UPF-JF/VI/2022 tentang Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Lingkup Sekretariat Jenderal



Gambar 3 Struktur unit Biro HKLN Pasca Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 89/KP.930/UPF-JF/VI/2022 tentang Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Lingkup Sekretariat Jenderal

Sumber Daya Manusia (SDM) Biro HKLN pada tahun 2022 berjumlah 47 pegawai dengan rincian sebagai berikut



Kelompok	Jenjang Pendidikan									
	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD
Kepala Biro HKLN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelompok Pemberitaan dan Opini Publik	-	1	6	1	1	-	-	-	-	-
Kelompok Hubungan Kemitraan	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-
Kelompok Kerja Sama Bilateral	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-
Kelompok Kerja Sama Regional dan Multilateral	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Kelompok Tata Usaha	-	3	4	-	-	-	1	2	-	1
PPNPN	-	-	15	6	1	-	1	3	-	-
Jumlah	-	17	39	7	2	-	2	5	-	1

Tabel 1 Jumlah Pegawai Biro HKLN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

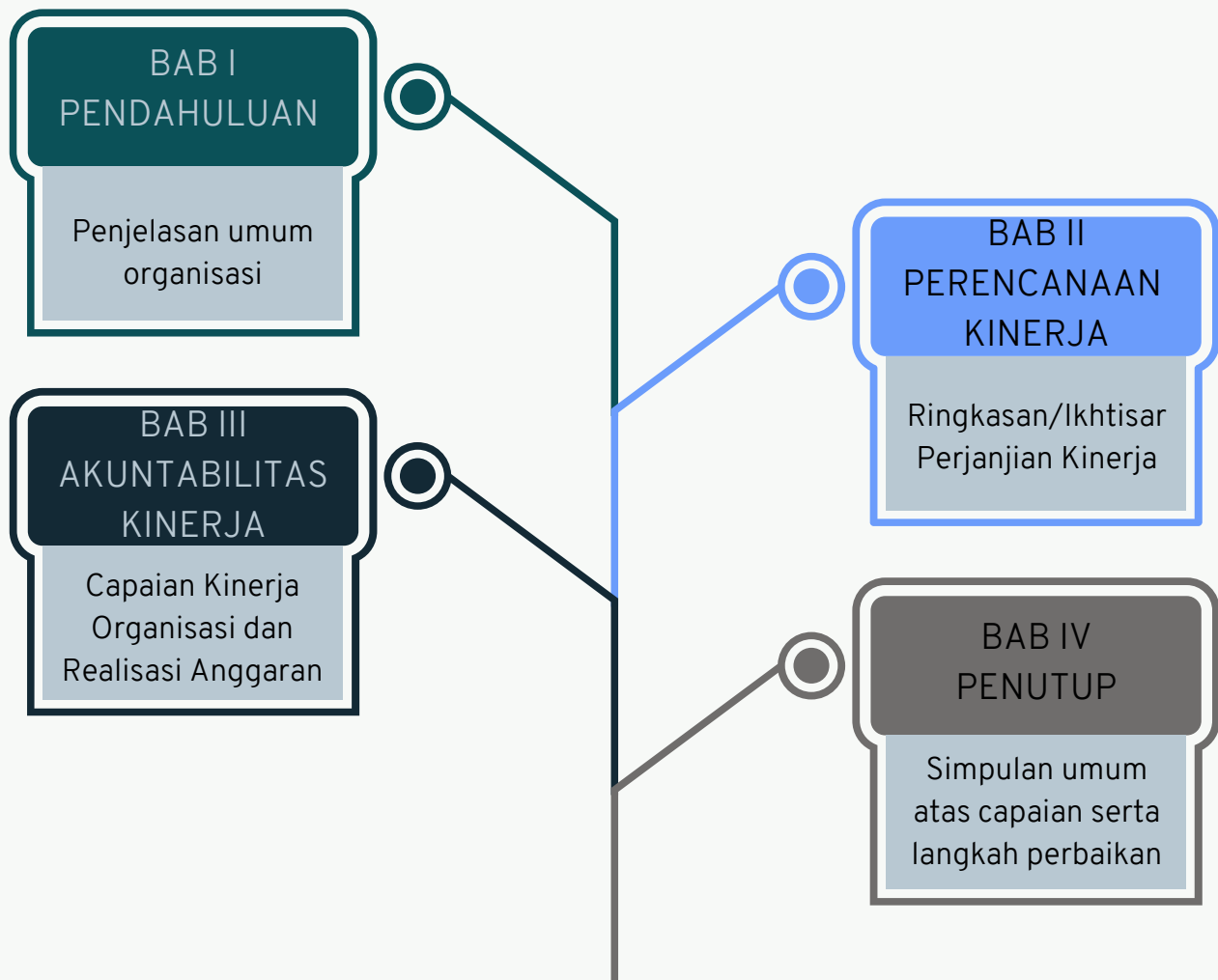
Isu Strategis

Untuk mengoptimalkan capaian Biro HKLN pada tahun berikutnya, terdapat beberapa isu strategis yang perlu dijadikan fokus utama, yaitu:

- Pencapaian seluruh program prioritas KKP di tahun 2023 dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Biro HKLN.
- Pelaksanaan kegiatan pasca refocusing anggaran dengan pertimbangan bahwa prediksi ekonomi global yang akan mengalami resesi di tahun 2023.
- Keterbatasan SDM dan kebijakan pemerintah terkait pembatasan pengadaan pegawai secara nasional.
- Dukungan KKP, khususnya Biro HKLN pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.
- Indonesia (KKP) menjadi tuan rumah pelaksanaan The Fourth Meeting of the Parties to the Agreement on Port State Measures (PSMA).

Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Biro HKLN Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagaimana berikut:



Gambar 4 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi KKP, Sekretariat Jenderal (Setjen) telah menetapkan visi dan misi Setjen berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17/KEP-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Adapun visi Setjen, yaitu:

"Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi KKP"

Untuk mewujudkan visi tersebut, adapun misi yang akan dilaksanakan oleh Setjen, yaitu:

- Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen; dan
- Penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

Penjabaran misi tersebut dilakukan melalui penetapan tujuan dan indikator, sebagai berikut.

- 01** Meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP, dengan indikator indeks sistem merit, indeks pengelolaan keuangan, indeks pengelolaan aset, indeks perencanaan, indeks kearsipan, nilai SPBE KKP, persentase penyelesaian regulasi lingkup KKP, rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan.
- 02** Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan KKP, dengan indikator nilai kinerja RB KKP, nilai SAKIP KKP, dan nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal.

Sasaran Strategis/Kegiatan

Sasaran kegiatan merupakan kondisi ideal yang diharapkan diraih oleh Biro HKLN sebagai suatu hasil dari outcome dan impact dari keseluruhan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN. Di tahun 2022, Biro HKLN mendukung 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Kegiatan Legislasi, litigasi dan kerja sama	Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang penyusunan produk hukum KKP
Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	- Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri - Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Setelah sasaran kegiatan ditetapkan, kemudian disusun peta strategi yang merangkai hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategi memberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki berbagai perspektif. Perspektif adalah cara pandang yang digunakan melalui metode Balanced Scorecard (BSC) untuk mengelola kinerja organisasi.

Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2022

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Pada tahun 2022, Biro HKLN mengelola anggaran sebesar Rp 33.617.911.000. Sehubungan dengan telah dilakukannya empat kali refocusing anggaran sehingga pagu anggaran yang dikelola oleh Biro HKLN sebesar Rp 26.556.093.000. Alokasi anggaran tersebut untuk mencapai 3 sasaran kegiatan yang kemudian dijabarkan melalui 14 IKU dan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro HKLN.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2022 didahului oleh Dialog Kinerja Organisasi (DKO) lingkup Sekretariat Jenderal untuk membahas target kinerja yang akan ditetapkan. Pasca pelaksanaan DKO, terdapat penyesuaian target untuk beberapa IKU baik di level 1 (Setjen) maupun di level 2 (unit kerja eselon II lingkup Setjen). Daftar IKK Biro HKLN dan target pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sasaran / Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Polarisasi	Target 2022
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Penyiapan Produk Hukum KKP				
1	Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama	Persen	Maximize	90
2	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Persen	Maximize	100
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri				
3	Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Nilai	Maximize	3,65
4	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan	Nilai	Maximize	3,8
5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Nilai	Maximize	92
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Maximize	90
7	Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan	Persen	Maximize	>87
8	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui lembaga stakeholder lainnya	Persen	Maximize	80
9	Persentase pemanfaatan koleksi Perpustakaan KKP oleh anggota Perpustakaan KKP	Persen	Maximize	10
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri				
10	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Persen	Maximize	100
11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Indeks	Maximize	78
12	Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	Persen	Maximize	88

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Polarisasi	Target 2022
13	Persentase jumlah Rekomendasi hasil pengawasan intern yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Persen	Maximize	70
14	Persentase penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Persen	Maximize	95

Tabel 2 Daftar IKK Biro HKLN Tahun 2022

Monitoring dan Pengukuran Kinerja

Monitoring dan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara periodik baik bulanan, triwulanan maupun tahunan tergantung pada sifat Indikator tersebut, namun untuk melihat kemajuan capaian kinerja, secara berkala seluruh unit kerja menyampaikan perkembangan pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja melalui sistem aplikasi kinerjaku secara online dan dilakukan pembahasan secara triwulanan bersama dengan Tim Pengelola Kinerja Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan dalam KepSetjen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal, dengan tujuan sebagai berikut.

- mengetahui perkembangan capaian kinerja;
- mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
- melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/sasaran;
- Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan; dan
- Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja.

Penyesuaian Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2022 Biro HKLN mengalami penyesuaian Perjanjian Kinerja yang disebabkan oleh pergantian Kepala Biro HKLN yang semula dijabat oleh Bapak Agung Tri Prasetyo menjadi Bapak Ari Prabowo. Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

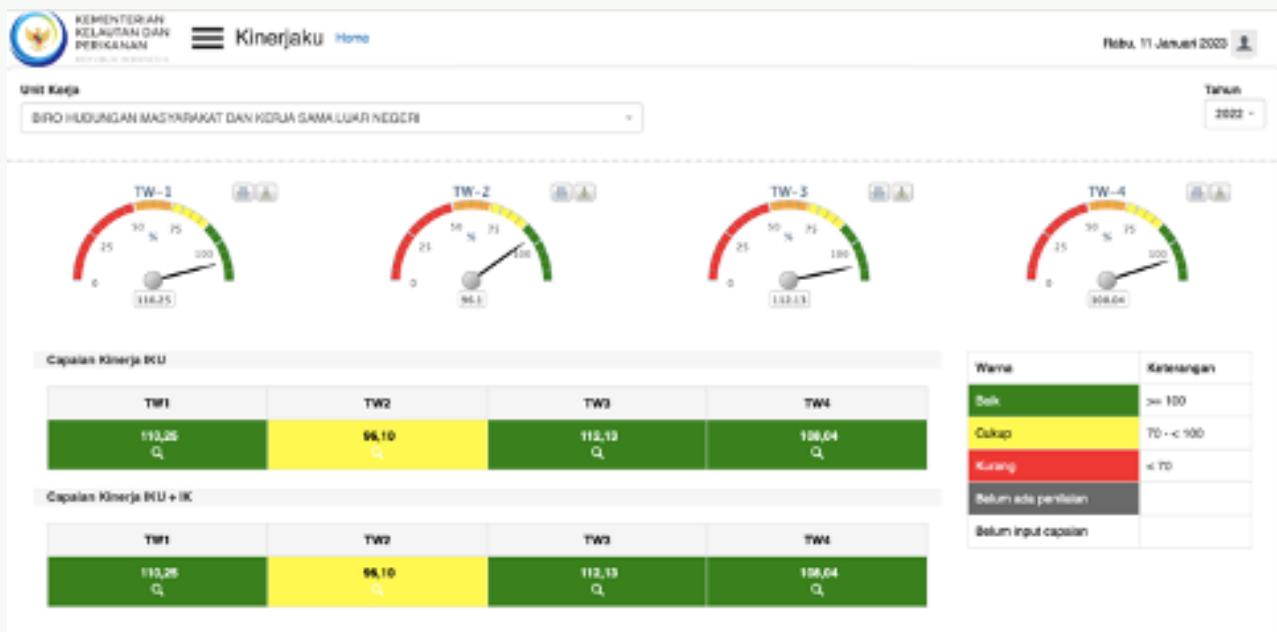


Kinerja Organisasi

Realisasi dan Capaian Kinerja

Monitoring dan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara periodik baik triwulanan maupun tahunan tergantung pada sifat Indikator tersebut, namun pelaporan dan evaluasi atas capaian dilakukan secara triwulanan melalui rapat koordinasi Tim Pengelola Kinerja Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan dalam KepSetjen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Pelaporan capaian kinerja ini menggunakan Perjanjian Kinerja revisi yang telah disahkan pada tanggal 3 Juni 2022.

Proses penghitungan kinerja didasarkan kepada formula yang tercantum pada manual IKK untuk masing masing IKK dan telah ditetapkan oleh Kepala Biro HKLN. Data capaian kinerja yang telah diverifikasi validitasnya oleh Biro Perencanaan menjadi acuan dalam penyusunan LKj Biro HKLN Tahun 2022. Proses pengelolaan kinerja pada Sekretariat Jenderal menggunakan bantuan aplikasi database online www.kinerjaku.kkp.go.id sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 5 Dashboard Capaian Kinerja Biro HKLN Tahun 2022
Pada Aplikasi Kinerja Dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 108,04

Realisasi dan capaian kinerja Biro HKLN pada Tahun 2022 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Sasaran / Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Polarisasi	Target 2022	Realisasi 2022	% Realisasi
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Penyiapan Produk Hukum KKP						
1	Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama	Persen	Maximize	90	100	111,11
2	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Persen	Maximize	100	100	100
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri						
3	Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Nilai	Maximize	3,65	3,89	106,58
4	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan	Nilai	Maximize	3,8	3,91	102,89
5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Nilai	Maximize	92	96,54	104,93
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Maximize	90	91,55	101,72
7	Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan	Persen	Maximize	>87	99,26	114,09
8	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui lembaga stakeholder lainnya	Persen	Maximize	80	100	120
9	Persentase pemanfaatan koleksi Perpustakaan KKP oleh anggota Perpustakaan KKP	Persen	Maximize	10	15,84	120

Sasaran / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Polarisasi	Target 2022	Realisasi 2022	% Realisasi
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri					
10	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Persen	Maximize	100	100
11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Indeks	Maximize	78	79,29
12	Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	Persen	Maximize	88	100
13	Persentase jumlah Rekomendasi hasil pengawasan intern yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Persen	Maximize	70	83,33
14	Persentase penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Persen	Maximize	95	98,68

Tabel 3 Capaian IKK Biro HKLN Tahun 2022

Analisis Kinerja

Metode analisis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024)

• Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada) merupakan penjelasan apabila terdapat pemeringkatan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) penilai posisi/peringkat KKP secara nasional	• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, mencakup kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian
• Tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan IKU untuk yang diajukan dalam laporan kinerja periode (triwulan/semester/tahun) sebelumnya	• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: berisi tentang penyebab keberhasilan ketercapaian/kegagalan pencapaian IKK, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKK selama tahun 2022
• Penyampaian informasi besar target dan realisasi IKU yang sama pada 5 (lima) tahun terakhir sebagai perbandingan	• Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: Penggunaan sumber daya baik anggaran dan SDM serta sumber daya lainnya antara lain melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi/kolaboratif program dan kegiatan untuk mencapai IKK baik antar unit kerja, K/L maupun instansi dan lembaga terkait

- Analisis pemanfaatan sumber daya anggaran

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja IKK dengan penjelasan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Penyiapan Produk Hukum KKP

01

Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro HKLN bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, pengembangan program, dan pembinaan hubungan masyarakat, kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai manifestasi dari tugas tersebut, Biro HKLN mengemban fungsi untuk penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan dan penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan informasi di atas dan berdasarkan benchmarking ke Kementerian Luar Negeri, Biro HKLN merumuskan IKK, yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Definisi dari IKK ini adalah sebagai berikut:

- Tindak lanjut/implementasi adalah tindakan yang diambil untuk langkah-langkah lanjut/ pelaksanaan/penerapan atas kesepakatan internasional.
- Kesepakatan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

IKK ini didukung dari 2 indikator kinerja oleh Kelompok Kerja Kerja Sama Bilateral dan Kelompok Kerja Kerja Sama Regional dan Multilateral. Adapun 2 indikator kinerja tersebut, yaitu:

- Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti.
- Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia pada forum kerja sama regional dan multilateral yang diterima.

Formula untuk menghitung realisasi IKK ini setiap triwulan adalah sebagai berikut.

$$\% \text{Kerja Sama} = (\% \text{Kerja Sama Bilateral} + \% \text{Kerja Sama Multilateral}) / 2$$

keterangan:

%Kerja Sama Bilateral = (Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti/Jumlah dokumen kerja sama aktif yang direncanakan akan ditindaklanjuti) x 100%

%Kerja Sama Regional dan Multilateral = (Jumlah dokumen penyampaian kepentingan (prakarsa/rekomendasi) Indonesia/Jumlah forum internasional yang direncanakan akan dihadiri) x 100%

Sasaran Kegiatan 1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Penyiapan Produk Hukum KKP												
IKK 1 Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama												
Realisasi					2022				Renstra Setjen 2020 - 2024			
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2021- 2022	Target 2022	% Capaian Terhadap Target 2022	Target 2024	% Capaian Atas Target 2024
-	143,2%	112,42%	102,82%	105,71%	90%	100%	111,11%	-5,40%	90%	111,11%	90%	111,11%

Tabel 4 Capaian IKK 1 Persentase Dokumen yang Diterima/Ditindaklanjuti Dalam Kerangka Kerja Sama

Hingga akhir tahun 2022, belum tersedia data rujukan hasil kinerja sejenis yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbandingan baik di level unit kerja/kementerian/nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan atas realisasi IKK ini. Secara garis besar, faktor pendukung tercapainya target IKK ini di tahun 2022 dari sisi kerja sama bilateral adalah sebagai berikut:



Gambar 6 Menteri Kelautan dan Perikanan RI menerima Kunjungan Menteri Luar Negeri Panama, Erika Mouynes, di Jakarta pada tanggal 8 April 2022



Gambar 7 Menteri Kelautan dan Perikanan RI menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Henrik Thune, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin, di Jakarta tanggal 12 Mei 2022

- Pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan beberapa pejabat tinggi negara mitra, salah satunya yaitu Menteri Luar Negeri Panama Erika Mouynes dan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Henrik Thune dan Duta Besar Norwegia.
- Pendampingan kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan ke beberapa negara mitra dalam rangka penguatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan, seperti Norwegia (16-23 Mei 2022) dan Prancis (23-27 Mei 2022).
- Pelaksanaan beberapa Pertemuan Bilateral sebagai tindak lanjut atas dokumen kerja sama yang telah disepakati, yaitu antara RI-Hungaria, RI-Uni Eropa, RI-Vietnam, dan RI-India. Selain itu, Indonesia (KKP) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Kedua Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF) RI-Rusia pada tanggal 23-25 Agustus 2022 di Jakarta.

Salah satu isu strategis kerja sama bilateral bidang kelautan dan perikanan adalah mengenai pekerja migran Indonesia sebagai awak kapal penangkap ikan di beberapa negara/entitas ekonomi, seperti Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Thailand, Taiwan. Termasuk dalam hal ini adalah upaya perlindungan nelayan Indonesia yang mengakses perairan negara tetangga, seperti Timor-Leste, Malaysia, dan Australia.



Gambar 8 Penyelenggaraan Pertemuan Kedua Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF) RI-Rusia di Jakarta

Dari sisi kerja sama regional dan multilateral, pencapaian target disebabkan oleh keterlibatan aktif Menteri Kelautan dan Perikanan pada berbagai sidang internasional, antara lain:

- Sidang the 2nd UN Ocean Conference tanggal 27 Juni - 1 Juli 2022 di Lisbon, Portugal;
- Sidang FAO The 35th Session of Committee on Fisheries (COFI), pada tanggal 5-9 September 2022 di Roma, Italia;
- Sidang UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 27th Conference of the Parties (COP27) pada tanggal 7-18 November 2022 di Sharm El-Sheikh, Mesir; dan
- Senior Officials Meeting ke-6 dan Ministerial Meeting ke-4 AIS Forum pada tanggal 5-6 Desember 2022 di Bali, Indonesia.



Gambar 9 Menteri Kelautan dan Perikanan serta para Delegasi Republik Indonesia menghadiri Pertemuan COFI di Roma, Italia

Selain itu, pencapaian atas diterimanya posisi RI pada sidang internasional juga didukung oleh keikutsertaan aktif Delegasi KKP pada beberapa sidang internasional sebagai berikut.

- The 54th Meeting of the SEAFDEC Council (54th SCM) pada tanggal 23 & 25 Mei 2022;
- Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO di Jenewa pada tanggal 12-17 Juni 2022;

- Rangkaian pertemuan the 12th ASEAN Shrimp Alliance (ASA), the 14th ASEAN Fisheries Consultative Forum(AFCF), dan the 30th ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGF) pada tanggal 20-23 Juni 2022;
- APEC Ocean and Fisheries Working Group (OFWG) ke-19 pada tanggal 17-18 Agustus 2022;
- Pertemuan Regional Steering Committee (RSC) ke-4 Arafura Timor Sea Ecosystem Action-2 (ATSEA-2);
- pada tanggal 5 November 2022;
- Pertemuan Kedua IORA Core Group on Fisheries Management (CGFM) pada tanggal 15 November 2022;
- Pertemuan Senior Official Meeting - 17 (SOM-17) dan Ministerial Meeting (MM-8) CTI-CFF pada tanggal 29 November 2022; dan
- Rangkaian Pertemuan The 45th SEAFDEC Program Committee Meeting (45PCM) dan The 25th Fisheries Consultative Group ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (25FCG/ASS) pada tanggal 5-9 Desember 2022.



Gambar 10 Sekretaris Jenderal KKP dan Bapak Nilanto Perbowo pada Konferensi Tingkat Menteri ke-12 di Jenewa



Gambar 11 Bapak Nilanto Perbowo dan Kepala Biro Perencanaan Membahas Posisi Indonesia untuk Perundingan Subsidi Perikanan WTO dengan Duta Besar RI untuk WTO di Command Center KKP

Group of Twenty (G20)

KKP mendukung Kemenkomarves dalam inisiatif untuk penyelenggaraan Ocean20 yang merupakan rangkaian acara dengan fokus spesifik pada isu-isu kelautan dan perikanan khususnya terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Selain itu, KKP juga mendukung Presidensi G20 melalui keterlibatan pada pertemuan G20 yang membahas isu lingkungan dan perubahan iklim serta isu pertanian.

KKP juga aktif mempromosikan program-program pengelolaan ruang laut KKP dalam pameran pada G20 3rd Environment Deputies Meeting – Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) Meeting dan Joint Environment and Climate Sustainability Ministerial Meeting (JECMM) yang berlangsung di BNDCC Bali, 29-31 Agustus 2022.



Gambar 12 Menteri Kelautan dan Perikanan RI Pada Sesi Pembukaan Rangkaian Kegiatan Ocean20 di Bali

02 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

IKK ini merupakan indikator baru bagi Biro HKLN di tahun 2022. Pada tahun ini, Biro HKLN mengusulkan dua Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka menunjang pelayanan baik kepada publik (pihak eksternal) maupun internal KKP. Adapun kedua Rancangan Peraturan Menteri tersebut, yaitu:

- Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Konten Portal dan atau Situs Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Kegiatan 1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Penyiapan Produk Hukum KKP												
IKK 2 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri												
Realisasi					2022				Renstra Setjen 2020 - 2024			
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2021- 2022	Target 2022	% Capaian Terhadap Target 2022	Target 2024	% Capaian Atas Target 2024
-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

Tabel 5 Capaian IKK 2 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Pada akhir tahun 2022, proses pembahasan kedua Rancangan Peraturan Menteri berhasil diselesaikan secara tuntas hingga ke tahap harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga capaian atas penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tersebut, yaitu:

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Konten Portal Web dan Situs Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan tanggal 4 November 2022 dan diundangkan tanggal 14 November 2022; dan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan tanggal 29 Desember 2022 dan diundangkan tanggal 30 Desember 2022.

Capaian atas IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Juga tidak dapat dibandingkan dengan target pada Renstra karena tidak menjadi target pencapaian berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17/KEP-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Selain itu, hingga akhir tahun 2022 belum tersedia informasi mengenai data dari unit kerja/kementerian/nasional yang dapat digunakan sebagai pembanding atas capaian Biro HKLN pada IKK ini.

Faktor utama pendukung diundangkannya kedua Peraturan Menteri ini, yaitu kolaborasi dan komitmen seluruh pihak, baik dari Biro HKLN selaku unit kerja pengusul, unit kerja eselon I selaku pengguna dan Biro Hukum selaku fasilitator. Diharapkan dengan telah diterbitkannya kedua Peraturan Menteri ini, pengelolaan konten portal web dan situs web di lingkungan KKP secara tidak langsung akan mendukung penyelenggaraan kehumasan yang lebih agile.

03

Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Untuk memastikan pengelolaan RB secara efektif, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB nasional, yaitu Road Map RB tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024.

Saat ini RB telah memasuki periode ketiga. Pada tahap terakhir ini, RB diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Untuk mencapai harapan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun sasaran RB periode 2020-2024, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan RB di KKP mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/SJ Tahun 2022 tentang Subtim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022. Berdasarkan dua Keputusan Menteri tersebut, Biro HKLN menjadi Ketua Kelompok Kerja (Pokja) RB area manajemen perubahan.

Sasaran Kegiatan 1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Penyiapan Produk Hukum KKP												
IKK 3 Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri												
Realisasi					2022				Renstra Setjen 2020 - 2024			
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2021- 2022	Target 2022	% Capaian Terhadap Target 2022	Target 2024	% Capaian Atas Target 2024
3,44	3,44	3,63	4,11	3,91	3,65	3,89	106,58%	-0,51%	3,65	106,58%	3,75	103,73%

Tabel 5 Capaian IKK 3 Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

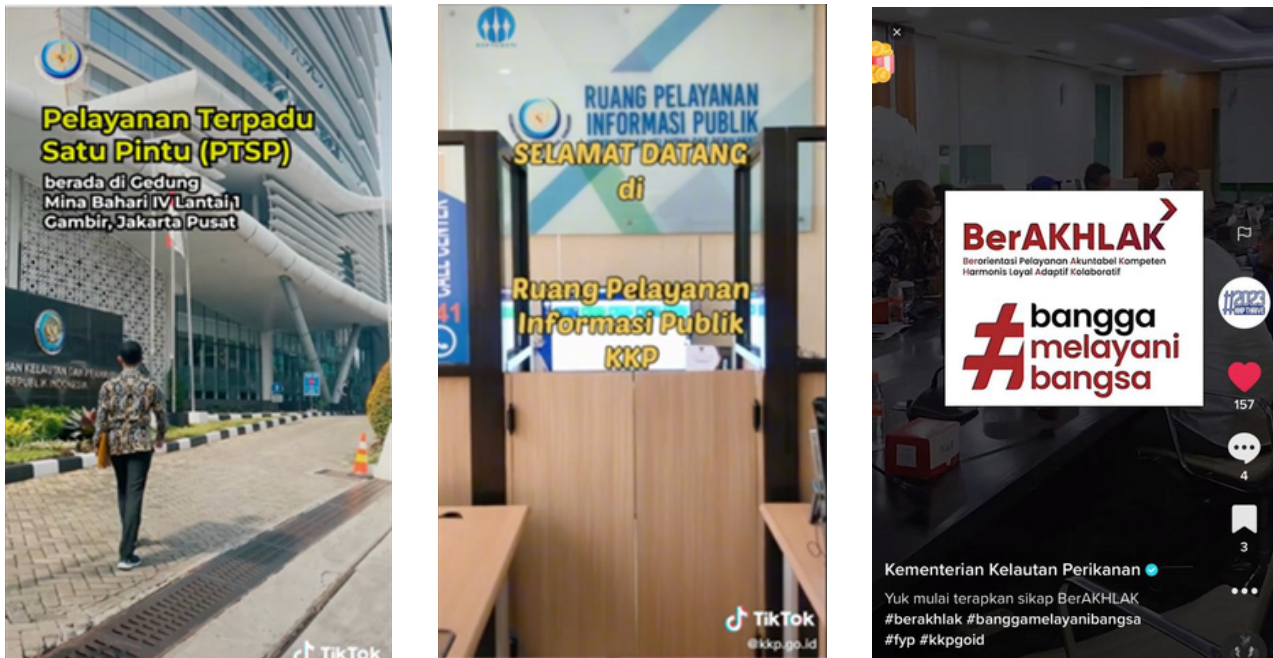
Sampai dengan akhir tahun 2022, IKK ini tidak dapat dibandingkan karena belum tersedianya informasi mengenai data pembanding dengan target unit kerja/kementerian/nasional. Adapun faktor tercapainya target IKK ini, yaitu:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB area manajemen perubahan triwulan III lingkup KKP yang dilaksanakan secara luring di Perpustakaan Archipelago Marine Library (Gedung Mina Bahari IV lantai 2) pada tanggal 5 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja eselon I lingkup KKP.
- Melaksanakan koordinasi dengan Tim Pelaksana Hari Peringatan Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tentang persiapan rencana pemberian penghargaan/reward kepada unit kerja/pegawai KKP yang telah melakukan perubahan (reform) dan mendapatkan penghargaan dari pihak eksternal selama tahun 2022 selama tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2022 bertempat di Ballroom KKP. Terdapat 44 penghargaan yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap unit kerja yang dinilai telah melakukan perubahan (reform) dan berprestasi.
- Menyenggarakan Sharing Session Agen Perubahan Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022, dihadiri oleh para Agen Perubahan lingkup KKP dengan mendengarkan paparan kinerja Agen perubahan dan mendapatkan tanggapan/evaluasi dari Tim penanggung yang berasal dari Inspektorat IV dan Inspektorat V.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB area manajemen perubahan triwulan IV tahun 2022 pada tanggal 14 Desember 2022 yang dihadiri oleh Subtim RB Area Manajemen Perubahan.
- Melakukan rapat penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) RB Area Manajemen Perubahan tahun 2023 pada tanggal 27 Desember 2022 bertempat di Ruang Diskusi Archipelago Marine Library.



Gambar 13 Menteri Kelautan dan Perikanan Memberikan Penghargaan Kepada Unit kerja/Pegawai KKP yang Telah Melakukan Perubahan (Reform) dan Mendapatkan Penghargaan Dari Pihak Eksternal

Selain itu, Biro HKLN selaku Ketua Pokja RB area manajemen perubahan juga aktif melakukan publikasi terkait RB di akun media sosial KKP, khususnya terkait pelayanan publik dan internalisasi nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (BerAKHLAK). Adapun publikasi tersebut sebagai berikut.



Gambar 14 Publikasi Kegiatan RB Area Manajemen Perubahan di Akun Media Sosial KKP

04 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2022, telah ditetapkan sebanyak 14 IKU di Biro HKLN, yang salah satunya adalah Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan. Penetapan IKU ini juga sejalan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 07/KEP-SJ/SJ3/IV/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Tahun 2022 dimana Biro HKLN selaku Penanggung Jawab RB Area Manajemen Perubahan.

Capaian atas IKU ini diperoleh melalui konsensus Tim Asesor atas hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan sekali setahun. Pelaksanaan PMPRB mengacu pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sasaran Kegiatan 1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Penyiapan Produk Hukum KKP												
IKK 4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan												
Realisasi					2022				Renstra Setjen 2020 - 2024			
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2021- 2022	Target 2022	% Capaian Terhadap Target 2022	Target 2024	% Capaian Atas Target 2024
4,67	4,71	5	4,24	3,73	3,8	3,91	102,89%	4,83%	4,4	88,86%	4,6	85%

Tabel 6 Capaian IKK 4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan

Pada tahun 2022 ditetapkan sebanyak 17 rencana kegiatan untuk RB Area Manajemen Perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Rencana kegiatan ini merupakan amanat dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022. Dari 17 rencana kegiatan tersebut, sebanyak 15 kegiatan telah terlaksana di tahun 2022, yaitu:

- Pembentukan Tim RB Sekretariat Jenderal tahun 2022;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja program RB dan Quick Wins Setjen;
- Pencapaian nilai PMPRB Setjen sesuai target dalam Renstra Setjen;
- Melakukan internalisasi nilai-nilai KKP oleh Pimpinan tertinggi;
- Sosialisasi Road Map RB;
- Pembentukan Tim PMPRB Sekretariat Jenderal;
- Sosialisasi pelaksanaan PMPRB Sekretariat Jenderal oleh asesor;
- Pelaksanaan rencana kegiatan RB Setjen yang selaras dengan road map RB KKP;
- Pelaksanaan PMPRB oleh asesor;
- Melakukan reviu terhadap kertas kerja;
- Melaksanakan rencana aksi tindak lanjut;
- Sosialisasi nilai-nilai KKP melalui media komunikasi;
- Menyusun rencana kerja Agen Perubahan yang telah terintegrasi dalam sistem manajemen;
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana kerja Agen Perubahan secara berkala; dan
- Internalisasi sistem integritas KKP.

Terdapat sebanyak 2 kegiatan yang pelaksanaannya belum rampung di tahun 2022, yaitu:

- Pembentukan Tim RB Sekretariat Jenderal tahun 2023; dan
- Penyusunan rencana kegiatan RB Setjen yang selaras dengan road map RB KKP.

Sampai dengan akhir tahun 2022, IKK ini tidak dapat dibandingkan karena belum tersedianya informasi mengenai data pembandingan dengan target unit kerja/kementerian/nasional.



Gambar 15 Sharing Session Budaya Kerja di Lingkungan Setjen Pada Tanggal 25 April 2022 di Perpustakaan Archipelago Marine Library

Capaian atas IKK ini diperoleh melalui konsensus Tim Asesor atas hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022. Realisasi atas target sebesar 3,91 diperoleh dari 2 aspek, yaitu aspek pemenuhan dan aspek reform. Untuk aspek pemenuhan, dari nilai maksimal sebesar 2, area Manajemen Perubahan Setjen memperoleh nilai sebesar 1,6. Sedangkan untuk aspek reform, dari nilai maksimal sebesar 3, area Manajemen Perubahan Setjen memperoleh nilai sebesar 2,31 sehingga total nilai area Manajemen Perubahan Setjen sebesar 3,91 atau sebesar 102,89% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendukung keberhasilan ini, yaitu pemenuhan LKE area Manajemen Perubahan tahun 2021 dan tahun 2022 serta pelaksanaan rencana kegiatan area Manajemen Perubahan tahun 2021 yang didukung oleh Pimpinan tertinggi serta seluruh pegawai di lingkungan Setjen. Biro HKLN akan tetap berkomitmen dalam pelaksanaan 2 kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu pembentukan Tim RB Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dan Penyusunan rencana kegiatan RB Setjen yang selaras dengan road map RB KKP melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Biro HKLN, yaitu implementasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK yang telah diinternalisasi melalui penyelenggaraan kuis setelah Apel Pagi lingkup Biro HKLN.

05

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat 4 komponen penilaian yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE), yaitu:

- Perencanaan kinerja (bobot 30%);
- Pengukuran kinerja (bobot 30%);
- Pelaporan kinerja (15%); dan
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%).

Sasaran Kegiatan 1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Penyiapan Produk Hukum KKP													
IKK 5 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri													
Realisasi					2022				Renstra Setjen 2020 - 2024				
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2021- 2022	Target 2022	% Capaian Terhadap Target 2022	Target 2024	% Capaian Atas Target 2024	
-	-	-	89,05	96,30	92	96,54	104,98%	0,25%	92	104,93%	94	102,70%	

Tabel 7 Capaian IKK 5 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Mengacu ke Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor: B. 1285/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 hal Penyampaian Rekomendasi Hasil Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2022, nilai rekonsiliasi kinerja Biro HKLN adalah sebagai berikut.

No	Unit Kerja	Nilai per Aspek				Rata-rata/ Total Skor (Nilai Max 100)
		Kepatuhan (Bobot 25%)	Kesesuaian (Bobot 25%)	Ketercapaian (Bobot 30%)	Ketepatan (Bobot 20%)	
Setjen						96,43
1	Biro Keuangan	25,00	25,00	27,50	20,00	97,50
2	Biro SDMAO	25,00	24,74	26,44	20,00	96,18
3	Biro Umum dan PBJ	25,00	24,80	27,39	20,00	97,19
4	Biro Humas dan KLN	25,00	25,00	26,54	20,00	96,54
5	Biro Perencanaan	25,00	24,74	28,54	20,00	98,28
6	Biro Hukum	25,00	25,00	29,45	20,00	99,45
7	LPMUKP	25,00	25,00	21,16	18,00	89,16
8	Pusdatin	25,00	25,00	24,33	20,00	94,33
9	BPISDKP	25,00	25,00	29,21	20,00	99,21

Tabel 8 Capaian IKK 5 Nilai Rekonsiliasi Unit Kerja Eselon II Lingkup Setjen

Adapun faktor pendukung keberhasilan pemenuhan target IKK, yaitu pengecekan berulang ketersediaan informasi dan kelengkapan dokumen yang terdiri atas perjanjian kinerja, manual IKK, rincian target IKK, evaluasi Renaksi pencapaian target dan LKj level 2 beserta data dukung LKj. Selain itu juga dilakukan pengecekan atas satuan target seluruh IKK pada perjanjian kinerja, lembar pengesahan yang sudah ditandatangani (seluruh LKj triwulanan), penyesuaian penomoran urut IKK di seluruh dokumen kinerja (perjanjian kinerja, manual IKK, rincian target IKK, Renaksi pencapaian target dan LKj) dengan aplikasi kinerjaku hagar konsisten atau harmonis, serta ketepatan waktu dalam pelaporan capaian kinerja ke www.kinerjaku.go.id.

06 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Informasi publik sendiri berdasarkan Undang-Undang tersebut berupa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/KEPMEN-KP/SJ/2019 dan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 74/KEPMEN-KP/SJ/2019.

Nilai keterbukaan informasi publik dibentuk oleh tiga indikator, yaitu:

- Indikator 1 (nilai maksimal 30%) yakni hasil penilaian pengembangan website dan pengumuman informasi;
- Indikator 2 (nilai maksimal 40%) yakni hasil penilaian pelayanan informasi dan penyediaan informasi; dan
- Indikator 3 (nilai maksimal 30%) yakni hasil penilaian presentasi.

Sasaran Kegiatan 2 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri												
IKK 6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik												
Realisasi					2022				Renstra Setjen 2020 - 2024			
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2021- 2022	Target 2022	% Capaian Terhadap Target 2022	Target 2024	% Capaian Atas Target 2024
85,96	68,82	90,4	92,08	96	90	91,55	101,72%	-4,64%	82	111,65%	82	111,65%

Tabel 9 Capaian IKK 6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Jika dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama pada tahun 2021 maka capaian di tahun 2022 mengalami penurunan, yaitu dari 96 menjadi 91,55. Penyebab utama menurunnya capaian ini, yaitu terdapatnya perubahan tata cara evaluasi KIP yang semula mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menjadi Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

IKK ini tidak memiliki standar nasional. Meskipun demikian, berdasarkan nilai yang dirilis dalam berita resmi dan penilaian dari Komisi Informasi Pusat, KKP menduduki posisi 30 besar Badan Publik Kategori Kementerian. Adapun daftar 30 besar Badan Publik kategori Kementerian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Kementerian Pertanian	99,70
2	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	99,45
3	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas	99,45
4	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	98,85
5	Kementerian Perdagangan	98,82
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	98,55
7	Kementerian Perindustrian	98,51
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	98,45
9	Kementerian Dalam Negeri	98,33
10	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	98,18
11	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	98,10
12	Kementerian Perhubungan	98,05
13	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	97,83

No	Nama Badan Publik	Nilai
14	Kementerian Ketenagakerjaan	97,61
15	Kementerian Luar Negeri	97,57
16	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	97,12
17	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	97,08
18	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	96,99
19	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	96,52
20	Kementerian Keuangan	95,75
21	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	95,74
22	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	95,37
23	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	95,25
24	Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal	94,88
25	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	94,78
26	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	94,68
27	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	94,29
28	Kementerian Kelautan dan Perikanan	91,55
29	Kementerian Kesehatan	91,40
30	Kementerian Pertahanan	90,74

Tabel 10 Daftar 30 Besar Badan Publik Kategori Kementerian dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat

Pencapaian atas target IKK didukung oleh komitmen dan kolaborasi seluruh unit kerja eselon I lingkup KKP, khususnya saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal dimana seluruh unit kerja eselon I lingkup KKP melakukan presentasi terhadap upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi di masing-masing unit kerja. Selain menyampaikan paparan, pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal ini dapat menjadi ajang bagi unit kerja untuk melakukan perbaikan atas masukan yang diberikan oleh Tim Penilai yang terdiri atas Tim Penilai internal KKP dan Tim Penilai eksternal KKP (Komisi Informasi Pusat). Faktor lain yang menjadi pendukung capaian atas target IKK, yaitu dukungan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang diberikan oleh unit kerja eselon I sebelum disampaikan ke Komisi Informasi Pusat untuk dilakukan penilaian lebih lanjut.

07

Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan

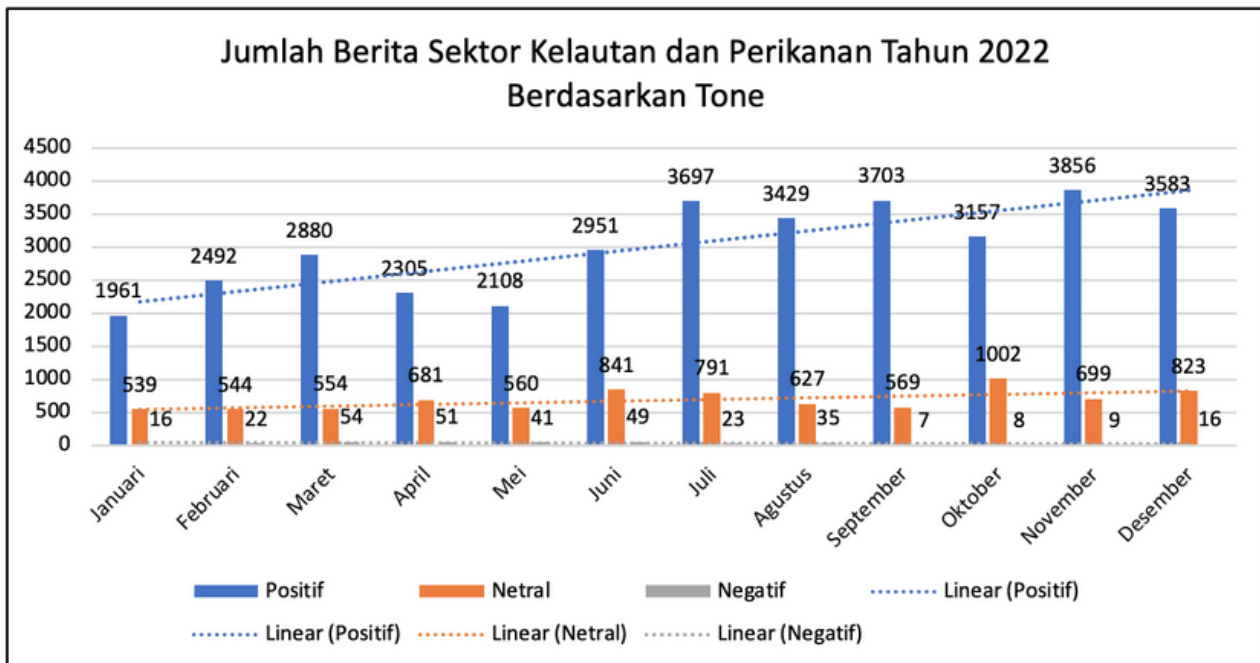
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan KKP, kegiatan kehumasan yang dilaksanakan, dirancang dan disusun untuk mewujudkan keterbukaan, itikad baik, kerja sama, dan hubungan yang baik dan bermanfaat antara KKP dan pihak lain dan membantu KKP untuk responsif atas informasi yang beredar guna mewujudkan citra positif KKP.

Sentimen pemberitaan KKP terdiri dari 3 (tiga) tonase, yaitu positif, netral, dan negatif. Sentimen positif berisi dukungan dan apresiasi, baik terhadap lembaga, figur, dan program-program KKP. Sentimen positif cenderung menjadi headline utama pemberitaan di media massa. Sentimen netral merupakan pemberitaan yang tidak bertendensi negatif ataupun positif. Biasanya berupa deskripsi suatu peristiwa atau penjelasan yang mendukung atau menolak (bersifat passing mention). Sedangkan sentimen negatif adalah pemberitaan yang bersifat negatif yang kontra dengan KKP sebagai institusi, atau Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Menteri, termasuk yang kontra terhadap program dan kebijakan KKP.

Sasaran Kegiatan 2 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri												
IKK 7 Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan												
Realisasi					2022				Renstra Setjen 2020 - 2024			
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2021- 2022	Target 2022	% Capaian Terhadap Target 2022	Target 2024	% Capaian Atas Target 2024
-	-	-	84,56%	99,17%	>87%	99,26%	114,09%	0,09%	>87%	114,09%	>89%	111,53%

Tabel 11 Capaian IKK 7 Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian atas IKK ini belum tersedia di tahun 2017 hingga 2019. Hal ini disebabkan karena nomenklatur IKK yang berbeda dengan nomenklatur IKK di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2017 hingga 2019, nomenklatur IKK, yaitu "Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan KKP Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya". Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi "Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan". IKK ini belum memiliki standar nasional, regional maupun internasional. Juga belum tersedia data perbandingan dari K/L lainnya sehingga belum bisa dilakukan perbandingan.



Gambar 16 Capaian IKK 7 Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan

Sepanjang tahun 2022, kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro HKLN dalam rangka meningkatkan rasio pemberitaan netral dan positif di sektor kelautan dan perikanan, yaitu:

- Mendokumentasikan dan mempublikasikan sebanyak 91 kegiatan kunjungan kerja Pimpinan (Menteri Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Jenderal dan Pimpinan terkait) di luar Kota Jakarta dan sebanyak 147 kegiatan di luar kantor namun masih di dalam Kota Jakarta.
- Produktivitas video yang dipublikasikan melalui media sosial (Instagram & Youtube) milik KKP. Video dimaksud terdiri dari video liputan kegiatan reguler Pimpinan, video liputan khusus terkait sektor kelautan dan perikanan, video taping dan video kreatif untuk sosialisasi program dan kebijakan KKP. Tim Dokumentasi dan Peliputan telah memproduksi sebanyak 264 video yang terdiri atas 57 video liputan, 55 video liputan khusus, 98 video taping dan 54 video kreatif.
- Memproduksi sebanyak 792 artikel yang apabila ditarik nilai rata-ratanya per hari mampu menyebarkan dua siaran pers ke media massa. Jumlah tersebut dianggap kategori ideal mengingat daya tampung siaran pers di masing-masing media sangat terbatas. Sebagian besar siaran pers dihasilkan oleh unit kerja BHKLN sebanyak 176 artikel, disusul BRSDM 147 artikel dan Ditjen PRL 93 artikel.
- Publikasi di media massa, seperti Brand News Room di Detik.com, Jawapos, Investor Daily, Media Indonesia, dan media lokal Padang Express terkait promosi kegiatan Exploring Mandeh Road to Bulan Cinta Laut.



Gambar 17 Konferensi Pers Dalam Rangka Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-9 di Pantai Mosing, Kabupaten Parigi Moutong

- Melaksanakan sebanyak 23 kali konferensi pers dengan mengundang media yang terdaftar dalam Dewan Pers dan media tier 1 dan tier 2 yang membidangi isu isu kelautan dan perikanan, ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.
- Pelaksanaan Bincang Bahari yang dilaksanakan sebanyak 10 kali dengan mengundang media yang terdaftar di Dewan Pers dan merupakan media tier 1 dan tier 2.
- Pencetakan majalah internal KKP, yaitu Majalah Si Mila (segmentasi demografi usia 7 s.d. 15 Tahun) sebanyak 10 edisi pada bulan Januari s.d. Oktober 2022 dan Majalah KKP Accelarate (segmentasi demografi usia 16 s.d. 65 tahun) sebanyak 5 edisi pada bulan Januari s.d. Mei, dan Majalah SEGARA (Samudera Informasi Seputar Kelautan dan Perikanan) yang terdiri dari 3 edisi, yaitu pada bulan Juni s.d. Agustus.
- Memproduksi sebanyak 38 video dokumenter yang bekerja sama dengan sejumlah media dan Production House (PH) dalam proses produksi dan penyebaran konten. Konten video dokumenter Neptune Tv dipublikasikan melalui beberapa platform internal dan eksternal, bekerja sama dengan beberapa media partner, meliputi media sosial KKP (YouTube, Instagram, Twitter, Facebook), IndiHome TV, Maxstream, dan media (berupa pemberitaan dalam bentuk feature maupun konten promosi di media sosial media tersebut).

IKU 8 Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui lembaga stakeholder lainnya

Pendahuluan

Selain melalui media cetak, visual dan media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro HKLN) KKP seperti majalah, videotron, website www.kkp.go.id, akun youtube, facebook, instagram dan twitter Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro HKLN juga mengembangkan komunikasi dan public relations berupa publikasi program dan kegiatan KKP melalui stakeholder KKP. Adapun stakeholder/bentuk komunikasi dengan stakeholder KKP adalah sebagai berikut:

- MPR;
- DPD;
- DPR;
- DPRD Tingkat I dan II,
- Pemerintah Daerah Tingkat I dan II;
- Kementerian dan Lembaga terkait;
- Lembaga nonpemerintah; dan
- Pendampingan Menteri KP

Publikasi program dan kegiatan KKP tersebut dilakukan melalui pendampingan stakeholder dalam beberapa kegiatan. Dasar dari pendampingan tersebut adalah undangan dari stakeholder kepada KKP maupun kepada Biro HKLN untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan mereka baik di Jakarta maupun di daerah. Oleh karena keikutsertaan Biro HKLN tersebut dipandang penting dan strategis terutama dari sisi Biro HKLN maka penganggaran untuk kegiatan pendampingan selalu dialokasikan setiap tahun anggaran. Melalui pendampingan, Biro HKLN semakin mengenalkan dan mendiseminasikan program dan kebijakan KKP kepada masyarakat luas, secara langsung maupun tidak langsung.

Setiap tahun Biro HKLN juga menyelenggarakan program komunikasi publik dan hubungan masyarakat melalui pameran dimana dalam kegiatan tersebut KKP melalui Biro HKLN dapat secara langsung kontak dengan peminat informasi serta bahan-bahan komunikasi dan publikasi KKP yang disediakan oleh Biro HKLN. Pada tahun 2022, direncanakan dilakukan penyelenggaraan pameran bidang Kelautan dan Perikanan yang secara teknis penyelenggaraannya dilakukan langsung dan/atau dikoordinasikan oleh Biro HKLN dengan jumlah sebanyak 4 kali.

a. Realisasi dan Capaian IKU

Tahun 2022			Tahun 2021			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
80%	100%	120%	IKU Baru			nihil	nihil	nihil

Tabel 20 Realisasi dan Capaian IKU Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui lembaga stakeholder lainnya tahun 2022

Berdasarkan data dalam tabel di atas, realisasi IKU Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui lembaga stakeholder lainnya tahun 2022 adalah 80%.

Realisasi IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase realisasi} = ([\% \text{ realisasi hubungan lembaga} + \% \text{ realisasi pameran (akumulasi dari Tw I)}] / 2)$$

- Realisasi hubungan lembaga berupa pendampingan stakeholder triwulan IV 2022 adalah 100%
- Realisasi pameran pada akhir 2022 atau akhir triwulan IV 2022 adalah: $(4/4) \times 100\% = 100\%$

Dengan demikian:

$$\text{Persentase realisasi} = (100\% + 100\%) / 2 = 100\%.$$

b. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan

Target IKU ini pada Akhir tahun 2022/akhir Triwulan IV 2022 adalah 80% maka capaian IKU adalah:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= (\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\% \\ &= (100\% / 80\%) \times 100\% = 125\%\end{aligned}$$

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024 belum memuat IKU ini dalam lampirannya sehingga tidak tersedia data mengenai target jangka menengah IKU. Sebagai konsekuensinya, tidak bisa dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

d. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-Tahun Sebelumnya

2017		2018		2019		2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	-	-	80%	120%

Tabel 21 Target dan Realisasi IKU Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui lembaga stakeholder lainnya pada 5 Tahun Terakhir

Tidak tersedia data target dan realisasi IKU sebelum tahun 2022 karena merupakan IKU baru.

e. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi di Level Unit Kerja/Kementerian/ Nasional/Internasional

Tidak tersedia informasi agar dapat dilakukan perbandingan.

f. Keberhasilan/Kegagalan pencapaian IKU

Sepanjang tahun 2022, setiap kali Biro HKLN melakukan kegiatan kehumasan berupa aktivitas hubungan kelembagaan melalui pendampingan stakeholder dan salah satu mitra KKP yang paling utama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta merupakan Lembaga legislatif di tingkat pusat, selalu ditindaklanjuti dengan tindakan komunikasi internal KKP dengan meneruskan/menyampaikan hasil tertulis kegiatan pendampingan tersebut terutama yang berbentuk saran dan masukan kepada unit kerja eselon I KKP yang terkait. Oleh karena itu, realisasi dari kegiatan hubungan kelembagaan adalah 100%;

Pada tahun 2022, Biro HKLN direncanakan untuk menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan sejumlah 4 pameran KKP. Akhir 2022, berhasil dilaksanakan 4 pameran sehingga besar realisasi salah satu kegiatan kehumasan dan komunikasi publik Biro HKLN ini adalah 100%. Dengan demikian realisasi IKU Biro HKLN 'Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui lembaga stakeholder lainnya' tahun 2022 adalah 100%, melampaui target akhir tahun yaitu 100%;

g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang terlibat dalam IKU ini terdiri dari:

- 1 orang Kepala Biro;
- 1 orang Koordinator;
- 2 orang Subkoordinator;
- 2 orang staf

h. Upaya/rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tidak ada upaya khusus yang diperlukan dalam rangka perbaikan kinerja untuk IKU ini karena sejak triwulan I sampai target triwulanan IKU selalu terlampaui.

i. Kegiatan pameran dan pendampingan

Penyelenggaraan pameran bidang KP selama tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Lokasi	Nama Pameran	Waktu	Implementasi	Keterangan
1	Provinsi Sumatera Utara	Pameran Dalam Rangka North Sumatera Marine Aquaculture	22-23 Maret 2022	Dilaksanakan	Dalam kesempatan ini, KKP menghadirkan <i>booth</i> yang menyampaikan materi berupa program prioritas KKP yaitu antara lain penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor, dan pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal. Materi disampaikan dalam bentuk infografis, video, dan publikasi melalui majalah Simila dan Laut Kita. Dengan kegiatan di booth berupa sosialisasi dan edukasi, kuis interaktif, serta helpdesk layanan kepada masyarakat, booth KKP pada pameran ini dikunjungi oleh 250 orang pengunjung.
2	Provinsi Bali	Pameran dalam rangka kunjungan kerja Kantor Staf Presiden (KSP) ke Kabupaten Buleleng, Bali	21 Juni 2022	Dilaksanakan	Dalam pameran ini, <i>booth</i> KKP menampilkan antara lain yaitu <i>safety briefing</i> tentang detail bantuan KKP yang diberikan di wilayah Buleleng; produk UMKM perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha di wilayah Buleleng; visual bantuan bidang kelautan dan perikanan yang diberikan ke masyarakat Buleleng, seperti ikan kakap putih, rumput laut, ikan lele, dan lobster; sosialisasi oleh penyuluh perikanan; serta helpdesk layanan bantuan permodalan. <i>Booth</i> KKP dikunjungi oleh 150 pengunjung yang berasal dari masyarakat umum, mahasiswa, anggota LSM, nelayan dan pembudidaya ikan di wilayah Buleleng, Bali
3	Provinsi Maluku Utara	Pameran Dalam Rangka Sail Tidore	September 2022	Dilaksanakan	Paviliun KKP mengusung tema “Ekonomi Biru untuk Indonesia Sejahtera” dengan menampilkan materi yaitu program prioritas kelautan dan perikanan, capaian kinerja KKP, serta layanan dan fasilitas perpustakaan. Selain itu, paviliun KKP menyelenggarakan kuis interaktif, kuis roulette, edukasi dan literasi kelautan dan perikanan kepada anak-anak, lomba mewarnai dan menggambar, storytelling, sosialisasi Penangkapan Ikan Terukur, helpdesk layanan permodalan. dan foto dari para peserta lomba fotografi bawah laut Explore Soasio Tonggowai di Kepulauan Tidore. Dengan jumlah kunjungan di booth KKP yaitu 1.037 orang, desain yang menarik, dan kegiatan yang edukatif dan interaktif, booth KKP mendapatkan apresiasi dari Panitia Sail Tidore 2022 sebagai Juara III pada penyelenggaraan Pameran Sail Tidore 2022
4	Provinsi Sumatera Barat	Pameran dalam kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL)	21 Oktober 2022	Dilaksanakan	Pameran bertempat di Pantai Purus, Kota Padang, Sumatera Barat. Tujuan dari pameran ini adalah untuk menampilkan hasil foto dari kegiatan turnamen fotografi dan videografi bawah laut dan kegiatan pendukung BCL di antaranya adalah Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), diskusi interaktif dan produk hasil daur ulang dari unit kerja lingkup KKP dan

					komunitas/NGO yang aktif dalam mendorong kegiatan ekonomi sirkular. Adapun sasaran pameran adalah masyarakat umum, mahasiswa, komunitas pemberdayaan masyarakat, dan media di wilayah Sumatera Barat. Peserta pada pameran ini adalah unit kerja Eselon I lingkup KKP; Pemerintah Daerah; NGO/komunitas; dan UMKM yang mendukung kegiatan ekonomi sirkular. Dengan dibagi menjadi 4 zona yaitu : 1) zona pameran fotografi yang menampilkan hasil karya dari peserta turnamen fotografi dan videografi bawah laut yang diselenggarakan di Perairan Mandeh; 2) Zona exhibition yang menampilkan produk-produk pemberdayaan masyarakat yang mendukung kegiatan ekonomi sirkular dengan partisipasi adalah Pemerintah Daerah, unit kerja di lingkungan KKP, dan komunitas/NGO; 3) Zona BCL Corner yang menampilkan diskusi interaktif dengan pegiat/komunitas/pihak yang menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung ekonomi sirkular; serta 4) Zona Gemarikan yang menampilkan kegiatan masak dan makan ikan bersama; Diperkirakan, <i>booth</i> KKP dikunjungi oleh 260 pengunjung.
--	--	--	--	--	--

Tabel 22 Daftar kegiatan pameran yang diselenggarakan dan/atau dikoordinasikan Biro HKLN hingga akhir Tahun 2022

Sedangkan kegiatan pendampingan stakeholder pada triwulan terakhir 2022 dapat dilihat dalam lampiran 6.

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Berdasarkan undang-undang yang sama, pemustaka diterangkan sebagai pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan dan pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan berperan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional dan keberadaannya menjadi salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, dan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa maka perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Diharapkan, melalui keberadaan perpustakaan, masyarakat memiliki wahana dan akses lebih luas kepada sarana pembelajaran dan pengembangan kapasitas sepanjang hayat serta wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, perpustakaan dapat menjadi pedoman bagi pertumbuhan peradaban di Indonesia sehingga diharapkan supaya perpustakaan semakin menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal ini diperkirakan diawali ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal dimana pada hakikatnya nenek moyang kita secara sengaja atau tidak sengaja mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan diteruskan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Demikianlah dalam pemahaman disiplin ilmu perpustakaan eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia dengan adanya penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan maka pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks sehingga memicu perkembangan ilmu, sistem dan teknik pengelolaan perpustakaan di berbagai belahan wilayah di dunia.

Pengelolaan dan sistem perpustakaan KKP menjadu tanggung jawab Biro HKLN terutama melalui system informasi. Sejak tahun 2015 sistem pengelolaan perpustakaan KKP mengalami perubahan berupa peningkatan pelayanan dari semula menggunakan katalog manual menjadi perpustakaan dengan sistem terautomasi dan akhirnya melangkah kepada era perpustakaan digital. Beragam kegiatan telah dilakukan untuk semakin mengenalkan dan mempublikasikan sistem baru ini dan meningkatkan jumlah kunjungan

serta pemanfaatan koleksi perpustakaan KKP. Kegiatan tersebut diantaranya bekerja sama dengan komunitas-komunitas peminat perpustakaan, pameran, pemasangan baliho pemanfaatan media sosial Biro HKLN, publikasi melalui videotron KKP, kerja sama dengan perpustakaan-perpustakaan di lingkungan eselon I KKP dan bimbingan literasi kepada pegawai KKP. Pada tahun 2022, sistem pengelolaan perpustakaan KKP dikenal sebagai Archipelago Indonesia Marine Library. Kata 'Archipelago' berasal dari gabungan kata 'archive' dan 'archipelago' yang memiliki makna tempat yang paling sesuai dan lengkap untuk menyimpan informasi mengenai kelautan dan perikanan Indonesia, merupakan perpustakaan khusus di bawah Biro HKLN Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan koleksi khusus di bidang kelautan dan perikanan dan beberapa bidang terkait lainnya.

a. Realisasi dan Capaian IKU

Tahun 2022			Tahun 2021			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
10%	15,84%	120%	IKU Baru			nihil	nihil	nihil

Tabel 23 Realisasi dan capaian IKU Persentase pemanfaatan koleksi Perpustakaan KKP oleh anggota Perpustakaan KKP

Pada triwulan terakhir tahun 2022, koleksi Perpustakaan KKP (Archipelago) yang dimanfaatkan oleh Pemustaka Bahari adalah sejumlah 396 judul yang detailnya dapat dilihat dalam Lampiran 7. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilakukan penghitungan realisasi Indikator Kinerja Utama Biro HKLN pada tahun 2022 yaitu 'Persentase pemanfaatan koleksi Perpustakaan KKP oleh anggota Perpustakaan KKP', sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = (\text{Jumlah judul koleksi yang dipinjam (akumulasi triwulan I s.d. IV)}) / \text{jumlah semua judul koleksi} \times 100\%$$

$$((160 + 376 + 295 + 396) / 7744) \times 100\% = 15,84\%$$

b. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan

Oleh karena target IKU ini pada akhir triwulan IV atau akhir tahun 2022 adalah sebesar 10% maka capaian IKU dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{target}) \times 100\% = (15,84\% / 10\%) \times 100\% = 150,84\%$$

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024 belum memuat IKU ini dalam lampirannya sehingga tidak tersedia data mengenai target jangka menengah IKU. Akibatnya, tidak bisa dilakukan perbandingan antara realisasi 2022 dengan target jangka menengah.

d. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-Tahun Sebelumnya

2017		2018		2019		2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 24 Target dan Realisasi IKU selama 5 tahun terakhir

Tidak tersedia data target dan realisasi IKU sebelum tahun 2022 karena merupakan IKU baru.

e. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi di Level Unit Kerja/Kementerian/ Nasional/Internasional

Tidak tersedia informasi agar dapat dilakukan perbandingan.

f. Keberhasilan pencapaian IKU

Pada tahun 2022 sempat terjadi kendala dalam pelaksanaan IKU yaitu terjadi *trouble* pada website katalog online perpustakaan yaitu down pada tanggal 28 Juli 2022, minggu ke – 4 Agustus 2022, dan pada tanggal 8 September 2022. Problem ini disebabkan tingginya jumlah anggota perpustakaan yang mengakses website katalog online perpustakaan. Untuk itu, pengelola perpustakaan memerlukan waktu untuk mengaktifkan kembali website agar dapat diakses kembali oleh para pengguna perpustakaan. Selain itu, Archipelago juga telah berkoordinasi dengan Pusdatin untuk menambah kapasitas untuk koneksi ke akses katalog online perpustakaan dari 200 akun setiap hari menjadi 500 akun setiap hari.

Sepanjang tahun 2022, Archipelago telah mengupayakan terselenggaranya sosialisasi layanan, koleksi, dan fasilitas Archipelago kepada Pustakawan dan pengelola perpustakaan lingkup KKP melalui kegiatan Sesi Berbagi serta kepada pegawai KKP di wilayah Cirebon, Jawa Barat melalui kegiatan Pendidikan pustaka, penyebaran informasi melalui media sosial dan beragam kegiatan pengomunikasian program Archipelago lainnya melalui platform digital.

Hasilnya adalah pada tahun 2022, jumlah koleksi Archipelago yang dimanfaatkan oleh Pemustaka Bahari adalah sejumlah 1227 judul, atau 15,84% dari keseluruhan judul koleksi perpustakaan. Sebagian besar koleksi yang dimanfaatkan oleh anggota perpustakaan tersebut yaitu dalam format digital yang dapat diakses melalui katalog online perpustakaan.

g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia Biro HKLN yang telah didayagunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka memenuhi bahkan melampaui target IKU di tahun 2022 terdiri dari:

- a. 1 orang Kepala Biro;
- b. 1 orang Koordinator;
- c. 1 orang Subkoordinator; dan
- d. 2 orang staf.

h. Upaya/rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tidak ada upaya khusus yang diperlukan dalam rangka perbaikan kinerja untuk IKU ini karena sejak triwulan I sampai target triwulanan IKU selalu terlampaui.

IKU 10 Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK dan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Masih berdasarkan Peraturan yang sama, pejabat yang merupakan satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dimana tindak lanjut atas rekomendasi tersebut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pada I tahun 2021, capaian IKU ini belum dapat ditampilkan dalam laporan ini karena frekuensi perhitungan pada IKU ini dilakukan secara tahunan dengan capaian yang akan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Biro Keuangan atau Biro Perencanaan.

a. Realisasi dan Capaian IKU

Tahun 2022			Tahun 2021			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	nihil	100%

Tabel 25 Realisasi dan capaian IKU Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2022

Berdasarkan hasil yang diterima oleh Biro HKLN yang berasal dari sumber eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, realisasi IKU ini adalah 100% karena besar temuan pada Biro HKLN adalah Rp 0,-

b. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan

Target IKU ini tahun 2022 adalah 100% sehingga capaian tahun 2022 dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= (\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\% \\ &= (100\% / 100\%) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah adalah 100% oleh karena itu capaian IKU ini apabila didasarkan pada target akhir jangka menengah 2020-2024 adalah 100%.

d. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-Tahun Sebelumnya

2017		2018		2019		2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 26 Target dan Realisasi IKU yang sama dari tahun 2017 sampai 2021

Dalam lima tahun terakhir, baik target maupun realisasi IKU ini *flat* pada angka 100%.

e. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi di Level Unit Kerja/Kementerian/ Nasional/Internasional

Di dalam matriks di bawah, tersaji data rekapitulasi realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal pada tahun 2022.

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendas (%)
1	Biro Perencanaan	23	23	100,00	0	00,00
2	Biro Keuangan	10	10	100,00	0	00,00
3	Biro Umum dan PBJ	10	10	100,00	0	00,00
4	Biro Hukum	19	19	100,00	0	00,00
5	Biro SDMAO	20	20	100,00	0	00,00
6	Biro Humas dan KLN	0	0	100,00	0	00,00
7	Pusdatin	25	25	100,00	0	00,00
8	LPMUKP	11	11	100,00	0	00,00
TOTAL		118	118	100,00	0	00,00

f. Keberhasilan pencapaian IKU

Beberapa hal yang sudah dilakukan Biro HKLN sepanjang tahun 2022 dalam mendukung pencapaian target IKU seperti:

1. Menindaklanjuti temuan tahun 2021 (nihil temuan),
2. Menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah,
3. Melakukan inventarisasi,
4. Mereviu laporan keuangan,
5. Menyelesaikan catatan revidi laporan keuangan dan rekonsiliasi data BMN dan keuangan serta pengawasan melalui audit dan evaluasi,
6. Perbaikan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara,
7. Perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalkan penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
8. Mengikuti pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan melalui penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan yang bersifat strategis, menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis dan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis, dan
9. Koordinasi dengan Biro Keuangan.

g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia Biro HKLN yang telah didayagunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka memenuhi target IKU di tahun 2022 terdiri dari:

- a. 1 orang Kepala Biro;
- b. 1 orang Subkoordinator; dan
- c. 6 orang staf.

h. Upaya/rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya yang diperlukan dalam rangka remediasi kinerja tidak diberikan sebagai arahan atau rekomendasi oleh pihak eksternal Biro HKLN.

Pendahuluan

Berdasarkan informasi dari situs website milik Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah di salah satu instansi pemerintah daerah menerangkan bahwa Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta dapat digunakan sebagai ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatan dan fungsinya.

Pasal 5 Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa ada 5 (lima) prinsip untuk mengukur IP ASN yaitu:

1. Prinsip pertama, yakni koheren (coherent), kriteria yang digunakan sebagai standar pengukuran IP-ASN yang bersumber pada sistem merit (berkaitan langsung dengan data merit system).
2. Prinsip kedua, yakni kelayakan (worthiness), kelayakan standar pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disusun dengan mempertimbangkan data objektif atau data riil yang melekat secara Individual kepada pegawai ASN.
3. Prinsip ketiga, yakni Akuntabel, pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya.
4. Prinsip keempat, yakni dapat ditiru (enviable), pengukuran Indeks Profesionalitas dapat ditiru dan dibandingkan pengukurannya sesuai periode waktu dan lokusnya.
5. Prinsip kelima, yakni Multi Dimensional, pengukuran beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai penentu profesionalitas seseorang. Multi Dimensional sendiri terbagi menjadi 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Dimensi Disiplin,

digunakan untuk mengukur data atau informasi lainnya memuat hukuman yang telah diterima PNS, dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran.

Untuk memudahkan kita melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN sebaiknya kita menyiapkan Sistem Aplikasi Kepegawaian atau SAPK, pendataan ulang PNS atau E-PUPNS, Sasaran Kerja Pegawai atau SKP, dan data pelanggaran Disiplin. Berikut komponen perhitungannya :

Pegawai pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat memiliki perhitungan sebesar 1%;

Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang memiliki perhitungan sebesar 2%;

Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat memiliki perhitungan sebesar 3%;

Pegawai yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat, memiliki perhitungan sebesar 5%.

- Dimensi Kualifikasi,

digunakan untuk mengukur data kualifikasi pendidikan formal PNS paling tinggi sampai yang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh pengukuran. Pada dimensi ini perlu diketahui bobot nilai dari indikator pengukuran berdasarkan kualifikasi pendidikan, yaitu:

Pendidikan di bawah SLTA sederajat diperhitungkan sebesar 1%;

Pendidikan SLTA, D1 dan D2 sederajat diperhitungkan sebesar 5%;

Pendidikan D3 diperhitungkan sebesar 10%;

Pendidikan D4 dan S1 diperhitungkan sebesar 15%;

Pendidikan S2 diperhitungkan sebesar 20%; dan

Pendidikan S3 diperhitungkan sebesar 25%.

- Dimensi Kompetensi,

digunakan untuk mengukur data atau informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatan dimensi. Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari seluruh pengukuran. Ada pun secara singkat, perhitungan 40% dengan rincian indikator sebagai berikut:

Diklat PIM saat ini PKA dan PKP bagi Struktural atau Diklat Fungsional bagi jabatan Fungsional memiliki perhitungan sebesar 15%;

Diklat Teknis 20 JP dalam satu tahun memiliki perhitungan sebesar 15%;
Workshop Seminar atau sejenisnya memiliki perhitungan sebesar 10%.

- Dimensi Kinerja,
digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini diperhitungkan sebesar 30% dari seluruh pengukuran, dengan rincian indikator sebagai berikut:
Nilai capaian SKP 50 ke bawah atau buruk memiliki perhitungan sebesar 1%;
Nilai SKP 51-60 kurang memiliki perhitungan sebesar 5%;
Nilai SKP 61-75 cukup memiliki perhitungan sebesar 10%;
Nilai SKP 76-90 baik memiliki perhitungan sebesar 15%;
Nilai 91-100 sangat baik memiliki perhitungan sebesar 20%.

Range nilai dalam pengkategorian tingkat profesionalitas ASN terbagi ke dalam kategori:

- sangat tinggi (91-100),
- tinggi (81-90),
- sedang (71-80),
- rendah (61-70), dan
- sangat rendah (dibawah 60).

IP ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatan dan fungsinya. Pengukuran ini bermanfaat dilihat dari beberapa sudut pandang. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi hal ini dapat dilihat pada capaian kinerjanya. Bagi individu ASN dapat digunakan sebagai pengembangan diri dalam rangka peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN dapat dilihat dari 4 (empat) dimensi yang telah dijabarkan di atas. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya terhadap pelayanan publik oleh pegawai.

a. Realisasi dan Capaian IKU

Tahun 2022			Tahun 2021			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
78	79,29	101,65%	73	77,65	106,20%	76	nihil	104,32%

Tabel 27 Realisasi dan Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2022

Data dari Memorandum Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Organisasi Pemerintah nomor : 70/SJ.3/KP.720/I/2023, perolehan Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN tahun 2022 adalah 79,29

b. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan

Target IKU ini di tahun 2022 adalah 78, oleh karena realisasi melampaui target maka capaiannya menjadi 101,65%.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Sekretariat Jenderal, capaian Biro HKLN mampu melampauinya sehingga besar capaiannya menjadi 104,32%

d. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-Tahun Sebelumnya

2017		2018		2019		2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	71	69,74	72	54,95	73	77,53

Tabel 28 Target dan Realisasi IKU IP ASN tahun 2017 sampai dengan 2021

Dalam tabel di atas terlihat target dan realisasi IKU dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Besar target IKU senantiasa meningkat;
- Biro HKLN baru mampu memenuhi target IKU pada 2 tahun terakhir;
- Target IKU semakin berat terutama setelah ada lonjakan kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yakni dari target hanya sebesar 73 naik menjadi 78.

e. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi di Level Unit Kerja/Kementerian/ Nasional/Internasional

Tidak terdapat standar nasional yang dapat dijadikan acuan menetapkan target IKU ini. Di lingkup Sekretariat Jenderal, berdasarkan besar IP ASN, posisi Biro HKLN bukan di tempat terendah meskipun tidak meraih nilai tertinggi. Dalam matriks di bawah, dapat kita lihat rekapitulasi nilai IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal akhir tahun 2022.

**Rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setjen
Triwulan IV Semester II Tahun 2022**

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	22.5	27.5	30	5	85
2	Biro Perencanaan	16.35	38.12	25.38	5	84.86
3	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	14.02	38.41	25.23	5	82.59
4	Biro Hukum	16.29	38.14	24.6	5	84.03
5	Biro HKLN	15.88	33.05	25.37	5	79.29
6	Biro Keuangan	14.13	34.1	26.6	5	79.95
7	Biro Umum dan PBJ	12.33	36.46	24.93	5	78.72
8	Pusdatin	14.55	40	26.18	5	85.79
9	BPISKP	18.95	34.34	23.74	4.89	81.92

f. Keberhasilan/Kegagalan pencapaian IKU

Biro HKLN berhasil memenuhi target IKU karena memperhatikan arahan Biro SDMAOP sebagai berikut:

- Melakukan pemutakhiran data Pendidikan terakhir untuk meningkatkan aspek kualifikasi;
- Mengusulkan pejabat yang belum mengikuti diklat fungsional khususnya yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu;
- Mengusulkan penyelenggaraan pelatihan secara virtual melalui aplikasi e-learning;
- Mengusulkan tugas dan izin belajar ke Badan RSDMKP;
- Monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai; dan
- Penerapan hukuman disiplin bagi pegawai (jika ada).

g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia Biro HKLN yang telah didayagunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka memenuhi target IKU di tahun 2022 terdiri dari:

- a. 1 orang Kepala Biro;
- b. 2 orang Subkoordinator; dan
- c. 1 orang staf.

h. Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya khusus yang dilakukan Biro HKLN untuk memenuhi target IKU terutama dititikberatkan pada pemutakhiran data pendidikan terakhir dan pelatihan-pelatihan melalui pegawai.kkp.go.id

IKU 12 Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Pendahuluan

Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi. KKP menggunakan aplikasi bitrix 14 (www.kinerjakkp.bitrix24.com) untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan dalam bentuk *tacit knowledge* untuk diketahui, dipelajari dan digunakan kembali oleh pegawai lainnya terutama pada saat pegawai yang sudah berbagi pengetahuan tersebut tidak lagi berada dalam organisasi. Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, keberadaan pengetahuan baik yang bersifat eksplisit dan *tacit* diyakini turut memberikan gambaran besar dari pencapaian hasil pembangunan kelautan dan perikanan. Data dan informasi yang terkandung dalam pengetahuan tersebut dapat menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan serta digunakan sebagai ukuran dari hasil yang direncanakan tercapai pada masa mendatang. Dengan demikian, sistem manajemen pengetahuan dapat membantu penyusunan arah dan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan optimal, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Penghitungan realisasi dan capaian untuk IKU Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dan di tingkat KKP diperoleh dari aplikasi Bitrix24 yang terdiri atas 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Dokumen: Dokumen yang harus diunggah di aplikasi Bitrix24 yaitu dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (triwulanan) dengan bobot 20%,
- Keikutsertaan: Di lingkup Unit Eselon II, Pejabat Eselon II hingga Pejabat Eselon IV wajib bergabung di aplikasi Bitrix24. Sedangkan untuk level staf, hanya 24 staf (setara 2 staf per Unit Eselon IV) yang wajib untuk bergabung dengan bobot 40%, dan
- Keaktifan: Indikator ini hanya berlaku untuk Pejabat Eselon II hingga Pejabat Eselon IV (staf tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian). Setiap pejabat agar dapat memberikan postingan setidaknya sekali setiap triwulan dengan bobot 40%.

a. Realisasi dan Capaian IKU

Tahun 2022			Tahun 2021			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
88%	100%	113,63	84%	93,98%	111,88%	90%	nihil	111,11%

Tabel 29 Realisasi dan Capaian IKU Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Tahun 2022

b. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

d. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-Tahun Sebelumnya

2017		2018		2019		2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
65%	35%	66%	98,89%	80%	100%	82%	100%	84%	93,98%

Tabel 30 Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar tahun 2017 sampai 2021

e. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi di Level Unit Kerja/Kementerian/ Nasional/Internasional

f. Keberhasilan/Kegagalan pencapaian IKU

g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

h. Upaya/rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tabulasi target, realisasi dan capaian atas IKU Persentase Unit Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada tahun 2022 dan *progress* kinerja IKU ini jika dibanding dengan perolehan kinerja pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya dapat dilihat Tabel 29. Berdasarkan arahan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal yang notabene merupakan pimpinan dari penanggung jawab penghitungan IKU ini di KKP, untuk tahun 2022 ditetapkan targetnya sebesar 88%. Berdasarkan hasil penghitungan yang diumumkan Kepala Pusdatin, Biro HKLN berhasil meraih realisasi sebesar 100%. Dengan realisasi tersebut maka capaiannya menjadi 113,63%. Hal ini berarti bahwa kinerja Biro HKLN melampaui target tahun 2022. Sebagaimana tercantum dalam Tabel 21, target akhir renstra 2020-2024 untuk IKU ini adalah 90% dan oleh karena itu apabila mengacu kepada target akhir tahun renstra maka Biro HKLN diyakini akan dapat memenuhinya karena capaiannya adalah 111,11 persen, melebihi 100%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian Biro HKLN untuk IKU ini pada tahun 2021, maka baik realisasi maupun capaian mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 9,72% dan 6,15%. Tentu saja hal ini merupakan performa yang baik mengingat besar target juga mengalami perubahan dari 84% di tahun 2021 menjadi 88% di tahun 2022. Adapun beberapa faktor yang diyakini berperan dalam pemenuhan target IKU dan peningkatan realisasi dan capaian dibandingkan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022, seluruh kelompok kerja di Biro HKLN telah memiliki koordinator dan subkoordinator sehingga Biro HKLN bisa meraih nilai penuh, tidak seperti pada tahun 2021 dimana terdapat subkelompok yang belum mempunyai subkoordinator;
- b. Subkoordinator Tata Usaha Biro HKLN selalu memantau dengan saksama secara berkala (setiap pekan dan bulan) kelengkapan dan pemenuhan semua indikator yang diperlukan untuk IKU ini yang terdiri dari Dokumen, keikutsertaan dan keaktifan Kepala Biro HKLN beserta semua koordinator dan subkoordinator untuk mengunggah berita setidaknya 6 (enam) kali setiap triwulan;
- c. Subkoordinator Tata Usaha Biro HKLN selalu menanggapi dengan cepat dan cermat setiap masukan dari pegawai Pusdatin yang menanggjawab penghitungan IKU terutama dalam hal kedisiplinan pengungkahan berita ke www.kinerjakkp.bitrix24.com; dan
- d. Para pegawai Biro HKLN yang ditetapkan wajib untuk mengunggah berita ke aplikasi www.kinerjakkp.bitrix24.com semakin menunjukkan kesadaran dan tanggung jawabnya untuk mendukung Biro HKLN memenuhi target IKU ini. Hal ini ditunjukkan dengan distribusi unggahan berita ke dalam aplikasi yang semakin menyebar dan merata secara waktu ke setiap bulan dan pekan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana *timing* unggahan berita lebih banyak di akhir triwulan, pada tahun 2022 tidak lagi demikian.

IKU Persentase Unit Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tidak memiliki standar nasional. Perolehan realisasi dan capaian Biro HKLN untuk nilai IKU ini pada tahun 2022 di lingkup Sekretariat Jenderal memosisikan Biro HKLN sebagai salah satu unit kerja dengan performa terbaik. Nilai IKU Biro HKLN di atas realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Sekretariat Jenderal yang di bawah 100%. Kondisi ini hendaknya tetap memotivasi Biro HKLN untuk tetap berdisiplin sembari meningkatkan kinerjanya terkait IKU ini di triwulan-triwulan selanjutnya sehingga mampu untuk kembali memperoleh nilai realisasi sebesar 100% dan mempertahankan peringkatnya yaitu terbaik atau masuk ke dalam kelompok terbaik lingkup Setjen.

Kesimpulan

Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian IKU yang sama pada tahun 2021 maka pada tahun 2022 mengalami peningkatan pada realisasi dan pada capaian karena sudah ada subkoordinator definitif atau pelaksana tugas definitif subkoordinator Kerja Sama Intrakawasan di awal tahun 2022. Hal ini berakibat lengkapnya jumlah unggahan Biro HKLN harus dipenuhi setiap triwulan yang terakumulasi sampai dengan akhir tahun 2022.

Rekomendasi upaya yang perlu dilakukan Biro HKLN pada triwulan/triwulan-triwulan berikutnya agar memastikan capaian IKU ini maksimal adalah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Menyelesaikan laporan kinerja I tahun 2022 dengan tepat waktu dan ditandatangani oleh Kepala Biro HKLN serta hasilnya diunggah ke dalam *drive* yang disediakan Biro Perencanaan,
- Memastikan semua pejabat koordinator dan subkoordinator di Biro HKLN sudah mengunggah berita atau informasi tertulis yang berasal dari atau terkait dengan pekerjaannya sebelum tanggal terakhir setiap triwulan tahun 2022 ke aplikasi www.kinerjakkp.bitrix24.com dengan memenuhi elemen 5W+1H (*what, when, who, why, where* dan *how*) serta dilengkapi dokumentasi,
- Memantau kemajuan dari posting atau pengunggahan informasi atau berita ke www.kinerjakkp.bitrix24.com sembari mengevaluasi isi unggahan apakah sudah memenuhi elemen yang diwajibkan.
- Melakukan koordinasi dengan pegawai Pusat Data, Statistik dan Informasi yang menjadi pengelola aplikasi www.kinerjakkp.bitrix24.com dalam rangka memantau sehingga dapat memastikan performa Biro HKLN atas IKU ini berjalan sesuai target yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan dalam hal substansi dan detail.
- Pemantauan tetap dilakukan secara berkala dan tidak terputus kepada semua koordinator dan subkoordinator yang notabene adalah ASN Biro HKLN yang wajib mengunggah berita ke www.kinerjakkp.bitrix24.com setiap triwulan;
- Memenuhi setiap dokumen yang dipersyaratkan dengan tepat waktu; dan
- Mengikuti setiap kegiatan pembinaan IKU oleh Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) serta mematuhi manual IKU yang diterbitkan Pusdatin.

IKU 13 Persentase jumlah Rekomendasi hasil pengawasan intern yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Di KKP, unit kerja yang memiliki fungsi dan kewenangan pengawasan intern dan bertanggung jawab kepada pimpinan adalah Inspektorat Jenderal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sama, Inspektorat Jenderal KKP melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan pimpinan instansi pemerintah memastikan bahwa saran dan rekomendasi aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya sudah dipertimbangkan sepenuhnya dan ditindaklanjuti dengan memperbaiki masalah atau kelemahan yang teridentifikasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Biro HKLN berdasarkan LHP (LHP Audit Reviu dan Evaluasi) baik dalam bentuk surat maupun bab yang terbit pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti dan berstatus tuntas oleh Biro HKLN yang menjadi objek pengawasan.

a. Realisasi dan Capaian IKU

Tahun 2022			Tahun 2021			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
70%	83,33%	119,04%	65%	65%	100%	80%	nihil	104,16%

Tabel 31. Realisasi dan Capaian IKU Persentase jumlah Rekomendasi hasil pengawasan intern yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 2022

- b. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan**
- c. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah**
- d. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-Tahun Sebelumnya**

2017		2018		2019		2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	80%	69%	60%	100%	65%	65%

Tabel 32 Target dan Realisasi IKU Persentase jumlah Rekomendasi hasil pengawasan intern yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 2022

- e. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi di Level Unit Kerja/Kementerian/ Nasional/Internasional**
- f. Keberhasilan/Kegagalan pencapaian IKU**
- g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
- h. Upaya/rekomendasi Perbaikan Kinerja**

Sebagaimana tertera dalam tabel di atas, untuk tahun 2022 realisasi dan capaian Biro HKLN untuk IKU Persentase jumlah Rekomendasi hasil pengawasan intern yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri berturut-turut adalah 93,33% dan 120%. Capaian sebesar 120% tersebut adalah hasil dari penghitungan oleh aplikasi kinerjajaku. Realisasi dan capaian untuk IKU yang serupa di tahun sebelumnya (2021) masing-masing adalah sebesar 65% dan 100% dimana besar target di saat itu sebesar 65%. Target akhir dari IKU ini berdasarkan renstra yang berlaku adalah 80% serta IKU ini tidak memiliki standar nasional. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan besar target di tahun 2024 maka capaian IKU menjadi 116,62%. Hal ini memberi rasa optimis bagi Biro HKLN dalam pelaksanaan kinerja IKU ini. Target Biro HKLN pada akhir tahun 2022 untuk IKU ini adalah 70%.

Atas hasil realisasi dan capaian IKU ini di 2022 maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro HKLN dalam pemanfaatan dan perbaikan dengan menggunakan rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP telah dilakukan dengan maksimal dengan mengefektifkan seluruh sumber daya yang dimiliki Biro HKLN terutama sumber daya manusia. Diharapkan agar pada triwulan-triwulan berikutnya di tahun ini, performa prima tersebut secara konsisten selalu ditunjukkan sehingga memperkuat kepercayaan diri sumber daya manusia Biro HKLN dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta kapabilitas agar target akhir tahun 2022 dapat terpenuhi dengan mudah.

Faktor-faktor internal Biro HKLN yang diperkirakan menjadi penyebab keberhasilan pemenuhan target IKU ini selama 2022 adalah sebagai berikut:

- Subkoordinator Tata Usaha Biro HKLN senantiasa memperhatikan dan sigap menindaklanjuti apabila ada notifikasi resmi butir-butir rekomendasi hasil pengawasan intern dari Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN;
- Tim satker Biro HKLN yang memiliki budaya kerja cepat, cermat dan tepat mampu memberi dukungan penuh kepada setiap arahan dari jajaran pimpinan Biro HKLN serta sangat menyadari bahwa setiap pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan intern dari Inspektorat Jenderal pasti berguna dalam perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN;
- Ketersediaan sumber daya Biro HKLN khususnya sumber daya manusia yang menjadi penanggung jawab langsung untuk pelaksanaan IKU ini selain memadai juga efektif dan efisien yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Subkoordinator Tata Usaha dan 4 (empat) orang karena memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tepat dengan ditunjang pengalaman bertahun-tahun.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 2022, beberapa langkah di bawah ini dapat menjadi saran atau masukan bagi pelaksana/penanggung jawab langsung IKU sebagai pedoman dalam memenuhi target IKU ini di I dan akhir tahun 2022 yang masing-masing besarnya 70% tetap terpenuhi:

- a. Apabila terdapat arahan dari pimpinan, pertemuan rutin dapat dilakukan dalam rangka memantau penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal;
- b. Apabila pada triwulan/semester berikutnya di tahun 2022 ada penerbitan Laporan Hasil Pengawasan intern Pertemuan dengan mitra dari Inspektorat Jenderal dalam rangka mengklarifikasi temuan dan menentukan tindak lanjut yang paling cepat dan tepat menyelesaikan rekomendasi serta menyusun jadwal penyelesaian rekomendasi, Biro HKLN harus menanggapi dengan serius dan profesional;
- c. Jika ada arahan dari pimpinan, penanggung jawab tidak boleh tidak mengambil langkah-langkah aksi sekekasnya dalam rangka menyelesaikan setiap butir rekomendasi sesuai dengan jadwal yang sudah disusun dan disepakati;
- d. Sikap koordinatif dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Sekretariat Jenderal dan kebiasaan aktif serta proaktif dalam melakukan pendampingan serta pengawasan melekat terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan sesuai dengan rekomendasi yang sudah ditunjukkan selama, hendaknya tetap dilanjutkan.

IKU 14 Persentase penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Pendahuluan

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia diantaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut, pemerintah memerlukan kas negara guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk anggaran keuangan. Anggaran keuangan dapat diartikan sebagai uang rakyat yang diamanatkan untuk dikelola oleh pemerintah karena sumbernya berasal dari rakyat terutama melalui mekanisme pungutan pajak dengan tujuan utama penggunaannya adalah untuk rakyat.

Dasar hukum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia adalah pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3). Di Indonesia, APBN yang adalah wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prosedur penyusunan APBN adalah sebagai berikut:

- Rancangan APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- Apabila Rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah disetujui oleh DPR maka disahkan menjadi APBN melalui UU. Sementara apabila Rancangan APBN ditolak harus maka pemerintah harus melakukan revisi kemudian diajukan lagi ke DPR atau pemerintah bisa memilih menggunakan APBN tahun sebelumnya.

Menurut Harun (2009) anggaran didefinisikan sebagai perencanaan resmi atas aktivitas atau tindakan yang dinyatakan dalam nilai satuan uang dan menurut Shah (2007) anggaran adalah catatan penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama jangka waktu tertentu, menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah selama periode tersebut dan bagaimana pemerintah membiayai kegiatan tersebut. Sementara itu, USAID (2009) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencanarencana yang dibuat serta berapa banyak dan bagaimana memperoleh pendanaan untuk membiayai rencana tersebut. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Sederhananya, secara teknis penyerapan anggaran adalah membandingkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah direalisasikan.

Pada tahun 2022, besar pagu awal APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN sebesar Rp. 24.115.002.000,-. Pada akhir 2022, setelah dilakukan auto adjustment terhadap pagu awal maka pagu efektif Biro HKLN menjadi sebesar Rp. 17.515.002.000,-. Oleh karena target persentase penyerapan anggaran Biro HKLN di akhir tahun 2022 adalah 95% maka apabila dirupiahkan terhadap pagu efektif maka diharapkan akhir tahun 2022 terserap Rp. 16.639.251.900,-.

a. Realisasi dan Capaian IKU

Tahun 2022			Tahun 2021			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
95%	98,68%	103,87%	-	-	-	-	nihil	-

Tabel 33 Realisasi IKU Persentase penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Biro HKLN Tahun 2022

b. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan

- c. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah
- d. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun-Tahun Sebelumnya

2017		2018		2019		2020		2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	99,69%	-	99,48%	-	99,15%	-	98,90%	-	99,62%

Tabel 34 Realisasi penyerapan anggaran Biro HKLN pada 5 tahun terakhir

- e. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi di Level Unit Kerja/Kementerian/ Nasional/Internasional
- f. Keberhasilan/Kegagalan pencapaian IKU
- g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- h. Upaya/rekomendasi Perbaikan Kinerja

Berdasarkan informasi dari pegawai pengelola keuangan Biro HKLN, realisasi penyerapan anggaran Biro HKLN hingga akhir Juni 2022 adalah sebesar Rp. 9.324.562.260,- dari pagu awal sebesar 24.115.002.000,-. maka persentase penyerapan anggaran Biro HKLN di tahun 2022 adalah sebesar 38,67%, sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. IKU ini bersifat tahunan sehingga pada tahun 2022 tidak ada besaran target. Oleh karena itu, tidak bisa diukur capaian atas IKU ini untuk 2022. IKU ini merupakan indikator kinerja yang baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN dan seluruh unit kerja eselon II lingkup KKP di tahun 2022 meskipun pada tahun-tahun sebelumnya pengukuran penyerapan anggaran secara senantiasa menjadi perhatian jajaran pimpinan KKP. Belum ditemukan standar nasional untuk IKU ini atau besar persentase yang direkomendasikan oleh kementerian terkait. Jika berangkat dari pemikiran filosofis maka besar persentase penyerapan anggaran yang ideal adalah 100%.

Kesimpulan

Realisasi dan capaian IKU ini akan dihitung pada akhir tahun 2022 sehingga di 2022 laporan ini hanya bisa memberikan nilai hasil realisasi namun tidak dengan besar capaian karena tidak ada targetnya di 2022. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan target persentase penyerapan anggaran Biro HKLN di akhir tahun 2022, beberapa langkah di bawah ini tidak salah untuk menjadi perhatian pelaksana teknis penyerapan dan pengelola anggaran di Biro HKLN:

- Jika diperlukan maka perlu untuk dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan secara efektif sehingga mampu menyerap anggaran secara tepat, efisien, dan akuntabel.
- Apabika dipandang penting, maka dapat dilakukan pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan pelelangan secara elektronik.
- Tergantung kepada situasi dan kondisi, optimalisasi pencapaian IKU ini bisa dengan menggunakan metode daring atau virtual untuk kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan memerlukan tatap muka,
- Bilamana terdapat arahan dari pimpinan, optimalisasi atas sisa anggaran yang dialokasikan pada kegiatan-kegiatan prioritas hendaknya dilaksanakan,
- Para pegawai Biro HKLN yang bertugas mengelola anggaran hendaknya turut melakukan pemantauan progres penyelesaian kegiatan apabila tersedia waktu,
- Pegawai Biro HKLN yang berkompeten tidak dilarang untuk melakukan pemantuan posisi kas keuangan Biro HKLN dengan disiplin dan berkala dengan frekuensi lebih rapat seperti harian, dan
- Dapat diwacanakan untuk adanya suatu sistem *reward* dan *punishment* di Biro HKLN.

	Pagu Awal (PA)	Automatic Adjustment	Pagu Efektif (PE)	Realisasi	% Realisasi/ PA	% Realisasi/ PE	Sisa dari PA	Sisa dari PE
RO Kerja Sama	6.000.000.000	1.100.000.000	4.900.000.000	1.851.299.810	30,85%	37,78%	4.148.700.190	3.048.700.190
RO Hubungan Masyarakat	15.720.831.000	4.468.345.000	11.252.486.000	6.962.103.611	44,29%	61,87%	8.758.727.389	4.290.382.389
Komponen Tata Usaha	2.394.171.000	1.031.655.000	1.362.516.000	511.158.839	21,35%	37,52%	1.883.012.161	851.357.161
	24.115.002.000	6.600.000.000	17.515.002.000	9.324.562.260	38,67%	53,24%	14.790.439.740	8.190.439.740

Tabel 35 Realisasi Anggaran Biro HKLN Tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Biro HKLN tahun 2022 menyajikan realisasi dan capaian kinerja Biro HKLN dalam mencapai sasaran kegiatan Biro HKLN yaitu:

- a. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP;
- b. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- c. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Tidak berbeda jauh tahun sebelumnya, secara umum pada tahun 2022 Biro HKLN memenuhi semua target IKU. Berdasarkan hasil penghitungan aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id), skor kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro HKLN tahun 2022 adalah 108,04 yang artinya naik jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 105,62. Pencapaian ini perlu ditingkatkan lagi di tahun 2023 dengan menjaga komitmen, kerja sama, koordinasi, ditunjang dengan rasa butuh untuk berprestasi dan partisipasi aktif seluruh jajaran Biro HKLN dari tingkat pimpinan sampai dengan yang terendah beserta *stakeholder* Biro HKLN.

Kesimpulan

1. Realisasi dan capaian seluruh IKU tanggung jawab Biro HKLN tahun 2022 adalah sebagai berikut (dilengkapi kode IKU berdasarkan aplikasi kinerjaku):
 - a. IKS.01, Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama, realisasinya sebesar 100%. Dengan target sebesar 90% maka capaiannya berdasarkan aplikasi kinerjaku menjadi 111,11%;
 - b. IKS.02, Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Pada tahun 2022 realisasi IKU ini sebesar 100% dan capaiannya juga sebesar 100% oleh karena targetnya sebesar 100%;
 - c. IKS.02.3, Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Realisasi untuk IKU ini di tahun 2022 adalah sebesar 96,54 dan target yang ditetapkan oleh unit kerja pembina IKU adalah 92. Dengan demikian Biro HKLN memperoleh pencapaian sebesar 104,93% karena realisasi melampaui target;
 - d. IKS.03, Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, memperoleh realisasi sebesar 3,89. Target untuk IKU ini pada tahun 2022 adalah sebesar 3,65. Oleh karena itu besar capaian yang diperoleh untuk IKU ini adalah 106,58%;
 - e. IKS.04, Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan. Pada tahun 2022 ditetapkan target untuk IKU ini sebesar 3,80. Hasil realisasi IKU ditetapkan sebesar 3,91. Oleh karena itu besar capaian IKU menjadi 102,89%;
 - f. IKS.06, Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Target dan Realisasi IKU ini di tahun 2022 masing-masing adalah nilai sebesar 90 dan 91,55. Berdasarkan hasil target dan realisasi tersebut, diperoleh capaian IKU sebesar 101,72%;
 - g. IKS.07, Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan, realisasinya sebesar 99,26%. Target IKU ini adalah >87% maka capaiannya menjadi 114,09%;
 - h. IKS.08, Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Target IKU di tahun 2022 adalah 100% dan di akhir tahun Biro HKLN memperoleh realisasi IKU sebesar 100%. Oleh karena itu, capaiannya menjadi 100%;

- i. IKS.09, Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Target IKU ini di tahun 2022 sebesar 78 dan realisasi yang diperoleh di awal tahun 2023 adalah 79,29 sehingga capaiannya menjadi 101,65%;
 - j. IKS.02.6, Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui lembaga stakeholder lainnya, realisasinya sebesar 100%. Target IKU ini adalah 80% maka capaiannya berdasarkan aplikasi kinerjaku menjadi 120%;
 - k. IKS.02.7, Persentase pemanfaatan koleksi Perpustakaan KKP oleh anggota Perpustakaan KKP, realisasi IKU sebesar 15,84%, yang kembali berhasil memenuhi target yaitu 8%. Oleh karena itu capaian IKU ini berdasarkan aplikasi kinerjaku sebesar 120%;
 - l. IKS.10, Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, realisasinya sebesar 100%. Dengan target IKU sebesar 88% maka capaian IKU menjadi 113,64%;
 - m. IKS.11, Persentase jumlah Rekomendasi hasil pengawasan intern yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dengan realisasinya sebesar 83,33%. Target IKU ini untuk dipenuhi adalah 70% sehingga capaiannya menjadi sebesar 119,04% berdasarkan aplikasi kinerjaku; dan
 - n. IKS.12, Persentase penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, target IKU di tahun 2022 adalah 95% dan realisasinya adalah 98,68%. Berdasarkan data target dan realisasi maka diperoleh besar capaian sebesar 103,87%.
2. Pada tahun 2022 Biro HKLN mencatat pencapaian ke-14 IKU memperoleh 'warna hijau' dalam aplikasi kinerjaku.kkp.go.id yang artinya semua target IKU Biro HKLN tahun 2022 bisa terpenuhi atau terlampaui. Hal ini berarti terjadi peningkatan kinerja Biro HKLN dibandingkan dengan tahun 2021 dimana pada saat itu dari 10 IKU yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN terdapat 1 IKU yang gagal memenuhi target sehingga mendapatkan 'warna kuning' pada IKU tersebut.
 3. Guna memenuhi seluruh target IKU Biro HKLN hingga akhir tahun 2022, Biro HKLN telah mendayagunakan anggaran melalui penyerapan sebesar Rp. 22.589.918.811,- dari pagu efektif sejumlah Rp. 26.844.254.000,-. Dengan demikian, pada tahun 2022 telah dilakukan penyerapan efektif sebesar 98,68% dari APBN KKP yang dialokasikan untuk membiayai kinerja Biro HKLN.

Saran

Memperhatikan hasil dan analisis atas capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam bab-bab di atas dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Biro HKLN di tahun anggaran berikutnya maka beberapa hal di bawah ini dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja:

1. Biro HKLN seyogyanya terus memegang teguh dan melanjutkan etos kinerja prima yang sudah ditunjukkan sepanjang 2022 karena seluruh capaiannya IKU lebih dari 100%. Beberapa etos kerja dan kinerja sebagai hasil dari implementasi nilai budaya kerja Biro HKLN arahan pimpinan tersebut diantaranya adalah disiplin, kerja sama, sinergi, kebersamaan, gotong royong, sikap proaktif, menjunjung tinggi integritas, responsif, bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan prima untuk masyarakat (secara tidak langsung);
2. Memelihara koordinasi yang baik di lingkup internal Biro HKLN dan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu para mitra kerja sama Biro HKLN guna menjamin keberhasilan pencapaian target IKU; dan
3. Terkait dengan penyerapan anggaran, perlu senantiasa diingat agar sinkronisasi waktu pelaksanaan penyerapan anggaran dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kepastian atas efisiensi penganggaran kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Perjanjian Kinerja Kepala Biro HKLN dan Sekjen KKP, Februari 2022



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agung Tri Prasetyo**

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Februari 2022

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Agung Tri Prasetyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1	Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (persen)	90
		2	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	3	Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	3,65
		4	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan (nilai)	3,8
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	92
		6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	90
		7	Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	>87
		8	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui lembaga stakeholder lainnya (persen)	80
		9	Persentase pemanfaatan koleksi Perpustakaan KKP oleh anggota Perpustakaan KKP (persen)	10
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	10	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
		11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Indeks)	78
		12	Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	88
		13	Persentase jumlah Rekomendasi hasil pengawasan intern yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	70
		14	Persentase penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	95

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	6.000.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	18.115.002.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri		24.115.002.000

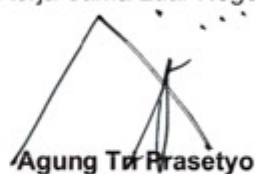
Jakarta, 14 Februari 2022

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal



Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



Agung Tri Prasetyo



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ari Prabowo**

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2022

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Ari Prabowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1	Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (persen)	90
		2	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	3	Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	3,65
		4	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan (nilai)	3,8
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	92
		6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	90
		7	Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	>87
		8	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan KKP melalui lembaga stakeholder lainnya (persen)	80
		9	Persentase pemanfaatan koleksi Perpustakaan KKP oleh anggota Perpustakaan KKP (persen)	10
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	10	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
		11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Indeks)	78
		12	Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	88
		13	Persentase jumlah Rekomendasi hasil pengawasan intern yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	70
		14	Persentase penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	95

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	6.000.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	18.115.002.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri		24.115.002.000

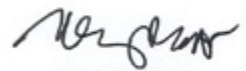
Jakarta, Juni 2022

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Antam Novambar

Pihak Pertama

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri


Ari Prabowo

Lampiran 3. Daftar Realisasi Kerja Sama Luar Negeri Biro HKLN Tahun 2022

No	Substansi	Jadwal Indikatif	Realisasi	Mitra	Bulan Realisasi	Keterangan
1	KS Amerop	Maret	Tersampainya concept note usulan program kerja sama dari KKP ke dalam Bilateral Maritime Dialogue melalui preliminary meeting for the 1st BMD Indonesia-France	Perancis	Maret	Sesuai jadwal
2		Maret	Tersusunnya draft MRA antara KKP dan Rosselkhoznadzor dan counterdraft MoU antara KKP dan Federal Agency for Fishery Rusia	Rusia	Maret	Sesuai jadwal
3		Maret	Selesaiannya proses perpanjangan naskah Grant Agreement (GA) antara KKP dan DHSC Inggris	Inggris	Maret	Sesuai jadwal
4		Maret	Tersusun dan tersampainya counterdraft MoU antara KKP dan Meksiko	Meksiko	Maret	Sesuai jadwal
5		Maret	Terlaksananya kegiatan Workshop Training of Trainer on disease control and diagnostic method dibawah kerangka SMADI Project	UiT the Arctic Univ. of Norway	Maret	Sesuai jadwal
6		Mei	Disepakatinya kerja sama ocean for development antara KKP dan Norwegia melalui penandatanganan Technical Cooperation Agreement on Ocean for Development Programme KKP-NORAD	Norwegia	Mei	Sesuai jadwal
7		Juni	Terlaksananya kegiatan Diskusi Penguatan Kerja Sama Kelautan dan Perikanan KKP dan Belanda	Belanda	Juni	Sesuai jadwal
8		Juli	Tersusunnya counterdraft KKP MoU on Fisheries and Aquaculture Cooperation RI-Turki	Turki	Oktober	Lebih lambat
9		Juli	Disampaikannya Indonesia Preliminary Information Sheet - Section 609 Program dalam rangka pengajuan Sertifikasi Udang Tangkapan Indonesia di Amerika Serikat (Ruang lingkup: MoU Maritim Republik Indonesia – Amerika Serikat)	AS	Juli	Sesuai jadwal
10		Agustus	Brief Note - Pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Duta Besar Denmark untuk RI, H.E. Lars Bo Larsen	Denmark	November	Lebih lambat
11		Agustus	Disepakatinya usulan pembaruan naskah Mou on Fisheries and Aquaculture Cooperation kedua negara pada Pertemuan Sidang Komisi Ekonomi Bersama (SKEB) VI RI-Hungaria	Hongaria	Oktober	Lebih lambat
12		Agustus	Terlaksananya Kunjungan Tenaga Ahli Oceanic Institute of Hawaii Pacific ke Indonesia (Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar dan Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, Aceh)	Oceanik IPH	Agustus	Sesuai jadwal
13		September	Permohonan masukan dan tanggapan mengenai update proposal kegiatan Cooperation and Capacity Building (CCN) I-EFTA CEPA	EFTA	November	Lebih lambat
14		Oktober	Penyampaian permintaan tanggapan dan masukan atas rencana pembaruan MoU Kerja Sama Perikanan dan Budidaya RI-Chile serta Draft Plan of Action Tahun 2023-2024	Chile	Oktober	Sesuai jadwal
15		Oktober	Terlaksananya Pertemuan Kolaborasi Proyek USAID Bersama Kelola Perikanan (USAID Ber-IKAN)	USAID	Oktober	Sesuai jadwal
16		Oktober	Koordinasi proyek Eco Fishing Port dengan AFD Perancis	AFD	November	Lebih lambat
17		November	Tersusunnya masukan KKP pada kertas posisi Delri pada Pertemuan ke-4 High Level Dialogue on Fisheries and Maritime Issues RI-UE	Uni Eropa	Oktober	Sesuai jadwal
18		November	Tersusunnya rencana tindak lanjut kerja sama penelitian dan konservasi terumbu karang KKP dan Center Scientifique de Monaco (CSM)	Monako	November	Sesuai jadwal
19	KS Aspas	Januari	Penyampaian Masukan KKP atas Usulan Rencana Pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Australian Assistant Minister for Forestry and Fisheries	Australia	Januari	Sesuai jadwal
20		Februari	Menghadiri Penandatanganan Implementing Arrangement	Korea	Januari	Lebih awal
21		April	Laporan Courtesy Call Menteri Dalam Negeri Malaysia kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI	Malaysia	Januari	Lebih awal
22		Maret	Laporan Menghadiri Pertemuan Joint Working Group on Sustainable Development of Marine Resources and Fisheries RI-India	India	Maret	Sesuai jadwal

23		Maret	Courtesy Call Minister Usui Kedubes Jepang kepada Sekretaris Jenderal	Jepang	Februari	Lebih awal
24		Maret	Penyampaian Surat Permasalahan Larangan Ekspor Ikan Arwana (Scleropages formosus) Indonesia ke Tiongkok	RRT	Februari	Lebih awal
25		Oktober	Penyampaian Laporan Rapat Persiapan 1st Technical Working Group (TWG1) Indonesia – Fiji Preferential Trade Agreement (IF-PTA)	Fiji	April	Lebih awal
26		September	Penyampaian Surat Lembaga Kelautan dan Perikanan Terhadap Kurangnya Perhatian Pemerintah Indonesia Terhadap Para Nelayan Papua Yang Ditangkap Dan Ditahan Oleh Tentara Papua Nugini di Port Moresby	P. Nugini	Oktober	Lebih lambat
27		November	Penyampaian Couterdrat MoU kerja sama KP RI-Vietnam	Vietnam	Mei	Lebih awal
28	KS Aftimteng	Januari	Penyampaian Masukan atas Permohonan Pembuatan Perjanjian Pengakuan Timbal Balik Sertifikasi Pelaut dari Kerajaan Arab Saudi	Arab Saudi	Januari	
29		Februari	Rapat Evaluasi Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Persatuan Emirat Arab (PEA)	PEA	Februari	
30		April	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Maroko	Maroko	Mei	Lebih lambat
31		Mei	Akselerasi Penyampaian Tanggapan atas Draft Plan of Action Implementasi MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Mozambik	Mozambi k	April	Lebih awal
32	KS Regional	Februari	Guidelines on Sharing, Access to and Use of IUU Fishing Related Information - Indonesia Inputs	Regional	Februari	Sesuai jadwal
33		Februari	Kerpos the 2nd AN IUU Meeting /Indonesia's Position The 2nd Virtual Workshop on the Guidelines on Sharing, Access to, and Use of IUU Fishing-Related Information for the AN-IUU Interactive Program	Regional	Februari	Sesuai jadwal
34		Juni	Penyampaian proposal Indonesia kepada BKCF (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Republic of Korea (ROK) Cooperation Fund)	BKCF (BIMP EAGA)	Juni	Sesuai jadwal
35		April	Kertas Posisi BIMP-EAGA Agribusiness Cluster Strategic Planning Meeting/ Fisheries Working Group Report /Chair's Note	BIMP EAGA	April	Sesuai jadwal
36		April	Kertas Posisi IMT-GT Strategic Planning Meeting Working Group on Agriculture and Agro-based Industry	IMT GT	April	Sesuai jadwal
37		April	Kertas Posisi SEAFDEC Council Meeting ke-54	SEAFDEC	April	Sesuai jadwal
38		Juni	Kertas Posisi Pertemuan ASEAN Shrimp Alliance (ASA) ke 12	ASEAN	Juni	Sesuai jadwal
39		Juni	Kertas Posisi Pertemuan the ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ke 14	ASEAN	Juni	Sesuai jadwal
40		Juni	Kerta Posisi Pertemuan ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGF) ke 30	ASEAN	Juni	Sesuai jadwal
41		Agustus	Kertas Posisi pada Pertemuan the29th Joint Committee on Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme (Agustus)	Regional	Agustus	Sesuai jadwal
42		Agustus	Kertas Posisi pertemuan BIMP EAGA Agribusiness Cluster and Fisheries Working Group (Oktober)	BIMP EAGA	Oktober	Lebih lambat
43	KS PBB	Februari	Kertas Posisi Delegasi RI pada Sidang HTW-8	PBB	Februari	Sesuai jadwal
44		Februari	Kertas Posisi Delegasi RI pada 4th Meeting of the Working Group on the Proposal of the Establishment of the SCFM	PBB	Februari	Sesuai jadwal
45		Februari	Kertas Posisi Delegasi RI pada Second Meeting Ad Hoc Working Group on the Future of APFIC	APFIC	Februari	Sesuai jadwal
46		Februari	Kertas Posisi Delegasi RI pada 5th Session of the United Nations Environmental Assembly	PBB	Februari	Sesuai jadwal
47		Maret	Kertas Posisi Indonesia pada 24th Sherpa Meeting HLP SOE	SHERPA	Maret	Sesuai jadwal
48		Maret	Kertas Posisi Delegasi RI pada 36th Session of the FAO Asia Pacific Regional Conference	FAO	Maret	Sesuai jadwal
49		April	Kertas Posisi Delegasi RI pada 11th Session of the Sub-committee on Aquaculture	PBB	Mei	Mundur
50		Juni	Kertas Posisi Delegasi RI pada 18th Session of the Committee on Fisheries: Sub-Committee of Fish Trade	PBB	Juni	Sesuai jadwal

51		Juni	Kertas Posisi Delegasi RI pada 6th Meeting of the WG on the Proposal of the Establishment of the SCFM (WG 6)	PBB	Juni	Sesuai jadwal
52		Juli	Kertas Posisi Delegasi RI pada The 2nd UN Ocean Conference	PBB	Juni	Lebih awal
53		September	Kertas Posisi Delegasi RI pada Pertemuan Technical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment,	PBB	Mei	Lebih awal
54	KS Intrakawasan	Februari	Pedoman Delegasi RI untuk Pertemuan APEC Ocean and Fisheries Working Group (OFWG) ke-18	APEC	Februari	Sesuai jadwal
55		Februari	Update Komitmen Indonesia di website Dashboard Komitmen OOC, https://oceanconference.org/commitments	OOC	Maret	Mundur
56		April	Masukan Indonesia bersama dengan Proponents (Argentina, Australia, New Zealand, Amerika Serikat, Uruguay) diterima untuk menambahkan klausul take special care and exercise due restraint untuk subsidi perikanan pada pilar OFOC), Agreement on Fisheries Subsidies. Tautan tersedia: www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc12_e/mc12_e.htm#outcomes	WTO	Juni	Mundur
57		Agustus	Pedoman Delegasi RI untuk Pertemuan APEC Ocean and Fisheries Working Group (OFWG) ke-19	APEC	Agustus	Sesuai jadwal
58		Agustus	Laporan Pertemuan 3rd Environment Deputies Meeting-Climate Sustainability Working Group (EDM- CSWG), Joint Environment and Climate Ministerial Meeting (JECMM)	Intrakawasan	Agustus	Sesuai jadwal
59		September	Pedoman Deliri Rangkaian Pertemuan Ketahanan Pangan APEC 2022	APEC	Agustus	Lebih awal
60		Oktober	Penyampaian APEC Concept Note: Workshop on Promoting Bioplastic Materials to Reduce Marine Plastic Litter in the Asia Pacific Region	Intrakawasan	Oktober	Sesuai jadwal
61		November	Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada The 17th Senior Officials' Meeting (SOM-17) of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) via ZOOM online platform	Intrakawasan	November	Sesuai jadwal
62		November	Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada Pertemuan 4th RSC Meeting of the GEF/UNDP/PEMSEA ATSEA-2 Project	Intrakawasan	November	Sesuai jadwal
63		November	Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada 2nd Meeting of IORA Core Group on Fisheries Management (CGFM)	Intrakawasan	November	Sesuai jadwal
64		Desember	Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada Ministers or Head of Delegations Indonesia pada 8th MINISTERIAL MEETING (MM-8), forum CTI	Intrakawasan	November	Lebih awal

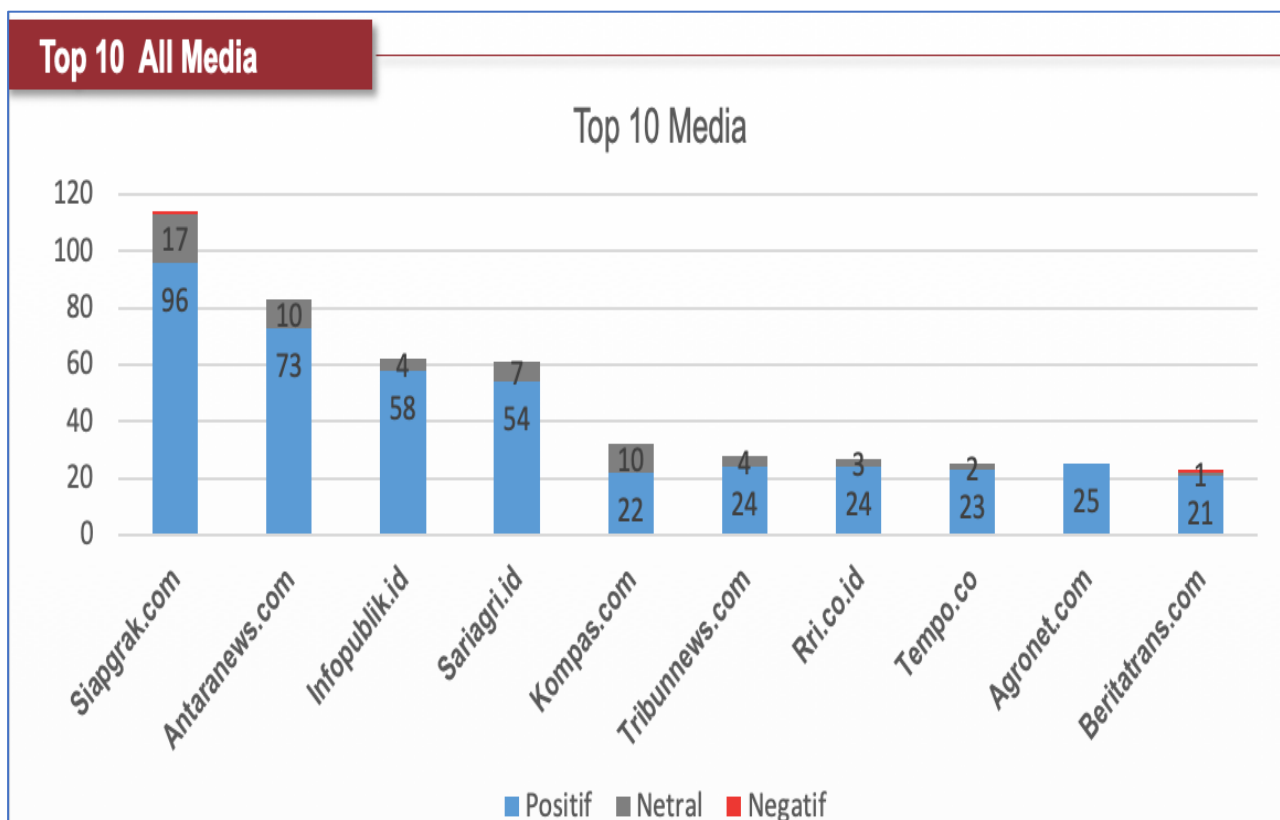
Lampiran 4. Daftar Status Tindak Lanjut dan Implementasi Kerja Sama Luar Negeri Biro HKLN 2022

No	Subbagian	Kerja Sama Aktif		Status Kerja Sama s.d. Tw IV 2022
1	Kerja Sama Amerika Eropa	1	KKP-AS (GIA USAID)	Sudah ada tindak lanjut
		2	KKP-Oceanic Institute of Hawai'i Pacific University (LoI)	Sudah ada tindak lanjut
		3	KKP-Belanda (MoM SWGMAF)	Sudah ada tindak lanjut
		4	KKP-Inggris (GA DHSC)	Sudah ada tindak lanjut
		5	KKP-Rusia (MoM WGMAF)	Sudah ada tindak lanjut
		6	KKP-Uni Eropa	Sudah ada tindak lanjut
		7	KKP-Hongaria (MoU)	Sudah ada tindak lanjut
		8	KKP-Chile (MoU)	Sudah ada tindak lanjut
		9	KKP-Norwegia (LoI)	Sudah ada tindak lanjut
		10	KKP-Prancis (LoI)	Sudah ada tindak lanjut
		11	KKP-Monako (LoI)	Sudah ada tindak lanjut
		12	KKP-Meksiko	Sudah ada tindak lanjut
		13	KKP-UiT the Arctic University of Norway	Sudah ada tindak lanjut
		14	KKP-Turki	Sudah ada tindak lanjut
		15	KKP-Denmark	Sudah ada tindak lanjut
		16	KKP- ECCB CEPA RI-EFTA	Sudah ada tindak lanjut
		17	KKP-AFD LoI Eco Fishing Port	Sudah ada tindak lanjut
		18	RI-AS	Sudah ada tindak lanjut
2	Kerja Sama Asia Pasifik	1	Kerja sama bilateral RI-Australia	Sudah ada tindak lanjut
		2	Kerja sama bilateral RI-Fiji	Sudah ada tindak lanjut
		3	Kerja sama bilateral RI-India	Sudah ada tindak lanjut
		4	Kerja sama bilateral RI-Jepang	Sudah ada tindak lanjut
		5	Kerja sama bilateral RI-Korea Selatan	Sudah ada tindak lanjut
		6	Kerja sama bilateral RI-Papua Nugini	Sudah ada tindak lanjut
		7	Kerja sama bilateral RI-Republik Rakyat Tiongkok	Sudah ada tindak lanjut
		8	Kerja sama bilateral RI-Malaysia	Sudah ada tindak lanjut
		9	Kerja sama bilateral RI-Viet Nam	Sudah ada tindak lanjut
3	Kerja Sama Afrika Timur Tengah	1	Kerja sama bilateral RI-Arab Saudi	Sudah ada tindak lanjut
		2	Kerja sama bilateral RI-Maroko	Sudah ada tindak lanjut
		3	Kerja sama bilateral RI-Persatuan Emirat Arab (PEA)	Sudah ada tindak lanjut
		4	Kerja sama bilateral RI-Mozambik	Sudah ada tindak lanjut
4	Kerja Sama Regional	11	Keanggotaan RI dalam ASEAN, SEAFDEC, RFMO, NACA, BIMP-EAGA, IMT-GT, RPOA-IUU dan RCEP	11 implementasi dari 11 yang direncanakan
5	Kerja Sama PBB	11	Keanggotaan RI dalam PBB dan organisasi di terkait lainnya yaitu FAO, IMO, CTI dan UFCCC	11 implementasi dari 11 yang direncanakan
6	Kerja Sama Intrakawasan	11	Keanggotaan RI dalam APEC, CTI dan organisasi terkait.	11 implementasi dari 11 yang direncanakan

Lampiran 5. Daftar Topik Utama Berita Tentang Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

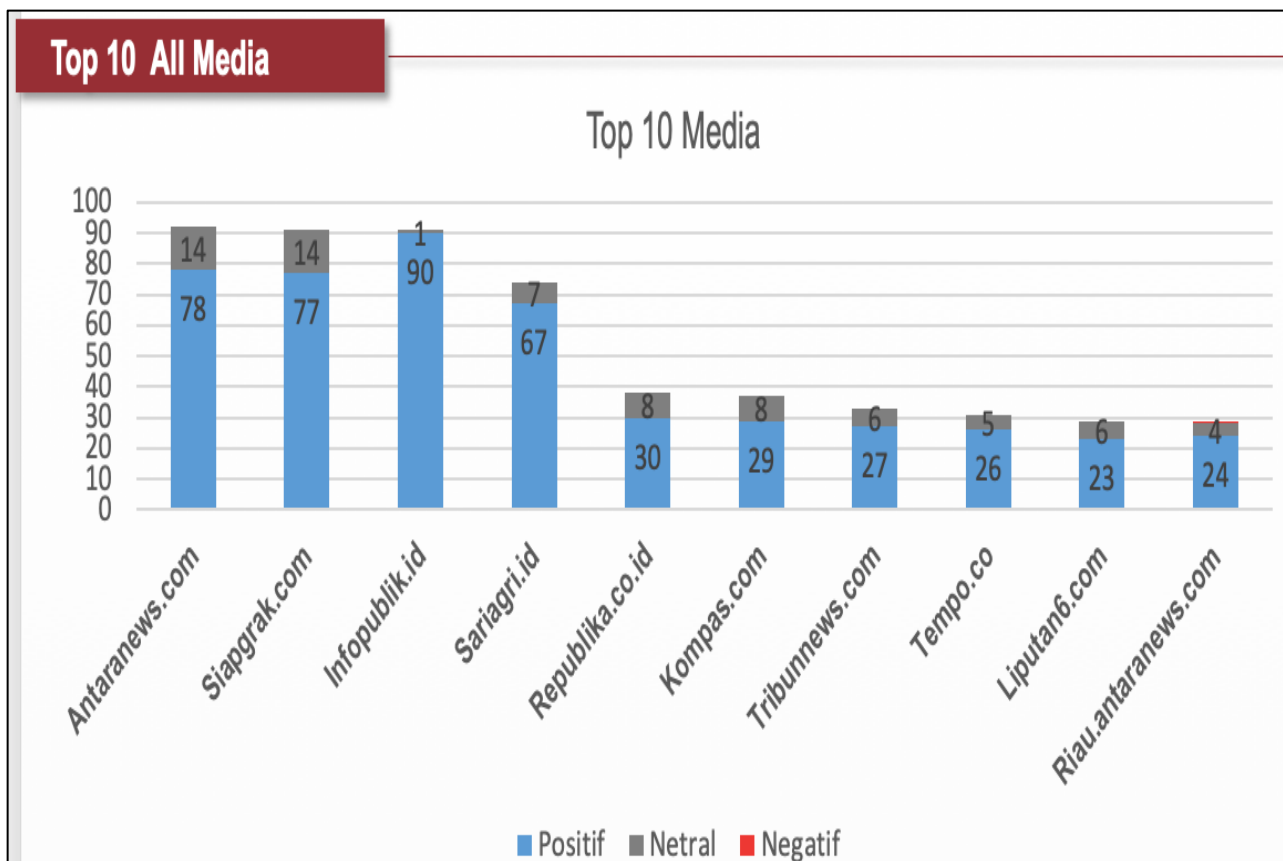
Januari

1. KKP: Ekspor Produk Perikanan Mencapai 5,72 Miliar Dolar AS pada 2021 (132 berita)
2. KKP Tancap Gas Akselerasikan Dua Program Terobosan Perikanan Budidaya 2022 (115 berita)
3. KKP Tangkap Kapal Pencuri Ikan Berbendera Malaysia (65 berita)
4. Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan (56 berita)
5. Aturan Baru, KKP Akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia (50 berita)
6. Viral Lumba-lumba Terjaring Nelayan, KKP Ingatkan Larangan Eksploitasi Mamalia Laut (47 berita)
7. Holding BUMN Pangan Resmi Terbentuk (46 berita)
8. Gagal Panen Akibat Banjir, Kerugian Nelayan Keramba di Aceh Diperkirakan Capai Ratusan Juta Rupiah (45 berita)
9. KPK Kantongi Informasi Dugaan Reklamasi Tanpa Izin di Danau Singkarak (44 berita)
10. KKP luncurkan aplikasi pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan (42 berita)



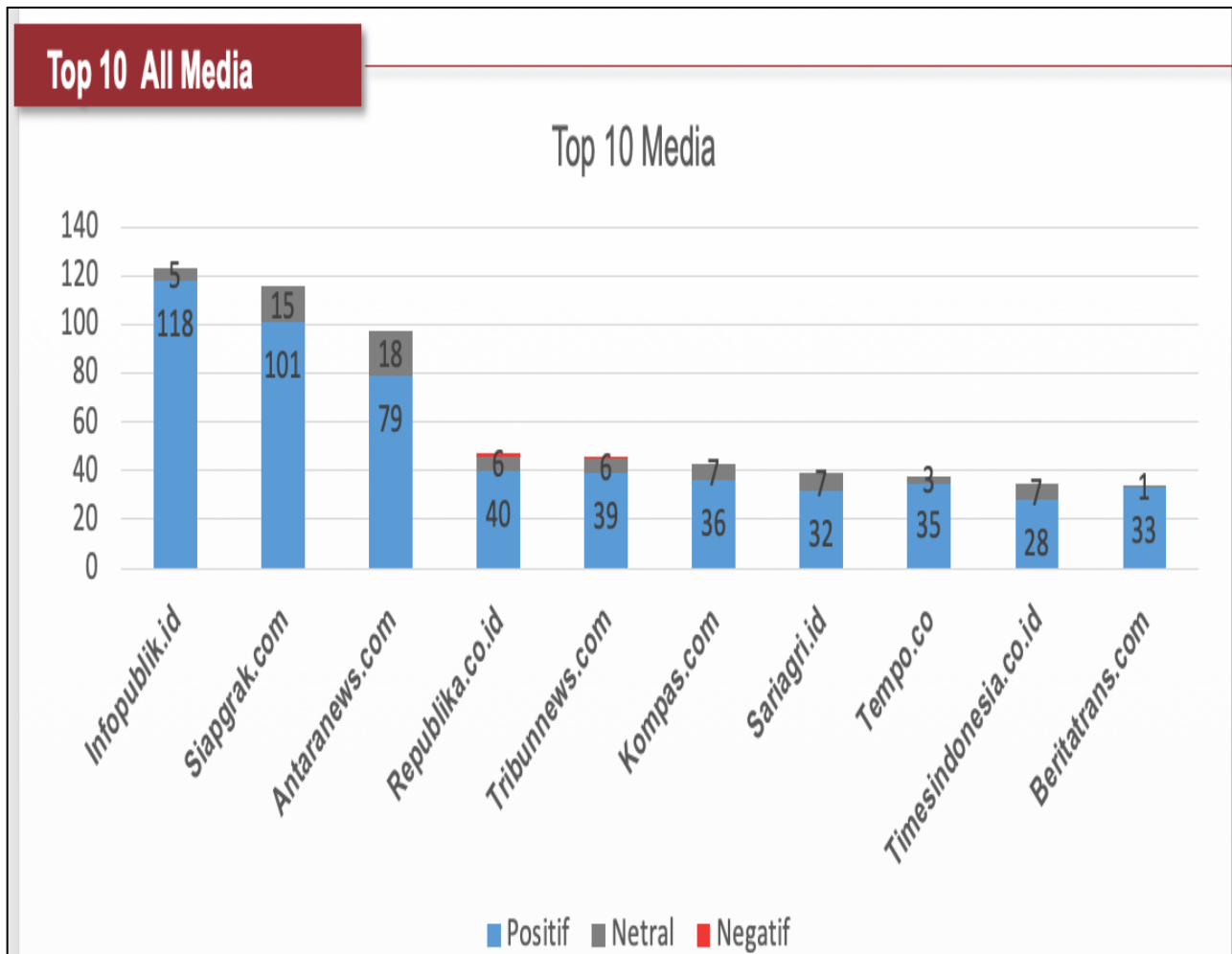
Februari

1. KKP Stop Operasi Kapal Penambang Pasir Timah di Perairan Bangka (177 berita)
2. MoU dengan KKP, PBNU Mulai Program Binaan Kampung Nelayan di Labuan Bajo (140 berita)
3. KKP Buka Akses Pasar Ekspor Baru dengan Tarif Ekspor Nol Persen (116 berita)
4. Bappenas dorong transformasi ekonomi perikanan budidaya nasional (94 berita)
5. KKP rencana bangun command centre di Maluku antisipasi illegal fishing (87 berita)
6. KKP Minta Masukan Pelaku Usaha soal Regulasi Penangkapan Ikan Terukur (79 berita)
7. Kejar Target 2 Juta Ton, KKP Pacu Tambak Udang Terintegrasi (62 berita)
8. Kapal Menumpuk di Pelabuhan Tegal, Ganjar Langsung Telepon Menteri KKP (46 berita)
9. KKP Tawarkan Peluang Investasi Perikanan, Nilai Ekonomi Capai Rp 180 T (43 berita)
10. Kurangi Sampah Laut hingga 70 Persen, Kementerian KP Gagas Program Bulan Cinta Laut (42 berita)



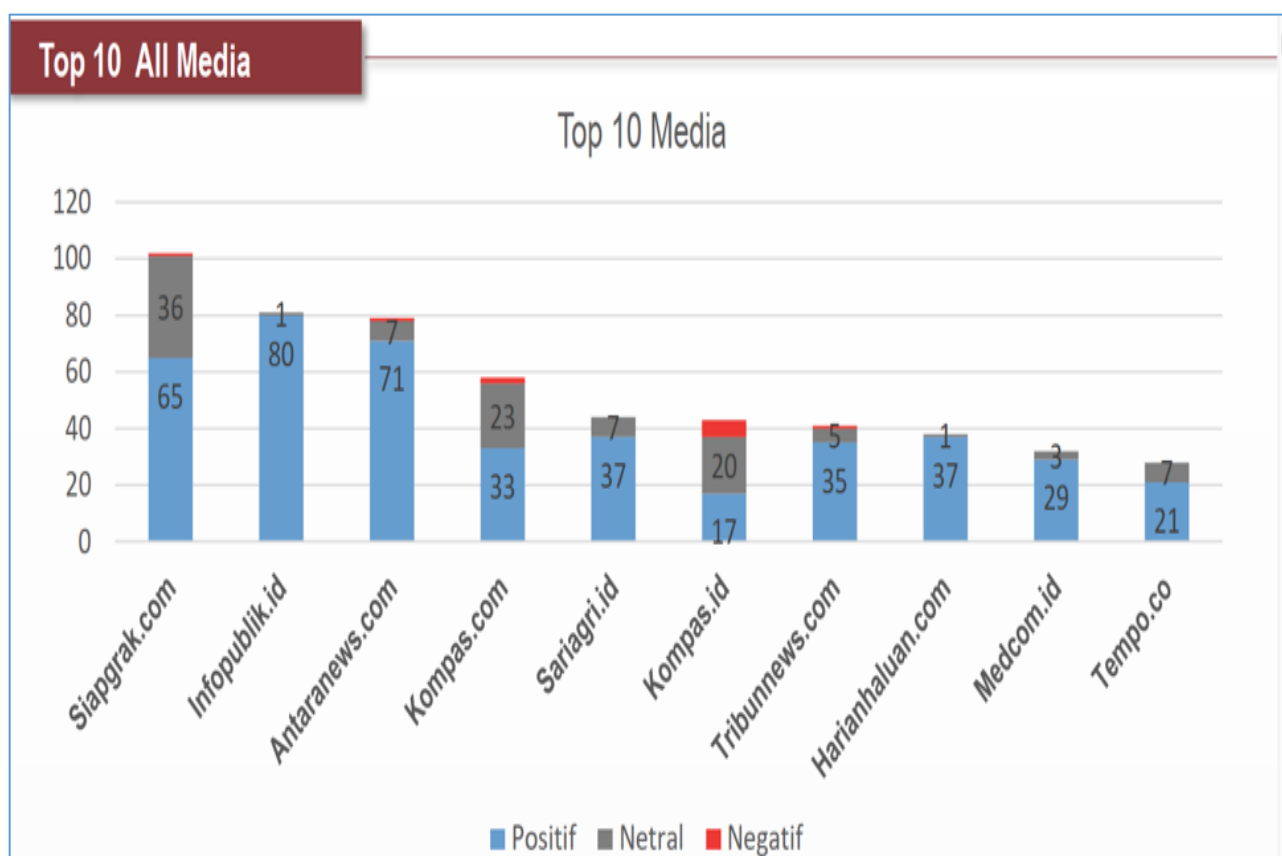
Maret

1. KKP Tampung Aspirasi Masyarakat Maluku Terkait Lumbung Ikan Nasional (169 berita)
2. KKP Bangun Tambak Udang Terpadu Rp 2,25 Triliun (155 berita)
3. KKP Canangkan Kampung Perikanan Budidaya Nila di Lombok (143 berita)
4. Menko Airlangga Salurkan Bantuan Tunai Pertama di 2022 kepada Nelayan (124 berita)
5. Strategi KKP Persempit Celah Penolakan Ekspor dengan Penekanan Standar Mutu Produk (81 berita)
6. KKP Ingatkan Soal Izin Pemanfaatan Ruang Laut ke Agung Sedayu Group (74 berita)
7. Menteri KKP ajak Pemda kampanyekan kebersihan laut (72 berita)
8. Bea Cukai Palembang gagalkan penyelundupan 183. 700 ekor benih lobster (69 berita)
9. KKP Tangkap 22 Kapal Ikan Ilegal di 6 Wilayah Perairan (54 berita)
10. KKP siapkan strategi kawal penangkapan ikan terukur (49 berita)



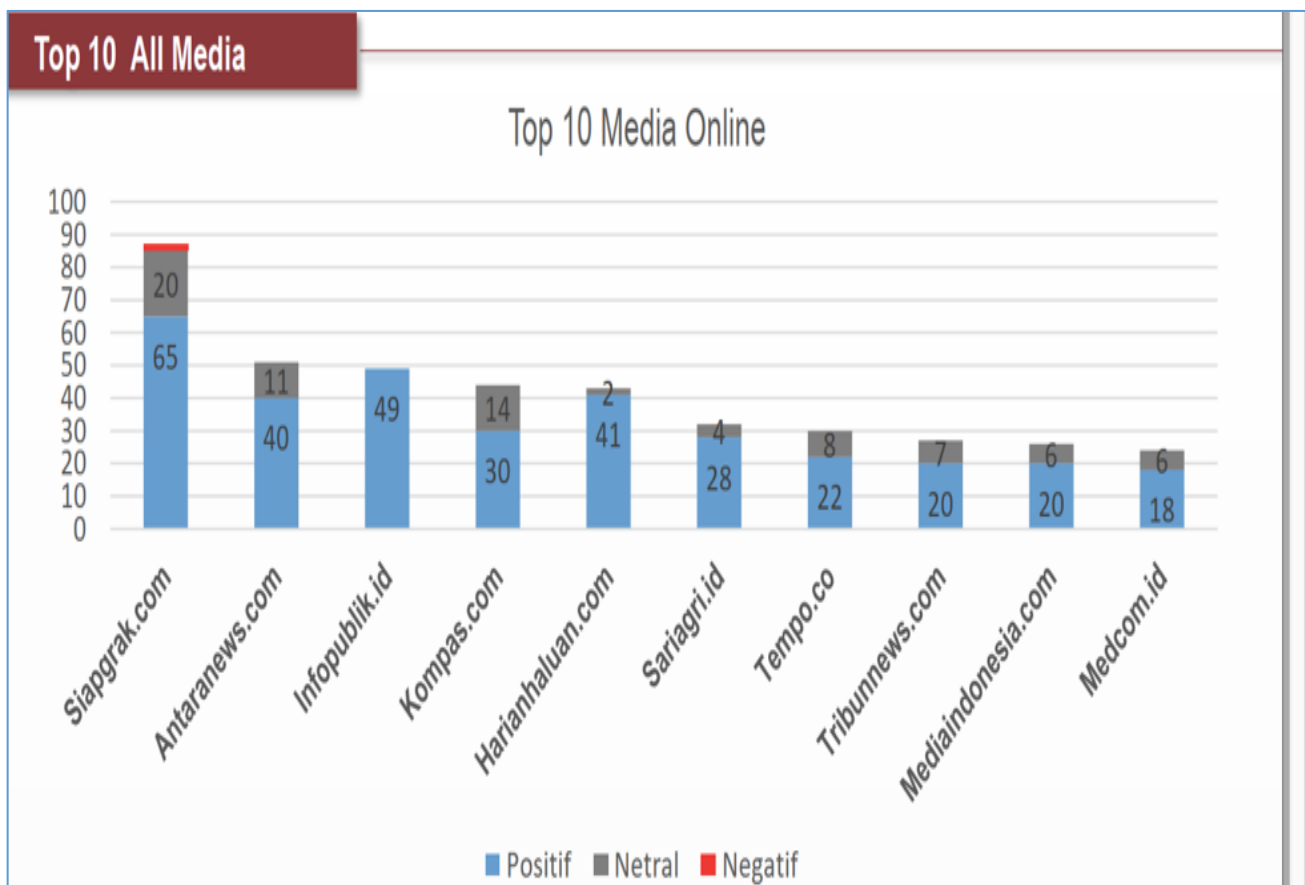
April

1. Pemerintah resmi naikan tarif PPN jadi 11 persen (200 berita)
2. KKP: produksi perikanan tangkap-budidaya kembali menggeliat (173 berita)
3. Beri Bantuan Tunai, Airlangga Peduli Nelayan (118 berita)
4. KKP Lepas Ekspor Kerapu Hidup ke Hongkong (103 berita)
5. Presiden Serap Tiga Aspirasi Nelayan di Gresik (89 berita)
6. Jelang lebaran, KKP Sidak Kualitas dan Mutu Ikan di Pasar Tradisional (69 berita)
7. Hari Nelayan Nasional 2022 (66 berita)
8. KKP Jadikan Kampung Budidaya Rumput Laut Sidoarjo Percontohan (65 berita)
9. Prabowo Sowan ke Kediaman Habib Luthfi di Jawa Tengah (56 berita)
10. KKP respons kelangkaan BBM solar bagi nelayan (45 berita)



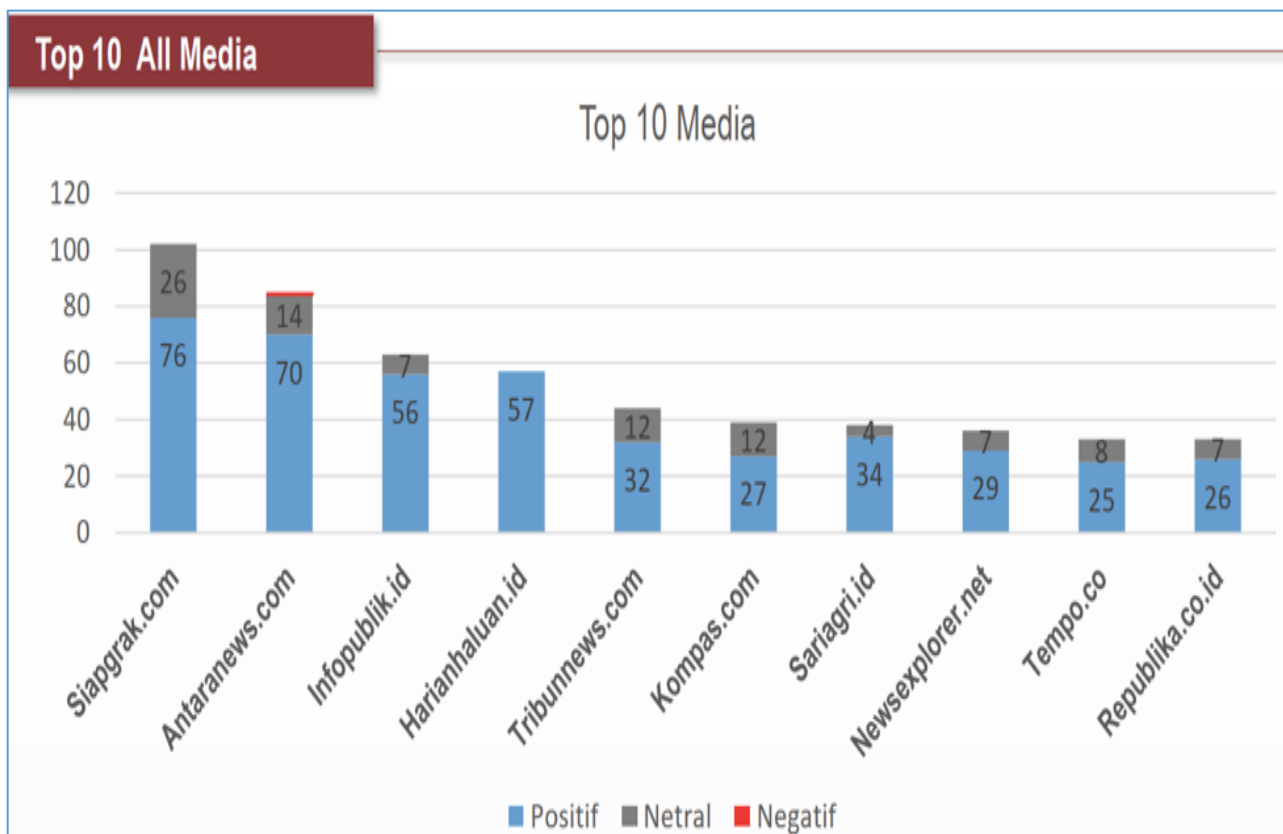
Mei

1. KKP dan TNI AL Gagal Penyelesaian Benih Bening Lobster Senilai Rp 46 Miliar (136 berita)
2. Moeldoko Minta Legalisasi Tanah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepri Disegerakan (120 berita)
3. KKP Lepas Ekspor 5 Ton Kepiting Bakau ke Tiongkok (86 berita)
4. KKP Rancang Permen Rehabilitasi Lingkungan Budidaya Ikan (76 berita)
5. KKP dukung INAP TNI AL dengan distribusi benih udang vaname (63 berita)
6. Sejumlah 636 ABK tidak bekerja akibat kebakaran kapal nelayan di Cilacap (55 berita)
7. Bahas Peningkatan Keamanan Laut, Kepala Bakamla RI Temui Menteri KKP (51 berita)
8. Ekonomi biru berpeluang besar pada revolusi produksi pangan (34 berita)
9. Komisi VII DPR RI bahas tambang pasir laut di Kepri (33 berita)
10. Kembangkan UMKM, BI Gelar Karya Kreatif Indonesia 2022 (33 berita)



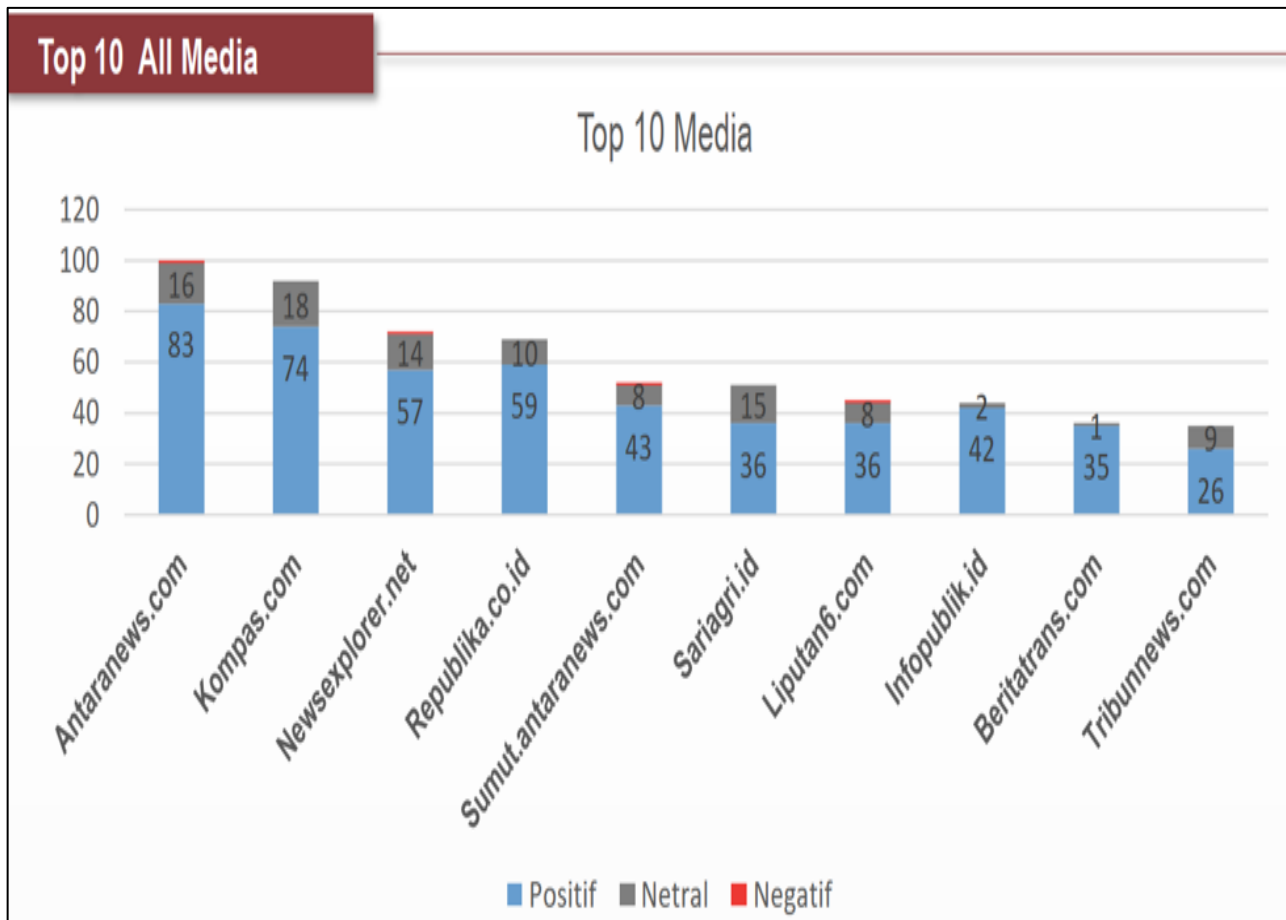
Juni

1. KKP Ajak Negara ASEAN Atasi Hambatan Ekspor (149 berita)
2. Percepat Program Prioritas, KKP Gelar Pelatihan Budidaya Hingga Olahan Ikan (126 berita)
3. Kemendagri Dorong Pemda Kelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (117 berita)
4. Presiden Jokowi Resmikan Tiga Pelabuhan di Wakatobi Sulawesi Tenggara (102 berita)
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono: Kami Meyakini Illegal Fishing Sudah Menurun (99 berita)
6. Pemerintah Terima 1.901 Pengaduan (86 berita)
7. KSOP Tanjung Emas Kampanyekan Keselamatan Pelayaran di Perairan Pelabuhan (80 berita)
8. Indonesia Akan Paparkan Strategi Ekonomi Biru (52 berita)
9. Sektor Pangan dan Agribisnis Siap Sukseskan Presidensi G20 Indonesia (52 berita)
10. Menteri KKP Trenggono Sabet Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi TNI AL (51 berita)



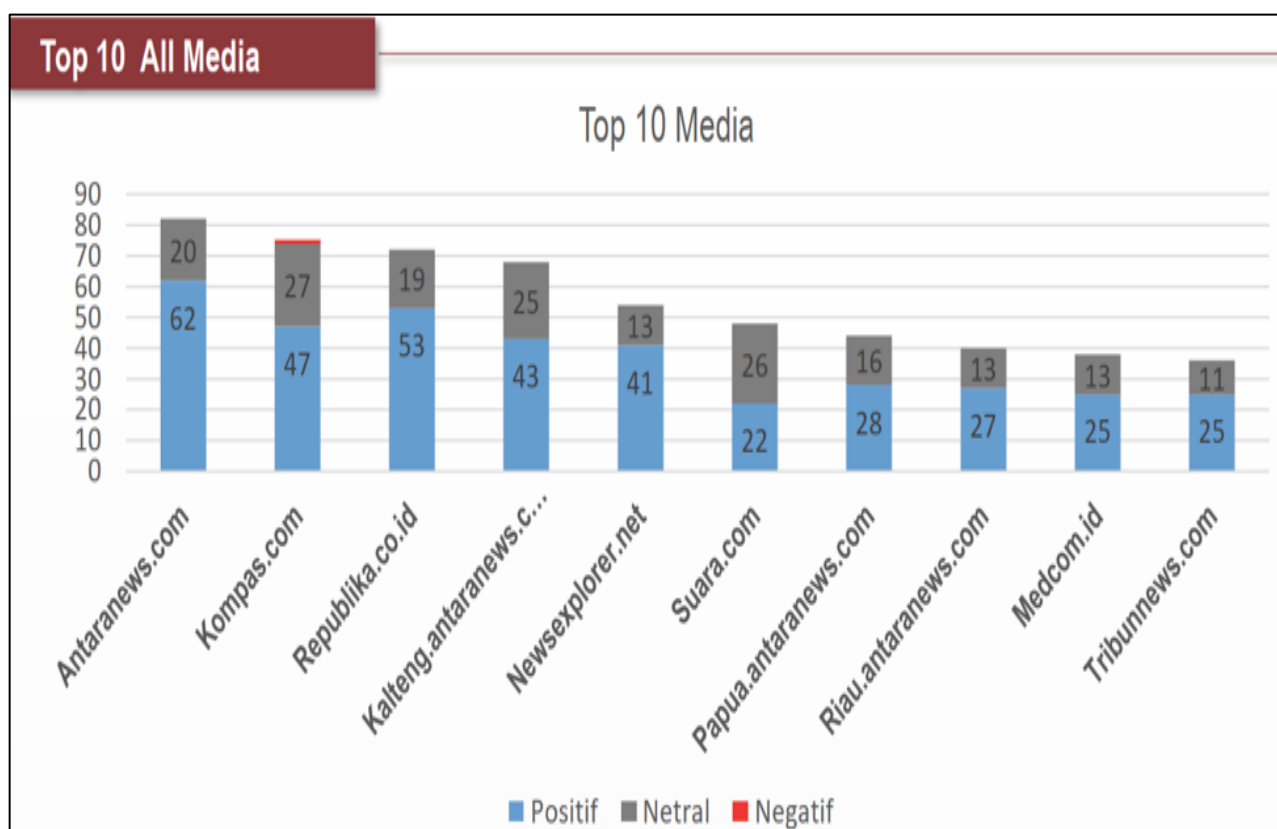
Juli

1. KKP bawa 67 UMKM terbaik ke puncak Gernas BBI Kalimantan Selatan (179 berita);
2. Semester I-2022, Menteri Trenggono Sukses Dongkrak Pendapatan Pembudidaya (170 berita);
3. KKP: Nilai Ekspor Perikanan RI Tembus Rp 45,36 Triliun di Semester I 2022 (139 berita);
4. PLN Serahkan Bantuan di Sangihe, Bantu Tingkatkan Penghasilan Nelayan (131 berita);
5. DKP Sulawesi Selatan Tanam 20 Ribu Bibit Mangrove di Pangkep (121 berita);
6. KKP Lepas 115 Ribu Benih Lobster Hasil Sitaan (115 berita);
7. Harga BBM Naik, KKP Ungkap 2,2 Juta Nelayan Merug (76 berita);
8. Strategi KKP Capai Target 32,5 juta Hektare Kawasan Konservasi (75 berita);
9. 5.000 Nelayan Banyuwangi Terima Bantuan Premi Asuransi Gratis (58 berita); dan
10. Erick Thohir siap mewujudkan ekosistem perikanan terintegrasi (57 berita).



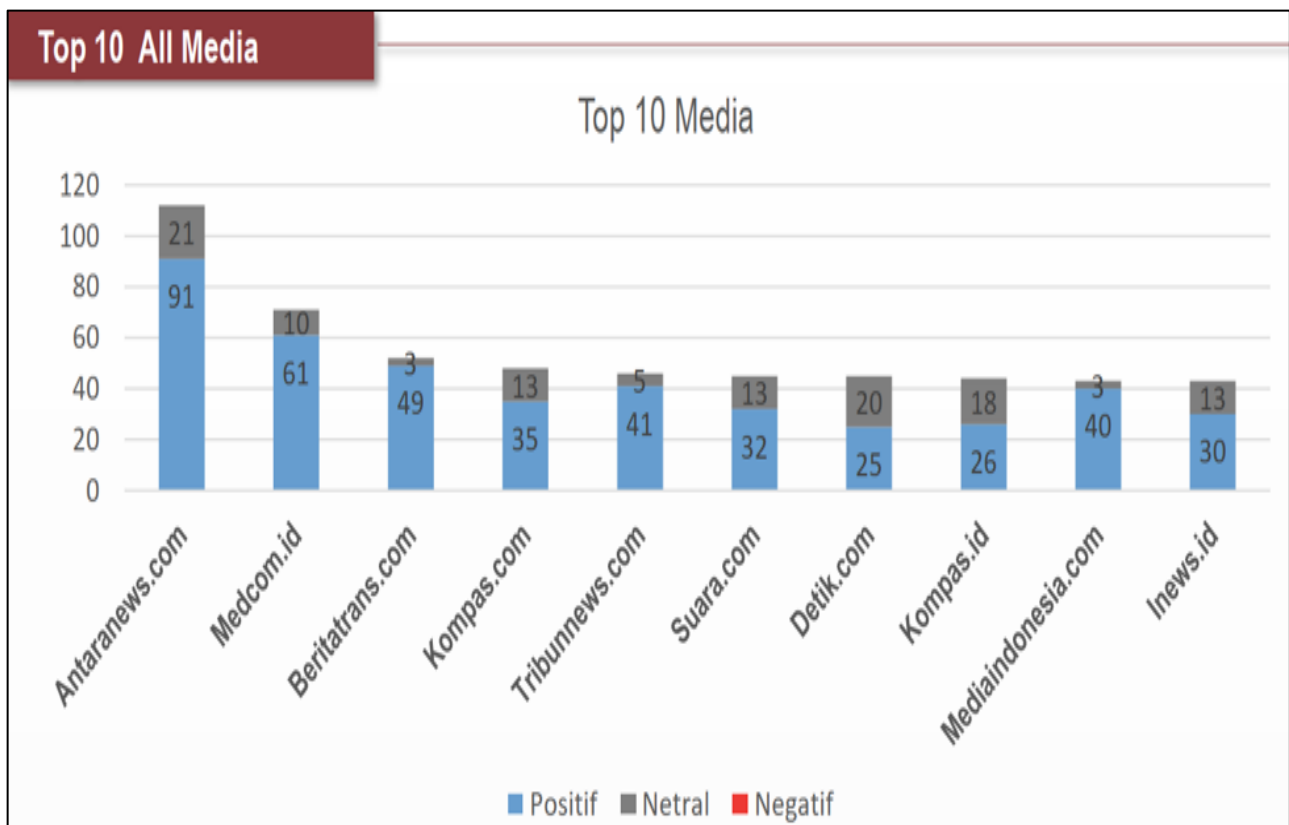
Agustus

1. KKP Targetkan Produksi Budidaya Capai 22,65 Juta Ton pada 2024 (118 berita);
2. Penanaman 10 Ribu Mangrove di Pesisir Pati untuk Hadapi Perubahan Iklim (110 berita);
3. Anggota DPR dukung Kemlu minta penjelasan PNG soal penembakan nelayan (103 berita);
4. Bakamla kerahkan 17 kapal patroli untuk jaga wilayah perbatasan (101 berita);
5. Rayakan HUT RI Ke-77, KKP Akan Gelar Upacara Bawah Air-Bebersih Laut (100 berita);
6. KKP Jaga Quality Assurance Perikanan untuk Dongkrak Ekspor (95 berita);
7. KKP Bekuk 83 Kapal Ikan Ilegal Selama Semester I 2022 (93 berita);
8. Tiga Puluh Persen Luas Laut untuk Konservasi (80 berita);
9. Operasi Laut Interdiksi Tahun 2022 Resmi Dibuka (53 berita) dan
10. KKP pulangkan empat nelayan RI asal Aceh Timur dari Thailand (51 berita).



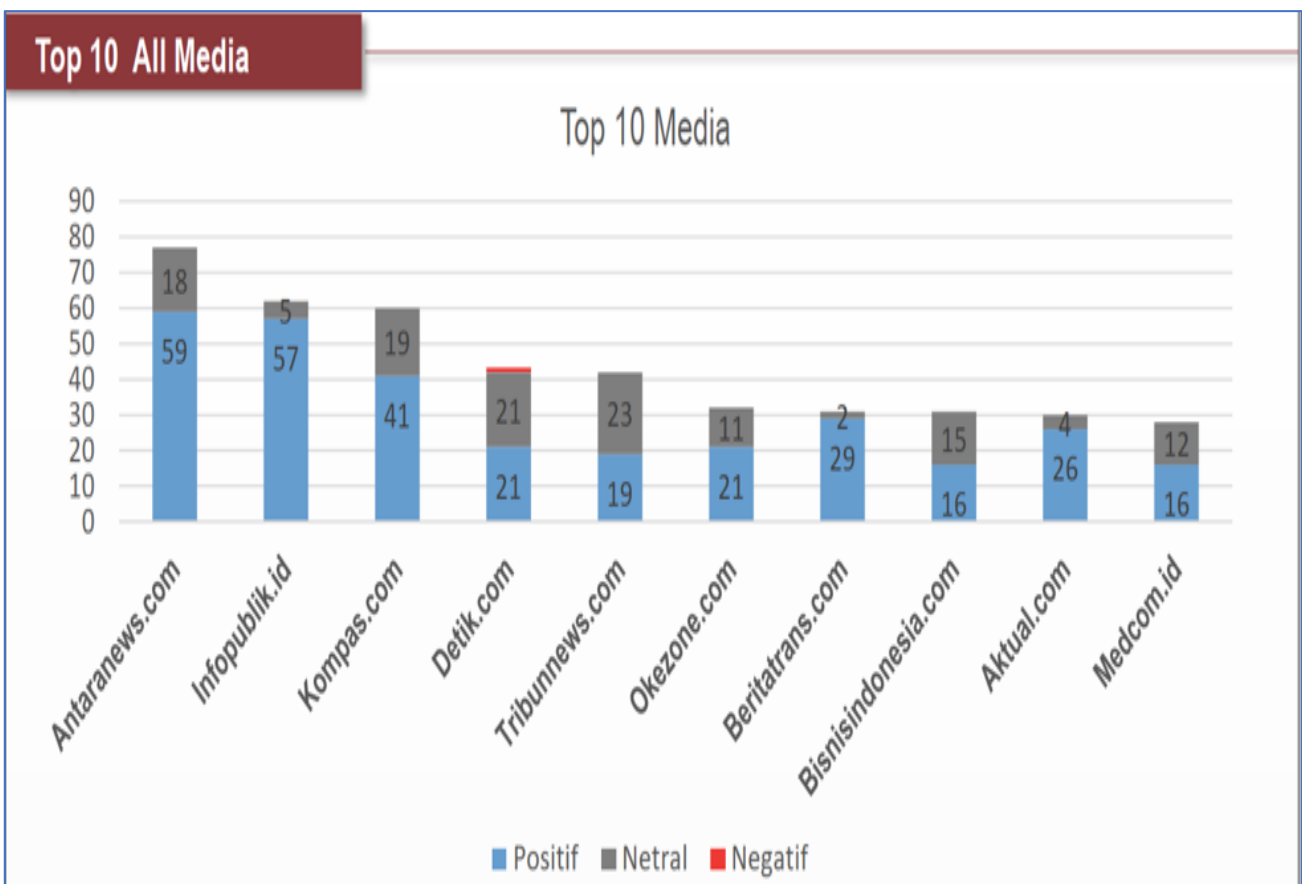
September

1. Ratusan nelayan Dumai tak bisa melaut karena kekurangan BBM (535 berita);
2. Indonesia Jajaki Peluang Ekspor ke Rusia (183 berita);
3. KKP Upayakan Stabilkan Harga dan Pasokan Ikan saat *Peak Season* (183 berita);
4. KKP Ajak Startup Garap Ekonomi Biru 170(berita);
5. Langkah KKP Maksimalkan Lahan Budidaya Sumatra Utara (123 berita);
6. KKP dan Bakamla Tangkap Dua Kapal Ikan Asing (85 berita);
7. KKP Gagalkan Penyeludupan Benih Bening Lobster Senilai Rp3,9 Miliar (75 berita);
8. BP Batam Gandeng Universitas Hasanuddin Kembangkan Industri Maritim (61 berita);
9. Jokowi Minta Tanjung Priok dan Pelabuhan Patimban Berkompetisi (53 berita); dan
10. Pagu Anggaran KKP 2023 Disepakati Rp6,7 Triliun (53 berita)



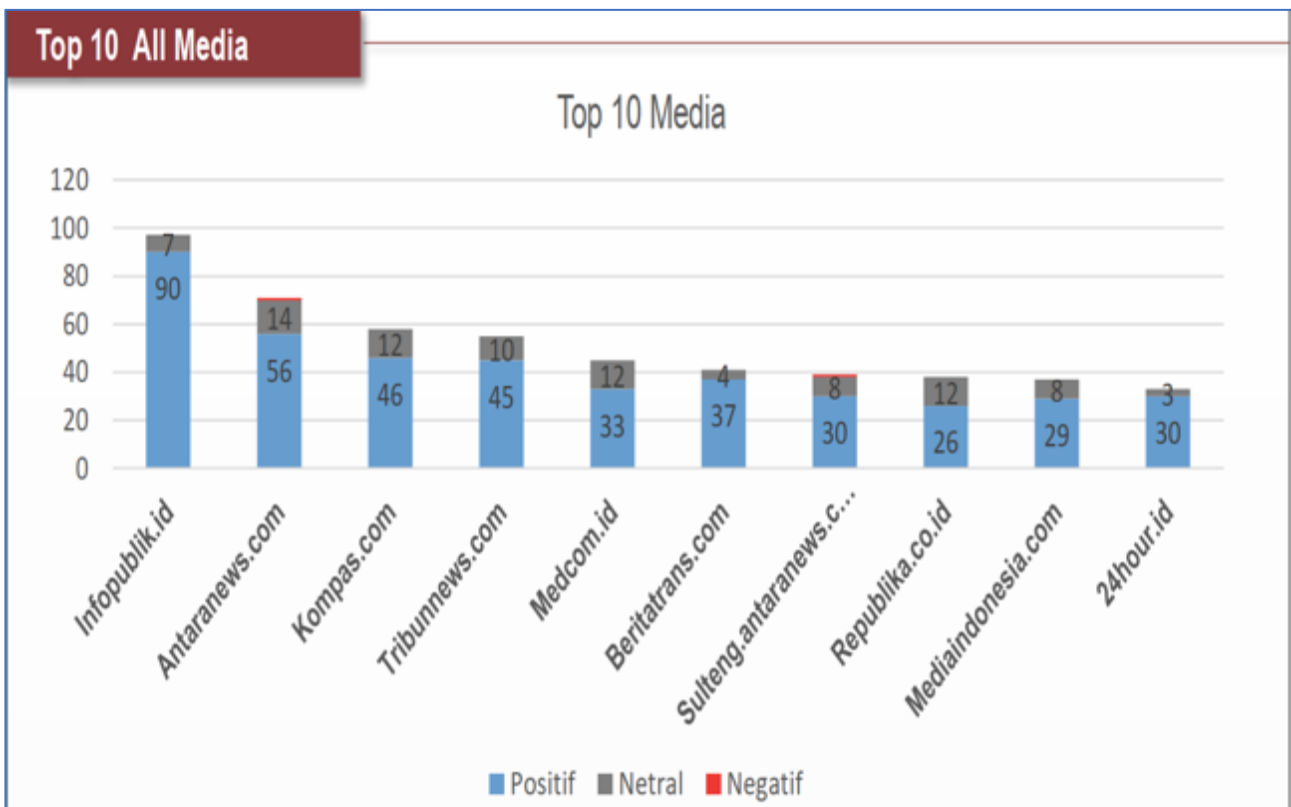
Oktober

1. Kejaksaan Agung melibatkan Susi Pudjiastuti sebagai saksi dalam kasus impor garam (399 berita);
2. KKP buka keran ekspor, 6.000 ekor lintah hidup dikirim ke Malaysia dan Filipina (160 berita);
3. Gernas BCL menjadi momentum bagi produk olahan perikanan ramah lingkungan (132 berita);
4. KKP bentuk kampung budidaya di Semau (130 berita);
5. Bakamla RI Resmi Menutup Patroli Bersama Tahun 2022 (113 berita);
6. KKP Kembangkan Induk Udang Vaname (111 berita);
7. Menteri KKP Minta UMKM Ikan Hias Air Tawar Jadi Pemain Globa (108 berita);
8. Gubernur Sulawesi Selatan bersama pelajar tanam 35.300 batang mangrove (93 berita);
9. KKP Akan Salurkan Bantuan BBM untuk Nelayan Tradisional (90 berita); dan
10. Rumput Laut Masuk Peta Peluang Investasi 2022 (77 berita).



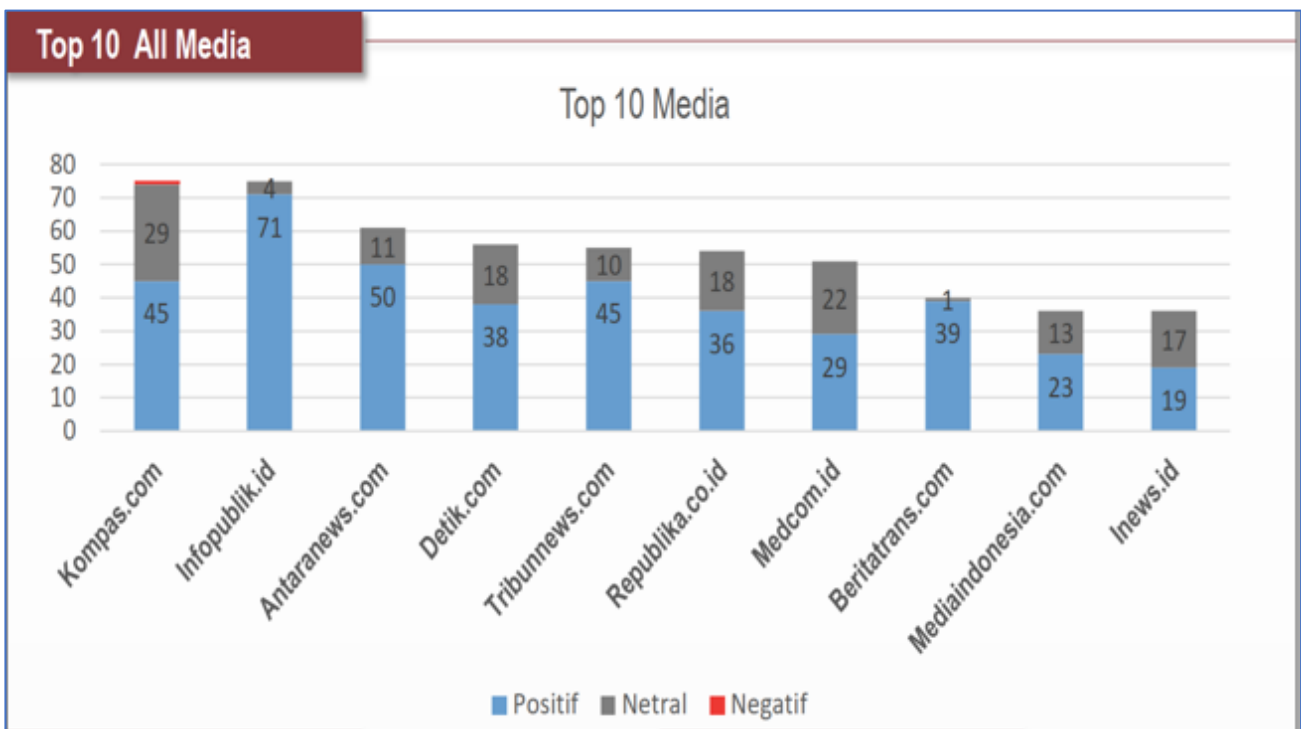
November

1. KTT G20 dinilai jadi langkah strategis Indonesia menuju Poros Maritim Dunia (133 berita);
2. Ekspor rumput laut RI hingga September 2022 capai USD455,7 Juta (123 berita);
3. Menteri Sosial Risma janji Fasilitas BBM bersubsidi untuk nelayan (121 berita);
4. Pembudidaya ikan air tawar kini didukung berbagai akses pembiayaan (116 berita);
5. Produksi garam di Pamekasan Capai 17 Ribu Ton (106 berita);
6. Demi berkelanjutan, KKP kembangkan zona konservasi laut ekonomi biru (106 berita);
7. Petani milenial budi daya udang Vaname di Karawang mampu panen hingga 1.337 Kilogram (78 berita);
8. Rumput laut disebut emas hijau, ini strategi KKP tingkatkan produksi (68 berita);
9. KKP: Produk perikanan berpeluang topang ketahanan pangan (66 berita); dan
10. KKP targetkan peningkatan konsumsi ikan pada Harkanas 2022 (62 berita).



Desember

1. Pulau Widi dijual melalui lelang, izin pengelolaan akan dicabut (286 berita);
2. Ma'ruf Amin & Trenggono lepas ekspor 1,4 ton tuna dari Biak ke Jepang (163 berita);
3. Pengamat maritim minta Indonesia setop berikan konsesi ZEE kepada Vietnam (157 berita);
4. Indonesia tarik utang rp1,4 t dari ADB untuk budidaya udang (126 berita);
5. Delapan nelayan Nusa Tenggara Timur yang ditahan Australia dipulangkan ke Indonesia (111 berita);
6. KPK hibahkan aset rampasan korupsi ke Pemkot Singkawang senilai Rp1,7 miliar (69 berita);
7. Kebijakan KKP kedepankan ekonomi biru (66 berita);
8. Menkomarves beberkan keberhasilan RI selama bergabung 4 tahun di AIS forum (63 berita);
9. Kendalikan inflasi, ratusan nelayan dapat bantuan subsidi BBM (61 berita); dan
10. Bantul tingkatkan konsumsi ikan melalui gebyar produk olahan perikanan (60 berita);



Lampiran 6. Daftar tindak lanjut Biro HKLN atas kegiatan yang diselenggarakan stakeholder KKP Pada Triwulan IV 2022

No	Kegiatan	Waktu	Penjelasan	Bentuk Tindak Lanjut
1	Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan	7-11 Oktober 2022	Tim Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke PT Biota Laut Ganggang. PT Biota Laut Ganggang (PT BLG) di Sulawesi Selatan yang bergerak dalam pengolahan dan perdagangan rumput laut serta hasil turunannya. Komisi IV meminta KKP mendorong industri rumput dalam negeri dari hulu hingga hilir dengan dukungan teknologi serta akses pasar yang luas dan terjamin.	Laporan pendampingan kunjungan DPR RI dan masukan dari anggota DPR RI dikomunikasikan dan disampaikan kepada unit eselon I KKP yang terkait.
2	Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Utara	9-13 Oktober 2022	Komisi IV DPR RI mendukung KKP melakukan pendampingan dan bimbingan kepada UD. Trikora agar mendapatkan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan berlaku "menjemput bola" kepada pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan ke berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Utara agar cepat mengakses perizinan.	Laporan pendampingan kunjungan DPR RI dan masukan dari anggota DPR RI dikomunikasikan dan disampaikan kepada unit eselon I KKP yang terkait.
3	Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Provinsi Aceh	12-16 Oktober 2022	DPR RI mendorong KKP untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan ICS Lampulo melalui perbaikan sistem pengelolaan, peningkatan kualitas dan kualitas sumber daya, serta perbaikan sarana, prasarana, dan peralatan ICS Lampulo dalam rangka peningkatan PAD	Laporan pendampingan kunjungan DPR RI dan masukan dari anggota DPR RI disampaikan kepada unit eselon I KKP yang terkait.
4	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Surabaya Jawa Timur	17 – 19 November 2022	Anggota Komisi IV DPR RI mendukung pembudidayaan kepiting dengan sistem apartemen yang tergolong baru. Sistem ini merupakan salah satu terobosan yang bagus untuk masyarakat Indonesia. Sistem vertical crab house merupakan sistem baru dalam budidaya kepiting yang bisa meminimalkan kematian. Sangat sesuai untuk mendukung bisnis ekspor ke luar negeri, maupun pemenuhan kebutuhan dalam negeri.	Laporan pendampingan kunjungan DPR RI dan masukan dari anggota DPR RI dikomunikasikan dan disampaikan kepada unit eselon I KKP yang terkait.
5	Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	22 November 2022	Komisi IV DPR RI menerima Pandangan Pemerintah dan Pandangan DPD RI atas pembahasan, jadwal acara dan mekanisme pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)	Biro HKLN meneruskan hasil rapat kerja kepada unit kerja KKP yang terkait
6	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Universitas Brawijaya Provinsi Jawa Timur	7 – 9 Desember 2022	Kunjungan dilaksanakan dalam rangka Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSADAE). RUU KSADAE diharapkan efektif dan tegas mewujudkan konservasi alam karena memberi sanksi atau hukuman yang lebih jelas tidak seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang tidak atau kurang memberi efek jera.	Laporan pendampingan kunjungan DPR RI dan masukan dari anggota DPR RI dikomunikasikan dan disampaikan kepada unit eselon I KKP yang terkait.
7	Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI	16 – 20 Desember 2022	Komisi IV DPR RI meminta KKP memberikan masukan dan solusi terkait pengelolaan PPI Maccini Baji agar pengelolaan pelabuhan dapat	Hasil pendampingan kunjungan dan

	RI ke Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan		dikelola optimal Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan serta menindaklanjuti aspirasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan.	masukan anggota DPR RI dikomunikasikan dan disampaikan kepada unit eselon I KKP yang terkait.
8	Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI Reses ke Palembang Provinsi Sumatera Selatan	16 – 20 Desember 2022	DPR mengidentifikasi beberapa masalah di BKIPM Palembang yang juga terjadi di unit-unit kerja sejenis di bawah KKP terutama akibat kecilnya alokasi anggaran KKP sehingga banyak kebijakan, program, dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu diupayakan anggaran KKP dapat ditingkatkan.	Hasil pendampingan kunjungan DPR RI dikomunikasikan dan disampaikan kepada unit eselon I KKP yang terkait.
9	Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI Reses ke Provinsi Bali	16 – 20 Desember 2022	Komisi IV DPR RI mendorong pengendalian Budi Daya Perikanan Sistem Keramba Jaring Apung sesuai Pasal 156 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur bahwa badan air danau dan ekosistem sekitar badan air danau tertutup dikelola dengan mengacu pada Baku Mutu Air Kelas Satu serta mendorong penggunaan jenis pakan ikan ramah lingkungan dalam budi daya ikan di Danau Batur dan sekitarnya, dalam rangka melaksanakan upaya penyelamatan Danau.	Laporan pendampingan kunjungan DPR RI dan masukan dari anggota DPR RI dikomunikasikan dan disampaikan kepada unit eselon I KKP yang terkait.
10	Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	5 Desember 2022	Komisi IV DPR RI meminta KKP memperbaiki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang KSDAHE serta menyepakati pembentukan Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	Biro HKLN meneruskan hasil rapat kerja kepada unit kerja KKP yang terkait

Lampiran 7. Daftar judul koleksi Perpustakaan KKP yang dimanfaatkan pada Triwulan IV 2022

No	Judul Koleksi	Bentuk Koleksi	Tanggal Pemanfaatan	Nama Anggota Perpustakaan
1	Perkembangan Rekayasa Genetika Dalam Budidaya Ikan Hias Di Indonesia	PDF	2022-10-01 00:31:45	Unknown
2	Efektifitas Dan Efisiensi Proses Komunikasi Dalam Penyuluhan Perikanan	PDF	2022-10-03 15:05:11	Abdul Rohman Nasrudin
3	Penyuluhan Perikanan	PDF	2022-10-03 15:07:15	Abdul Rohman Nasrudin
4	Mengapa Penyuluhan Perikanan Penting?	PDF	2022-10-03 15:09:12	Abdul Rohman Nasrudin
5	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	PDF	2022-10-03 15:14:13	Abdul Rohman Nasrudin
6	Kelolosan Ikan Kurisi (Nemipterus Japonicus) Melalui Juvenile And Trash Excluder Devices Pada Jaring Arad	PDF	2022-10-09 00:00:48	Abdul Rohman Nasrudin
7	Efektivitas Dan Efisiensi Proses Komunikasi Dalam Penyuluhan Perikanan	PDF	2022-10-13 14:29:34	Abram Barata
8	Antologi Tak Lelah Melangkah: Perjalanan Mengelola Perpustakaan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	PDF	2022-11-10 13:59:36	Abram Barata
9	Profil Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Untuk Mendukung Industrialisasi Kelautan Dan Perikanan	PDF	2022-10-25 11:13:01	Agus Tri Yulianto
10	Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2015 - 2019 Provinsi Kalimantan Utara	PDF	2022-10-25 11:18:49	Agus Tri Yulianto
11	Direktori Pulau Di Provinsi Sulawesi Utara	PDF	2022-10-25 11:19:35	Agus Tri Yulianto
12	Aplikasi Teknologi Pengelolaan Perikanan Tangkap	PDF	2022-10-10 20:40:47	Andi Aisyah Pala Margunani
13	Konservasi Sumberdaya Ikan Berbasis Kearifan Lokal	PDF	2022-10-28 03:16:06	Andi Aisyah Pala Margunani
14	Spesifikasi Teknis Alat Bantu Penangkapan	PDF	2022-11-11 00:03:27	Andi Aisyah Pala Margunani
15	Pengolahan Kolagen Dari Kulit Ikan Nila	PDF	2022-11-14 15:55:29	Andi Aisyah Pala Margunani
16	Ekonomi Perikanan	PDF	2022-10-14 16:04:03	Anton Ojak Panjaitan
17	Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan Dan Kelautan	PDF	2022-10-14 16:08:30	Anton Ojak Panjaitan
18	Dewan Keamanan Nasional : Solusi Mengatasi Ancaman Multidimensi	PDF	2022-10-14 16:10:22	Anton Ojak Panjaitan
19	Policy Brief Potensi Indonesia Menuju Negara Maritim	PDF	2022-10-14 16:16:28	Anton Ojak Panjaitan
20	Pengembangan Minapolitan Berbasis Perairan Umum Daratan	PDF	2022-11-24 09:18:40	Apriyantho Salawali
21	Minapolitan : Dari Konsep Menuju Implementasi	PDF	2022-11-24 09:19:56	Apriyantho Salawali
22	Peningkatan Kapasitas Fasilitas Fungsional Melalui Program Minapolitan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (Ppn) Pekalongan, Jawa Tengah	PDF	2022-11-24 09:21:20	Apriyantho Salawali
23	Kliping Terjemahan Beberapa Artikel Tentang: Cara Budidaya Ikan Yang Baik (Cbib)	PDF	2022-12-12 20:59:06	Apriyantho Salawali

24	Pembesaran Ikan Patin Secara Baik (Cbib) Di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau	PDF	2022-12-12 20:59:37	Apriyantho Salawali
25	Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir	PDF	2022-11-17 08:28:00	Arief Gunawan
26	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Plbpm)2007	PDF	2022-11-17 08:29:50	Arief Gunawan
27	Antologi Tak Lelah Melangkah: Perjalanan Mengelola Perpustakaan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	PDF	2022-11-17 08:45:50	Arief Gunawan
28	Analisis Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014	PDF	2022-11-24 13:17:24	Arief Gunawan
29	Profil Asosiasi Ikan Hias Indonesia	PDF	2022-12-13 10:25:32	Aris Machmudi
30	Patin: Komoditas Industri Budidaya Air Tawar	PDF	2022-12-13 10:59:26	Aris Machmudi
31	Pengembangan Minapolitan Berbasis Perairan Umum Daratan	PDF	2022-11-01 10:39:21	Asep Ardianto
32	Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional	PDF	2022-11-14 22:08:03	Azmi
33	Komik Sidat	PDF	2022-12-11 06:54:09	Banar Pujo Wicaksono
34	Manajemen Operasi Kapal Perikanan	PDF	2022-12-11 06:57:15	Banar Pujo Wicaksono
35	Aplikasi Teknologi Pengelolaan Perikanan Tangkap	PDF	2022-12-11 06:58:52	Banar Pujo Wicaksono
36	Capturing Wealth From Tuna	PDF	2022-12-11 07:02:40	Banar Pujo Wicaksono
37	Merajut Adat Mendaulat Laut: Karakteristik Masyarakat Hukum Adat Di Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	PDF	2022-12-11 07:03:04	Banar Pujo Wicaksono
38	Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka 2022 Marine And Fisheries In Figures Tahun 2022	PDF	2022-12-11 07:06:16	Banar Pujo Wicaksono
39	Ilmu Listrik Kapal Penangkapan Ikan 1	PDF	2022-12-11 07:11:29	Banar Pujo Wicaksono
40	Hasil Tangkap Sampingan (Hts) Kapal Rawai Tuna Di Samudera Hindia Yang Berbasis Di Benoa	PDF	2022-12-11 07:11:55	Banar Pujo Wicaksono
41	Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut Edisi Ketiga	PDF	2022-12-11 07:12:31	Banar Pujo Wicaksono
42	Dimensi Religi Dalam Pembuatan Pinisi Dimensions Of Religious Elements In Making Pinisi	PDF	2022-12-11 07:13:37	Banar Pujo Wicaksono
43	Kerusakan Struktur Akibat Getaran Lokal Pada Kapal Yang Jarang Diperhatikan: Analisis Dan Solusi (Studi Kasus)	PDF	2022-12-11 07:14:10	Banar Pujo Wicaksono
44	Budi Daya Bawal Air Tawar Di Kolam Terpal	PDF	2022-12-11 07:15:35	Banar Pujo Wicaksono
45	Petunjuk Teknis Identifikasi Perangkat Keselamatan Bagi Kapal Ikan	PDF	2022-12-11 07:16:30	Banar Pujo Wicaksono
46	Teknik Perbanyakan Benih Rumput Laut, Gracillaria Verrucosa Melalui Teknik Kultur Jaringan	PDF	2022-12-11 07:25:39	Banar Pujo Wicaksono
47	Komik Hiu Berjalan	PDF	2022-12-11 07:26:24	Banar Pujo Wicaksono
48	Komik Tuna Sirip Biru	PDF	2022-12-11 07:26:47	Banar Pujo Wicaksono
49	Komik Belida	PDF	2022-12-11 07:27:10	Banar Pujo Wicaksono
50	Komik Arwana Super Red	PDF	2022-12-11 07:27:28	Banar Pujo Wicaksono
51	Komik Udang Windu	PDF	2022-12-11 07:27:48	Banar Pujo Wicaksono

52	Ekstrak Sargassum Sp. Sebagai Antioksidan Dalam Sistem Emulsi Minyak Ikan Selama Penyimpanan Pada Suhu Kamar	PDF	2022-12-18 09:04:12	Banar Pujo Wicaksono
53	Studi Koridor Logistik Ikan Nasional 2020	PDF	2022-12-18 09:05:55	Banar Pujo Wicaksono
54	Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional	PDF	2022-12-18 09:10:45	Banar Pujo Wicaksono
55	Menyongsong Era Digitalisasi Penyuluhan Perikanan	PDF	2022-12-18 09:11:03	Banar Pujo Wicaksono
56	Pengembangan Budidaya Lobster Berkelanjutan	PDF	2022-12-18 09:11:54	Banar Pujo Wicaksono
57	Laut Indonesia : Teknologi Dan Pemanfaatannya	PDF	2022-12-18 09:12:15	Banar Pujo Wicaksono
58	Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia	PDF	2022-12-18 09:12:19	Banar Pujo Wicaksono
59	Perikanan Indonesia: Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan	PDF	2022-12-18 09:14:41	Banar Pujo Wicaksono
60	Algae	PDF	2022-12-18 09:15:24	Banar Pujo Wicaksono
61	Panduan Lengkap Agribisnis Ikan Gurami	PDF	2022-12-18 09:15:40	Banar Pujo Wicaksono
62	Karakteristik Sumberdaya Laut Arafura & Pesisir Baratdaya Papua	PDF	2022-12-18 09:15:40	Banar Pujo Wicaksono
63	Keanekaragaman Hayati Laut	PDF	2022-12-18 09:15:42	Banar Pujo Wicaksono
64	Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka 2022 Marine And Fisheries In Figures Tahun 2022	PDF	2022-11-16 09:50:09	Bayu Arif Pasa Laksmana
65	Perkembangan Dan Potensi Produksi Perikanan Pelagis Kecil, Serta Strategi Pemulihan Sumber Daya Ikannya Di Laut Jawa	PDF	2022-11-16 09:58:34	Bayu Arif Pasa Laksmana
66	Pengenalan Jenis-Jenis Mamalia Laut Indonesia	PDF	2022-11-28 14:18:02	Bernavita Fiana
67	Profil Asosiasi Ikan Hias Indonesia	PDF	2022-11-03 20:00:49	Boby Felix Pambudi
68	Penggunaan Berbagai Wadah Untuk Pembudidayaan Ikan Hias Air Tawar	PDF	2022-11-03 20:01:40	Boby Felix Pambudi
69	Ikan Hias Laut : Tantangan Budidaya Dan Peluang Bisnis	PDF	2022-11-03 20:02:24	Boby Felix Pambudi
70	Teknologi Produksi Benih Ikan Hias Laut Untuk Melestarikan Sumberdaya Genetiknya	PDF	2022-11-03 20:03:14	Boby Felix Pambudi
71	Statistik Produksi Budidaya Ikan Hias Indonesia : Indonesian Aquaculture Ornamentalfish Statistics 2015	PDF	2022-11-03 20:04:19	Boby Felix Pambudi
72	Biologi Dan Perikanan Tuna Sirip Kuning	PDF	2022-12-08 05:45:08	Denies Maula
73	Eksistensi Industri Tepung Ikan Di Kota Tegal, Jawa Tengah	PDF	2022-10-25 11:35:13	Devi Kartika Sari Utomo
74	Pengolahan Tepung Ikan	PDF	2022-10-25 11:35:37	Devi Kartika Sari Utomo
75	Biologi Reproduksi Ikan Red Devil (Amphilopus Labiatus) Dan (Amphilopus Citrinellus) Di Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah	PDF	2022-10-25 11:40:09	Devi Kartika Sari Utomo
76	Pemberdayaan Garam Rakyat	PDF	2022-10-21 11:32:09	Dhimas Pangestu
77	Garam Madura : Tradisi Dan Potensi Usaha Garam Rakyat	PDF	2022-10-21 12:00:04	Dhimas Pangestu

78	Kebangkitan Garam Rakyat	PDF	2022-10-21 12:00:37	Dhimas Pangestu
79	Tingkat Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petambak Garam Berdasarkan Status Penguasaan Lahan	PDF	2022-10-21 12:09:10	Dhimas Pangestu
80	Harapan Tanah Garam	PDF	2022-10-21 12:11:48	Dhimas Pangestu
81	Buku Pintar Kementerian Kelautan Dan Perikanan	PDF	2022-10-21 12:12:52	Dhimas Pangestu
82	Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2018	PDF	2022-10-28 15:53:04	Diana Aryanti, Sp, Msi
83	Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka Pusat Data, Statistik Dan Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Natuna	PDF	2022-10-28 15:59:23	Diana Aryanti, Sp, Msi
84	Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka 2022 Marine And Fisheries In Figures Tahun 2022	PDF	2022-10-06 15:53:06	Dika Aryana Putra
85	Aplikasi Teknologi Pengelolaan Perikanan Tangkap	PDF	2022-10-06 15:57:21	Dika Aryana Putra
86	Pemulihan Sumber Daya Ikan Untuk Peningkatan Produksi Perikanan	PDF	2022-10-06 15:58:36	Dika Aryana Putra
87	Manajemen Operasi Kapal Perikanan	PDF	2022-10-06 15:59:05	Dika Aryana Putra
88	Telaah Akademik : Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi Untuk Mendukung Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional	PDF	2022-10-06 15:59:30	Dika Aryana Putra
89	Telaah Akademik : Rancangan Pengaturan Pungutan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.	PDF	2022-10-06 16:00:49	Dika Aryana Putra
90	Daerah Rawan Pelanggaran	PDF	2022-12-15 13:31:52	Dinar Afina Dwiputri
91	Teknik Perbanyakan Benih Rumput Laut, Gracillaria Verrucosa Melalui Teknik Kultur Jaringan	PDF	2022-12-06 15:23:41	Dito Zhafran Amarrafi
92	Dinamika Daya Saing Usaha Rumput Laut	PDF	2022-12-06 15:24:50	Dito Zhafran Amarrafi
93	Teknik Perbanyakan Benih Rumput Laut, Gracillaria Verrucosa Melalui Teknik Kultur Jaringan	PDF	2022-10-25 15:00:16	Dodi Ardi Kurniadi
94	Koleksi, Karakterisasi, Dan Seleksi Plasma Nutfah Ikan Mas (Cyprinus Carpio) Tahan Penyakit Koi Herpes Virus	PDF	2022-10-25 15:05:10	Dodi Ardi Kurniadi
95	Memanusiakan Pulau	PDF	2022-10-25 15:06:58	Dodi Ardi Kurniadi
96	Keanekaragaman Hayati Laut	PDF	2022-10-25 15:07:46	Dodi Ardi Kurniadi
97	Patin: Komoditas Industri Budidaya Air Tawar	PDF	2022-10-25 15:08:47	Dodi Ardi Kurniadi
98	Perikanan Indonesia: Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan	PDF	2022-10-25 15:09:08	Dodi Ardi Kurniadi
99	Tanaman Hias Air Tawar Manfaat Untuk Perairan, Perbanyakan Konvensional Dan In-Vitro	PDF	2022-10-25 15:16:59	Dodi Ardi Kurniadi
100	Benih Unggul Hasil Pemuliaan Untuk Peningkatan Produktifitas Akuakultur Air Tawar	PDF	2022-10-25 15:17:04	Dodi Ardi Kurniadi
101	Jenis Pakan Alami Larva Ikan Betok (Anabas Testudineus Bloch) Di Perairan Rawa Monoton Danau Bangkai, Kalimantan Selatan	PDF	2022-10-25 15:18:37	Dodi Ardi Kurniadi
102	Konstruksi Dan Hasil Tangkapan Jaring Trammel Yang Beroperasi Di Estuaria Sungai Musi, Sumatera Selatan	PDF	2022-10-08 22:16:17	Dr. Ahmadi Zari Gani

103	Spesifikasi Teknis Alat Bantu Penangkapan	PDF	2022-10-08 22:18:17	Dr. Ahmadi Zari Gani
104	Telaah Akademik : Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi Untuk Mendukung Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional	PDF	2022-12-21 12:03:50	Dudu Abdullah, St
105	Pengembangan Teknik Diagnosa Penyakit Epizootic Ulcerative Syndrome (Eus) Pada Ikan Melalui Pendekatan Gejala Klinis, Isolasi Patogen, Histopatologis, (J. Ris. Akuakultur Vol. 7 No. 2 Tahun 2012)	PDF	2022-10-18 12:03:24	Elsa Purwati
106	Pedoman Umum Pemp 2006	PDF	2022-11-14 20:13:31	Eris Nur Dirman., S.T., M.T
107	Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Di Teluk Jakarta Dan Perairan Kepulauan Seribu	PDF	2022-11-14 20:22:50	Eris Nur Dirman., S.T., M.T
108	Profil Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Untuk Mendukung Industrialisasi Kelautan Dan Perikanan	PDF	2022-11-03 12:55:06	Eviet Sri Setiyorini
109	Widya Wiyata Pertama Anak : Satwa Liar	PDF	2022-11-28 10:30:15	Fabiola Fauzia
110	Aktualisasi Strategi Mengatasi Ancaman Non Tradisional Dan Terorisme Maritim Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional	PDF	2022-11-28 19:03:16	Firman Gunawan
111	Kondisi Terkini Budidaya Ikan Bandeng Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah	PDF	2022-10-25 11:23:27	Fitria
112	Kebijakan Dan Strategi Konservasi Sumberdaya Ikan Dan Lingkungan Di Perairan Daratan	PDF	2022-10-05 10:20:27	Gede Agus Surya Pratama, S.St.Pi, Mp
113	Pengembangan Budidaya Lobster Berkelanjutan	PDF	2022-10-06 19:44:21	Gede Agus Surya Pratama, S.St.Pi, Mp
114	Riset Dan Teknologi Pemantauan Dinamika Laut Indonesia	PDF	2022-10-12 14:32:49	Gede Agus Surya Pratama, S.St.Pi, Mp
115	Laut Indonesia : Teknologi Dan Pemanfaatannya	PDF	2022-10-12 14:43:10	Gede Agus Surya Pratama, S.St.Pi, Mp
116	Perikanan Indonesia: Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan	PDF	2022-10-12 14:43:57	Gede Agus Surya Pratama, S.St.Pi, Mp
117	Pengantar Ilmu Kelautan 2008	PDF	2022-11-02 12:34:48	Gede Agus Surya Pratama, S.St.Pi, Mp
118	Karakteristik Oseanografi Dalam Kaitannya Dengan Kesuburan Perairan Di Selat Bali	PDF	2022-11-09 10:44:44	Gede Agus Surya Pratama, S.St.Pi, Mp
119	Polikultur Rumput Laut (Gracilaria Verrucosa) Dengan Bandeng Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah	PDF	2022-12-05 09:53:56	Gede Agus Surya Pratama, S.St.Pi, Mp
120	Pola Pembiayaan Kecil : Budidaya Rumput Laut Polikultur Bandeng	PDF	2022-12-05 09:54:31	Gede Agus Surya Pratama, S.St.Pi, Mp
121	Penyebab, Dampak, Dan Manajemen Penyakit Karang Di Ekosistem Terumbu Karang	PDF	2022-12-16 12:04:35	Ghitza Cantika Putri
122	Puncak Prevalensi Penyakit Karang Jenis Sabuk Hitam (Black Band Disease) Di Kepulauan Seribu, Jakarta	PDF	2022-12-16 12:12:22	Ghitza Cantika Putri
123	Flora Dan Fauna Di Pesisir Dan Laut Untuk Kelas 3 Sd	PDF	2022-10-10 08:52:30	Gito Priambodho
124	Keanekaragaman Hayati Laut	PDF	2022-10-10 10:56:00	Gito Priambodho
125	Pesan Cinta Terumbu Karang Dan Biota Dasar Laut	PDF	2022-10-10 10:57:51	Gito Priambodho

126	Buku Besar Maritim Indonesia Seri 2 : Sumber Daya Hayati Maritim	PDF	2022-10-10 11:05:49	Gito Priambodho
127	Ekonomi Biru Sumberdaya Pesisir	PDF	2022-10-11 13:40:21	Gusrizal
128	Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process (Ahp)	PDF	2022-10-11 13:45:49	Gusrizal
129	Telaah Akademik : Perspektif Pembangunan Ekonomi Kelautan	PDF	2022-12-12 17:36:24	Hadian Bagas Widyawan
130	Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan Dan Kelautan	PDF	2022-12-12 17:37:10	Hadian Bagas Widyawan
131	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat	PDF	2022-12-13 11:15:56	Hadian Bagas Widyawan
132	Policy Brief Potensi Indonesia Menuju Negara Maritim	PDF	2022-12-13 12:15:14	Hadian Bagas Widyawan
133	Tingkat Langit Taburi Laut Nusantara : Suatu Kekuatan Ekonomi Dan Ketahanan Bangsa	PDF	2022-12-13 12:15:44	Hadian Bagas Widyawan
134	Distribusi Ukuran, Reproduksi Dan Habitat Pemijahan Ikan Bilih (Mystacoleucus Padangensis Blkr.) Di Danau Singkarak, (Bawal Vol. 5 (1) April 2013)	PDF	2022-10-07 13:52:38	Hasudungan Sahat Maruli Tua
135	Ikan Patin: Peluang Ekspor, Penanganan Pascapanen, Dan Diversifikasi Produk Olahannya	PDF	2022-10-19 16:18:34	Heri Indriyani Salim
136	Potensi Ekstrak Mangrove (Sonneratia Alba, S. Caseolaris, S. Lanceolata, Dan Brugiera Gymnorhiza) Sebagai Antibakteri Terhadap Vibrio Parahaemolyticus	PDF	2022-10-24 11:53:16	Heri Indriyani Salim
137	Profil Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Untuk Mendukung Industrialisasi Kelautan Dan Perikanan	PDF	2022-10-24 13:44:47	Heri Indriyani Salim
138	Pengolahan Bakto Agar Dari Rumpun Laut Merah (Rhodymenia Ciliata) Dengan Pra Perlakuan Alkali	PDF	2022-11-09 07:35:05	Heri Indriyani Salim
139	Pemanfaatan Angkak Sebagai Pewarna Alami Pada Terasi Udang	PDF	2022-11-21 09:45:31	Heri Indriyani Salim
140	Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka 2022 Marine And Fisheries In Figures Tahun 2022	PDF	2022-12-04 22:45:57	Hotnauli.Sinaga
141	Analisis Kebijakan : Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Dan Kelautan Tahun 2011	PDF	2022-11-02 02:13:48	I Made Widyana
142	The Impact Of Regulation Banning Export Of Glass Eels For Indonesian Eels Culture	PDF	2022-11-07 12:19:06	Ibnu Fatkhan
143	Pedoman Identifikasi Dan Monitoring Populasi Penyu	PDF	2022-12-20 11:46:24	Ibnu Fatkhan
144	Indonesia Seaweed Profile	PDF	2022-10-09 20:05:49	Ida Bagus Ngurah Manik Parasara
145	Budidaya Ikan Nila "Bio": Kiat Panen Berkesinambungan Budidaya Ikan Nila Dengan Aplikasi Teknologi Bioflok	PDF	2022-10-31 12:20:07	Ilham Nur Hakim
146	Analisa Usaha Bididaya Lele Di Kolam Terpal	PDF	2022-10-31 12:23:27	Ilham Nur Hakim
147	Teknik Pembesaran Ikan Lele Dengan Sistem Akuaponik	PDF	2022-10-31 12:23:49	Ilham Nur Hakim
148	Akuakultur Indonesia, Komitmen Total Menuju Kemandirian Pakan	PDF	2022-11-18 14:08:38	Ilham Nur Hakim
149	Benih Unggul Hasil Pemuliaan Untuk Peningkatan Produktifitas Akuakultur Air Tawar	PDF	2022-11-18 14:14:15	Ilham Nur Hakim
150	Pembenihan Ikan Air Tawar Asli Perairan Indonesia	PDF	2022-11-15 13:02:35	Insan Kamil, A.Md.Pi, S.P

151	Patin: Komoditas Industri Budidaya Air Tawar	PDF	2022-11-15 13:10:32	Insan Kamil, A.Md.Pi, S.P
152	Budidaya Udang Vaname	PDF	2022-11-15 13:12:46	Insan Kamil, A.Md.Pi, S.P
153	Sosial Budaya Masyarakat Nelayan: Konsep Dan Indikator Pemberdayaan	PDF	2022-11-28 16:24:24	Intan Novia Rosiana
154	Kondisi Sosial Budaya Dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat Nelayan: Konsep Dan Indikator Pemberdayaan	PDF	2022-12-08 22:47:49	Intan Novia Rosiana
155	Teknik Perbanyakan Benih Rumput Laut, Gracillaria Verrucosa Melalui Teknik Kultur Jaringan	PDF	2022-10-27 10:22:46	Ishartini
156	Peningkatan Kualitas Warna Kuning Dan Merah Serta Pertumbuhan Benih Ikan Koi Melalui Pengayaan Tepung Kepala Udang Dalam Pakan, J. Ris. Akuakultur Vol. 8 No. 3 Tahun 2013	PDF	2022-10-27 10:23:23	Ishartini
157	Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2015 - 2019 Provinsi Kalimantan Tengah	PDF	2022-10-27 10:23:55	Ishartini
158	Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2015 - 2019 Provinsi Jawa Timur	PDF	2022-10-27 10:25:06	Ishartini
159	Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2015 - 2019 Provinsi Jawa Barat	PDF	2022-10-27 10:25:53	Ishartini
160	Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2015 - 2019 Provinsi Jawa Tengah	PDF	2022-10-27 10:26:26	Ishartini
161	Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2015 - 2019 Provinsi Yogyakarta	PDF	2022-10-27 10:26:47	Ishartini
162	Studi Koridor Logistik Ikan Nasional 2020	PDF	2022-10-27 10:33:12	Ishartini
163	Ikan Patin: Peluang Ekspor, Penanganan Pascapanen, Dan Diversifikasi Produk Olahannya	PDF	2022-10-27 10:33:32	Ishartini
164	Peran Mutu Dalam Menunjang Ekspor Udang Nasional	PDF	2022-10-27 10:33:48	Ishartini
165	Analisa Diversifikasi Pasar Ekspor Komoditi Udang Indonesia	PDF	2022-10-27 10:33:57	Ishartini
166	Kinerja Ekspor Tuna Indonesia: Kajian Mengenai Daya Saing & Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Ekspor Tuna Indonesia Di Pasar Jepang, Amerika Serikat & Korea Selatan.	PDF	2022-10-27 10:34:12	Ishartini
167	Majalah Laut Kita Edisi April 2018	PDF	2022-10-27 10:35:31	Ishartini
168	Pengembangan Budidaya Ikan Lele Di Kawasan Minapolitan Kabupaten Bogor, Jawa Barat: Aspek Kesesuaian Lahan, Implementasi Produksi, Dan Strategi Pengembangan, (J. Ris. Akuakultur Vol. 7 No. 2 Tahun 2012)	PDF	2022-10-27 10:35:48	Ishartini
169	Produksi Ikan Lele Cepat Tumbuh Generasi F-0 Menggunakan Metode Transgenesis (J. Ris. Akuakultur Vol. 8 No. 2 Tahun 2013)	PDF	2022-10-27 10:36:20	Ishartini
170	Analisa Usaha Budidaya Lele Di Kolam Terpal	PDF	2022-10-27 10:36:32	Ishartini
171	Memacu Pertumbuhan Gurami	PDF	2022-10-27 10:38:42	Ishartini
172	Panduan Lengkap Agribisnis Ikan Gurami	PDF	2022-10-27 10:39:01	Ishartini
173	Persyaratan Ekspor Hewan Akuatik Ke Uni Eropa	PDF	2022-10-27 10:39:36	Ishartini
174	Persyaratan Ekspor Hewan Akuatik Ke Negara Tujuan	PDF	2022-10-27 10:39:46	Ishartini
175	Pedoman Ekspor Perikanan Ke Negara Mitra (Republik Ceko, Ukraina Dan Uni Emirat Arab)	PDF	2022-10-27 10:40:10	Ishartini
176	Regulasi Dan Tata Niaga Produk Ikan Sidat Di Pasar Luar Negeri	PDF	2022-10-27 10:41:17	Ishartini

177	Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok	PDF	2022-10-27 10:44:48	Ishartini
178	Aneka Produk Olahan Lele	PDF	2022-10-27 10:45:53	Ishartini
179	Profil Asosiasi Ikan Hias Indonesia	PDF	2022-10-27 10:56:26	Ishartini
180	Mengapa Penyuluhan Perikanan Penting?	PDF	2022-10-12 08:07:01	Ketut Masiani
181	Teluk Tomini : Sulawesi Tengah	PDF	2022-10-29 04:33:04	La Nane
182	Pengembangan Pengolahan, Pengemasan Dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Teknologi Percontohan/ Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh Perikanan Studi Kasus Di Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah)	PDF	2022-11-14 14:44:05	Laili Husniyah
183	Making Seafood Sustainable: American Experiences In Global Perspectives	PDF	2022-11-14 15:11:27	Laili Husniyah
184	Ekonomi Biru Sumberdaya Pesisir	PDF	2022-10-22 10:48:09	Laurenzia Ayu Laura
185	Pengembangan Budidaya Rumput Laut: Implikasi Penerapan Blue Economy Di Teluk Sereweh, Nusa Tenggara Barat	PDF	2022-10-22 10:50:23	Laurenzia Ayu Laura
186	Rencana Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2014	PDF	2022-10-22 10:51:42	Laurenzia Ayu Laura
187	Hubungan Antara Faktor Lingkungan Dengan Produktivitas Tambak Untuk Rumput Laut (Gracilaria Verrucosa) Di Pantai Timur Provinsi Sulawesi Selatan	PDF	2022-10-22 11:09:38	Laurenzia Ayu Laura
188	Rumput Laut Sebagai Sumber Serat Pangan Potensial	PDF	2022-11-22 14:15:06	Laurenzia Ayu Laura
189	Analisis Ekologi-Ekonomi Pengembangan Minapolitan Perikanan Budidaya Di Provinsi Gorontalo	PDF	2022-11-22 14:21:42	Laurenzia Ayu Laura
190	Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process (Ahp)	PDF	2022-11-22 14:22:28	Laurenzia Ayu Laura
191	Penerapan Prinsip Blue Economy Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah	PDF	2022-11-22 14:25:18	Laurenzia Ayu Laura
192	Aplikasi Analisis Spasial Dan Statistik Multivariat Terhadap Kondisi Kualitas Perairan Di Selat Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Timur: Aspek Penting Untuk Pengembangan Budidaya Rumput Laut (J. Ris. Akuakultur Vol. 8 No. 1 Tahun 2013)	PDF	2022-11-22 14:49:13	Laurenzia Ayu Laura
193	Budidaya Udang Vaname Sistem Bioflok	PDF	2022-11-25 12:20:46	Lo Christian Djunaidi
194	Budidaya Udang Vaname Pola Intensif Dengan Sistem Bioflok Di Tambak	PDF	2022-11-25 12:24:18	Lo Christian Djunaidi
195	Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wppnri 572	PDF	2022-10-03 13:25:00	Lukman Maulana Yusuf
196	Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wpp Nri 712	PDF	2022-10-03 13:27:06	Lukman Maulana Yusuf
197	Inventarisasi Benthic Life Form Dan Aplikasi Marxan Di Gili Lawang – Gili Sulat, Lombok Timur	PDF	2022-10-10 08:47:01	Mahardika Zarhan Kristanto
198	Laporan Survey Dan Analisa Kkld Gili Sulat – Gili Lawang	PDF	2022-10-10 08:47:56	Mahardika Zarhan Kristanto
199	Status Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Perairan Laut Sulawesi	PDF	2022-10-20 17:15:59	Mariana

200	Produksi Optimal Pukat Cincin Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Kalimantan Barat	PDF	2022-10-22 14:14:54	Mariana
201	Recreation And Tourism As A Catalyst For Urban Waterfront Redevelopment	PDF	2022-10-25 13:37:43	Megawati Arsita Putri
202	Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional	PDF	2022-11-09 22:11:16	Mina Rifqi, A.Md
203	Modul Teknik Budidaya Ikan Air Payau	PDF	2022-10-06 09:31:32	Mohd. Ramadhani
204	Analisa Usaha Rumput Laut Dengan Metode Long Line (Euchema Cottonii)	PDF	2022-11-29 04:58:01	Monica Anindita Lutfitasari
205	Komik Belida	PDF	2022-11-05 19:43:34	Muhammad Avience
206	Keanekaragaman Hayati Laut	PDF	2022-11-09 22:37:41	Muhammad Avience
207	Laut Indonesia : Teknologi Dan Pemanfaatannya	PDF	2022-11-09 22:37:59	Muhammad Avience
208	Perikanan Indonesia: Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan	PDF	2022-11-09 22:38:20	Muhammad Avience
209	Potensi Pengembangan Dan Pemanfaatan Perikanan Kpp Pud 438	PDF	2022-11-16 17:04:12	Muhammad Avience
210	Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wpp Nri 712	PDF	2022-11-16 17:09:14	Muhammad Avience
211	Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan Dan Kelautan	PDF	2022-11-16 17:09:14	Muhammad Avience
212	Profil Asosiasi Ikan Hias Indonesia	PDF	2022-11-16 20:32:58	Muhammad Avience
213	Tata Nama Spesies Ikan Air Tawar Indonesia Ditinjau Dari Perkembangan Taksonomi	PDF	2022-10-30 20:17:12	Muhammad Rizki Akbar
214	Pembenihan Ikan Air Tawar Asli Perairan Indonesia	PDF	2022-10-30 20:55:11	Muhammad Rizki Akbar
215	Ensiklopedia Populer Ikan Air Tawar	PDF	2022-10-30 21:15:12	Muhammad Rizki Akbar
216	Teknik Pengukuran Morfometrik Udang Windu (Penaeus Monodon) Hasil Tangkapan Nelayan Di Pesisir Aceh Timur	PDF	2022-12-10 21:24:40	Mustasim, S.Pi., M.Si.
217	Dinamika Populasi Dan Tingkat Pemanfaatan Udang Windu (Penaeus Monodon) Di Perairan Tarakan, Kalimantan Timur, (J. Lit. Perikan. Ind. Vol.19 No. 4 Desember 2013)	PDF	2022-12-10 21:26:52	Mustasim, S.Pi., M.Si.
218	The Use Of Marxan To Re-Zone Mpa (Study Case : Gili Sulat- Gili Lawang, Lombok)	PDF	2022-11-30 21:28:59	Novita Tri Artiningrum, S.Si., M.Si.
219	Laporan Survey Dan Analisa Kkld Gili Sulat – Gili Lawang	PDF	2022-11-30 21:29:46	Novita Tri Artiningrum, S.Si., M.Si.
220	Pemanfaatan Bioteknologi Berbasis Mikroorganisme Guna Mendukung Peningkatan Produktivitas Perikanan Nasional	PDF	2022-12-07 08:13:17	Novita Tri Artiningrum, S.Si., M.Si.
221	Isolasi Dan Seleksi Bakteri Saluran Pencernaan Ikan Lele Sebagai Upaya Mendapatkan Kandidat Probiotik Untuk Efisiensi Pakan Ikan, J. Ris. Akuakultur Vol. 9 No. 1 Tahun 2014	PDF	2022-12-07 08:16:03	Novita Tri Artiningrum, S.Si., M.Si.
222	Menuju Produk Perikanan Prima Dan Berkelanjutan	PDF	2022-12-07 08:18:02	Novita Tri Artiningrum, S.Si., M.Si.

223	Peningkatan Nilai Tambah Ikan Dan Limbah Olahannya Melalui Teknologi Penanganan Dan Pengolahan 2011	PDF	2022-12-07 08:24:31	Novita Tri Artiningrum, S.Si., M.Si.
224	Inventarisasi Dan Identifikasi Patogen Potensial Yang Menginfeksi Ikan Rainbow (Melanotaenia Sp.)	PDF	2022-11-17 00:27:06	Nur Fadhillah Abustang
225	Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wppnri 713	PDF	2022-10-07 08:02:59	Okto Triwibowo
226	Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wpp Nri 712	PDF	2022-10-07 08:05:49	Okto Triwibowo
227	Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wppnri 715	PDF	2022-10-07 08:21:02	Okto Triwibowo
228	Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wppnri 717	PDF	2022-10-07 08:28:14	Okto Triwibowo
229	Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wppnri 572	PDF	2022-10-07 08:31:58	Okto Triwibowo
230	Daya Tangkap Kapal Pukat Cincin Dan Upaya Penangkapan Pada Perikanan Pelagis Kecil Di Laut Jawa	PDF	2022-10-07 08:42:44	Okto Triwibowo
231	Profil Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Untuk Mendukung Industrialisasi Kelautan Dan Perikanan	PDF	2022-10-23 09:29:01	Pamela Damayanti
232	Prospek Pengembangan Pemanfaatan Situs Kapal Tenggelam Ss Aquila Di Teluk Ambon	PDF	2022-11-14 08:43:05	Pamela Damayanti
233	Orang Laut Bajak Laut Raja Laut	PDF	2022-11-14 08:46:33	Pamela Damayanti
234	Budaya Bahari	PDF	2022-11-14 08:47:31	Pamela Damayanti
235	Naskah Sumber Arsip Kemaritiman	PDF	2022-11-14 08:48:32	Pamela Damayanti
236	Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka 2022 Marine And Fisheries In Figures Tahun 2022	PDF	2022-12-15 17:46:55	Pamela Damayanti
237	Pengembangan Budidaya Lobster Berkelanjutan	PDF	2022-12-15 17:57:55	Pamela Damayanti
238	Sebaran Laju Pancing Rawai Tuna Di Samudera Hindia, (J. Lit. Perikan. Ind. Vol.19 No. 4 Desember 2013)	PDF	2022-10-04 08:41:18	Pandi Santoso
239	Distribusi Ukuran Tuna Hasil Tangkapan Pancing Longline Dan Daerah Penangkapannya Di Perairan Laut Banda	PDF	2022-10-04 08:42:17	Pandi Santoso
240	Fishing Ground, Cacth Composition, Hook Rate And Length Distribution Of Billfishes Caught By Tuna Long Line In Indian Ocean (Ind.Fish.Res.J. Vol.19 No. 2 December 2013)	PDF	2022-10-04 08:43:07	Pandi Santoso
241	Perubahan Daerah Penangkapan, Target Tangkapan Dan Teknologi Armada Pukat Cincin Laut Jawa Yang Dioperasikan Di Samudera Pasifik	PDF	2022-10-04 08:57:55	Pandi Santoso
242	Pembesaran Ikan Bawal Di Karamba Jaring Apung (Kja)	PDF	2022-10-12 21:00:13	Puspa Amelia Putri Santika
243	Transformasi Kelautan Dan Perikanan Indonesia	PDF	2022-11-04 09:48:00	Ramses

244	Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka 2022 Marine And Fisheries In Figures Tahun 2022	PDF	2022-11-04 13:12:34	Ramses
245	Statistik Perikanan Tangkap Di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Ri 2005-2015	PDF	2022-11-04 13:15:46	Ramses
246	Pengembangan Budidaya Lobster Berkelanjutan	PDF	2022-11-14 09:54:15	Reza Ahmad
247	Potensi Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir Pulau Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai	PDF	2022-11-14 09:59:13	Reza Ahmad
248	Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka 2022 Marine And Fisheries In Figures Tahun 2022	PDF	2022-11-14 10:38:36	Reza Ahmad
249	Harapan Dan Tantangan Riset Sumber Daya Dan Pengembangan Teknologi Alat Dan Mesin Perikanan Untuk Budidaya Lobster	PDF	2022-11-16 10:22:26	Reza Ahmad
250	Teknik Pembenihan Ikan Tor Soro, Tor Douronensis, Dan Persilangannya	PDF	2022-10-25 11:36:45	Rieke Givani, S.Pi
251	Performa Reproduksi Induk Dan Pertumbuhan Benih Ikan Tor Hasil Persilangan (Tor Soro Dan Tor Douronensis) Secara Resiprokal	PDF	2022-10-25 11:44:21	Rieke Givani, S.Pi
252	Sebuah Kumpulan Pemikiran Mitigasi Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim	PDF	2022-10-15 10:37:00	Riyadi Zakia Syahrulloh
253	Menyiasati Perubahan Iklim Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Edisi Iii)	PDF	2022-10-15 10:38:42	Riyadi Zakia Syahrulloh
254	Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional	PDF	2022-10-06 11:18:40	Rizky Erdana
255	A Study Of Illegal, Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing In The Arafura Sea, Indonesia	PDF	2022-10-06 11:19:53	Rizky Erdana
256	Over Fishing, Over Capacity Dan Illegal Fising	PDF	2022-10-17 07:57:22	Rizky Erdana
257	Pedoman Identifikasi Dan Monitoring Populasi Penyu	PDF	2022-10-18 12:32:50	Rizky Erdana
258	Kemunculan Dan Tingkah Laku Pesut (Orcaella Brevirostris (Owen In Gray 1866) Sebagai Mamalia Terancam Langka Di Perairan Kubu Raya Dan Kayong Utara Kalimantan Barat	PDF	2022-10-18 14:16:55	Rizky Erdana
259	Reef Coral Identification Florida Caribbean Bahamas Including Marine Plants	PDF	2022-11-01 12:20:54	Rizky Erdana
260	Inventarisasi Benthic Life Form Dan Aplikasi Marxan Di Gili Lawang – Gili Sulat, Lombok Timur	PDF	2022-11-01 12:24:47	Rizky Erdana
261	Terumbu Karang Dan Perubahan Iklim	PDF	2022-11-06 18:44:14	Rizky Erdana
262	Ekosistem Terumbu Karang : Potensi, Fungsi & Pengelolaan	PDF	2022-11-06 18:47:17	Rizky Erdana
263	Ayo, Selamatkan Terumbu Karang (Pelestarian Terumbu Karang Di Kalimantan Selatan)	PDF	2022-11-06 18:49:57	Rizky Erdana
264	The Coral Triangle Center: "Conserving Reefs, Safeguarding Livelihoods"	PDF	2022-11-06 19:32:47	Rizky Erdana
265	Kelautan Dan Perikanan Dalam Angka 2022 Marine And Fisheries In Figures Tahun 2022	PDF	2022-10-25 11:28:42	Sa'Dilah Fauzi
266	Pengembangan Budidaya Lobster Berkelanjutan	PDF	2022-11-01 09:36:47	Silviani
267	Mengenal Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	PDF	2022-10-19 08:58:45	Siti Nurhayati
268	'Endang Pamularsih' Gurame Yang Jempolan	PDF	2022-11-14 09:44:52	Sugeng Riyadi

269	Panduan Lengkap Agribisnis Ikan Gurami	PDF	2022-11-14 09:48:25	Sugeng Riyadi
270	Npoa: National Plan Of Action To Prevent And To Combat Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing 2012-2016	PDF	2022-11-28 17:02:37	Thurshina Tiaradipa
271	Keanekaragaman Jenis Ikan Karang Dan Kondisi Kesehatan Karang Di Pulau Gof Kecil Dan Yep Nabi Kepulauan Raja Ampat	PDF	2022-10-13 07:04:35	Tithis Asmoroningtyas
272	Patin: Komoditas Industri Budidaya Air Tawar	PDF	2022-10-20 18:36:45	Tithis Asmoroningtyas
273	Pengembangan Kapasitas Diri Nelayan Dalam Rangka Pembangunan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Di Ppn Palabuhan Ratu	PDF	2022-11-01 09:47:51	Tithis Asmoroningtyas
274	Minapolitan : Dari Konsep Menuju Implementasi	PDF	2022-11-02 18:31:42	Tithis Asmoroningtyas
275	Profil Dan Kesesuaian Lahan Akuakultur Mendukung Minapolitan	PDF	2022-11-02 20:09:53	Tithis Asmoroningtyas
276	Pengembangan Kawasan Minapolitan	PDF	2022-11-13 19:33:41	Tithis Asmoroningtyas
277	Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia	PDF	2022-11-15 20:58:00	Tithis Asmoroningtyas
278	Tata Nama Spesies Ikan Air Tawar Indonesia Ditinjau Dari Perkembangan Taksonomi	PDF	2022-11-09 15:51:46	Trio Walidi
279	Buku Saku Statistik Perikanan Tangkap 2012	PDF	2022-10-06 15:41:29	Tugiono
280	Keragaan Perikanan Tangkap	PDF	2022-10-06 15:56:03	Tugiono
281	Keragaan Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Wpp-Nri)	PDF	2022-10-06 15:58:24	Tugiono
282	Statistik Perikanan Tangkap Di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Wppnri), 2005 - 2013	PDF	2022-10-06 15:59:52	Tugiono
283	Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Menurut Provinsi 2015 Vol. 16 No.1	PDF	2022-10-06 16:13:19	Tugiono
284	Jenis - Jenis Ikan Di Indonesia	PDF	2022-10-03 13:05:45	Wellifan Arrank Tonapa
285	Biologi Dan Perikanan Tuna Sirip Kuning	PDF	2022-10-03 14:12:14	Wellifan Arrank Tonapa
286	Aspek Biologi Dan Parameter Populasi Ikan Tongkol Abu-Abu (Thunnus Tonggol) Di Perairan Langsadan Sekitarnya	PDF	2022-10-04 01:12:19	Wellifan Arrank Tonapa
287	Profil Peluang Investasi Komoditas Tuna : Laporan Tahunan 2018	PDF	2022-10-05 10:26:57	Wellifan Arrank Tonapa
288	Sistem Perekrutan Pekerja Dan Hubungan Kerja Pada Usaha Perikanan Tuna	PDF	2022-10-05 11:01:54	Wellifan Arrank Tonapa
289	Kinerja Ekspor Tuna Indonesia: Kajian Mengenai Daya Saing & Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Ekspor Tuna Indonesia Di Pasar Jepang, Amerika Serikat & Korea Selatan.	PDF	2022-10-05 19:03:21	Wellifan Arrank Tonapa
290	Teknik Penanganan Penyakit Virus Pada Ikan Dan Udang	PDF	2022-10-20 10:59:36	Widya Indarti
291	Pemeliharaan Induk Ikan Tuna Sirip Kuning (Thunnus Albacares) Dalam Keramba Jaring Apung	PDF	2022-10-14 05:14:35	Witri Wulandari

292	Profil Peluang Investasi Komoditas Tuna : Laporan Tahunan 2018	PDF	2022-10-14 05:16:37	Witri Wulandari
293	Ikan Air Laut Langka Di Indonesia	PDF	2022-11-03 09:22:49	Wulan Annisa Nur
294	Biota Perairan Terancam Punah Di Indonesia Prioritas Perlindungan	PDF	2022-11-06 10:46:17	Wulan Annisa Nur
295	Komik Arwana Super Red	PDF	2022-11-10 09:06:04	Wulan Annisa Nur
296	Ikan Air Tawar Langka Di Indonesia	PDF	2022-11-10 09:11:43	
297	Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia -714	PDF	2022-10-25 22:11:13	Yuda Herdiansyah
298	Mekanisme Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pada Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil	PDF	2022-11-21 13:51:57	Yuda Herdiansyah
299	Potensi Usaha Dan Peluang Investasi Kelautan Dan Perikanan Povinsi Sulawesi Tengah	PDF	2022-10-02 17:51:28	Yudistira Aprianto
300	Liku Liku Hidup	Tercetak	2022-10-11	Sri Rahayu
301	Legenda Planet Kejutan	Tercetak	2022-10-21	Dyah Ayu Safitri
302	Pedoman Penghitungan Angka Konsumsi Ikan 2020	Tercetak	2022-10-21	Dyah Ayu Safitri
303	Ayah: Sebuah Novel	Tercetak	2022-10-21	Indri Yani Zaini
304	Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah Dalam Al-Qur'An Dan Sunnah : Jilid 7 (Kemukjizatan Tentang Kedokteran 1)	Tercetak	2022-10-24	Helena Yusufik.S.Tp, M.E.
305	Laut Masa Depan Bangsa: Transformasi Kelautan Dan Perikanan 2014-2019	Tercetak	2022-11-14	Ramses
306	Keputusan Menteri Eksplorasi Laut Dan Perikanan Nomor : 03/Men-Elp/2000	Tercetak	2022-11-18	Adipradana
307	Bunga Rampai Kehumasan No. 3/2003	Tercetak	2022-11-24	Shafira Latifah Abbas
308	Berkomunikasi Di Ruang Publik : Implementasi Kehumasan Pemerintah	Tercetak	2022-11-24	Shafira Latifah Abbas
309	My Car Journey	Tercetak	2022-07-15	Nur Irawati
310	Putri dan	Tercetak	2022-07-16	Nur Irawati
311	At the Aquarium	Tercetak	2022-07-17	Nur Irawati
312	Kucing Rakus	Tercetak	2022-07-18	Nur Irawati
313	In The Jungle	Tercetak	2022-07-15	Mellanie Amelia
314	Aku Bisa Menyelesaikan Tugasku	Tercetak	2022-07-16	Mellanie Amelia
315	Look at The Ocean	Tercetak	2022-07-17	Mellanie Amelia
316	Fireman	Tercetak	2022-07-18	Mellanie Amelia
317	Letter I Know	Tercetak	2022-07-29	Dwi Ismi Wulandari
318	Pemaafnya Rasulullah	Tercetak	2022-07-30	Dwi Ismi Wulandari
319	Bantal Mimpi	Tercetak	2022-07-31	Dwi Ismi Wulandari
320	Follow Me Animal Adventure	Tercetak	2022-08-01	Dwi Ismi Wulandari
321	My First Vechile	Tercetak	2022-07-29	Mellanie Amelia
322	Follow Me On the Mars	Tercetak	2022-07-30	Mellanie Amelia
323	Odong-odong Dongeng	Tercetak	2022-07-31	Mellanie Amelia
324	My First 123	Tercetak	2022-08-01	Mellanie Amelia
325	My First Animal	Tercetak	2022-08-01	Mellanie Amelia
326	Follow Me In the Jungle	Tercetak	2022-08-02	Mellanie Amelia

327	Follow Me Animal Adventure	Tercetak	2022-08-03	Mellanie Amelia
328	Aku Sayang Adik	Tercetak	2022-08-04	Mellanie Amelia
329	Dorry's Friends	Tercetak	2022-08-01	Resti Yusnita Utami
330	Old MacDonald Had a Farm	Tercetak	2022-08-02	Resti Yusnita Utami
331	Twinkle, twinkle, little star	Tercetak	2022-08-03	Resti Yusnita Utami
332	33 Kisah Masa Kecil Sahabat Rasul	Tercetak	2022-08-04	Resti Yusnita Utami
333	The Disney Princess : Under the Starry Sky	Tercetak	2022-08-01	Indri Kartikasari
334	My First 123	Tercetak	2022-08-02	Indri Kartikasari
335	Fridges Scapes	Tercetak	2022-08-03	Indri Kartikasari
336	Majalah Bobo	Tercetak	2022-08-04	Indri Kartikasari
337	Big Small Short Tall	Tercetak	2022-08-08	Mellanie Amelia
338	Follow Me Faces	Tercetak	2022-08-09	Mellanie Amelia
339	First Learning Colours	Tercetak	2022-08-10	Mellanie Amelia
340	5 Little Ducks	Tercetak	2022-08-11	Mellanie Amelia
341	My First Vehicles	Tercetak	2022-08-09	Dwi Ismi Wulandari
342	Odong-odong Dongeng	Tercetak	2022-08-10	Dwi Ismi Wulandari
343	Snow White and The 7 Dwarfs	Tercetak	2022-08-11	Dwi Ismi Wulandari
344	Berilah Senyummu	Tercetak	2022-08-12	Dwi Ismi Wulandari
345	Chick Pea and the Changing Trees	Tercetak	2022-08-25	Mellanie Amelia
346	Pemaafnya Rasulullah	Tercetak	2022-08-26	Mellanie Amelia
347	Giant Truck to Tiny Scooter	Tercetak	2022-08-27	Mellanie Amelia
348	Follow Me On The Farm	Tercetak	2022-09-06	Mellanie Amelia
349	Follow Me On The Move	Tercetak	2022-09-07	Mellanie Amelia
350	Belajar Adab Toilet : Pangeran Kamil	Tercetak	2022-09-19	Dyah Ayu Safitri
351	Animals Slides See	Tercetak	2022-09-20	Dyah Ayu Safitri
352	Dory's Friends	Tercetak	2022-09-23	Mellanie Amelia
353	Muddle and Match	Tercetak	2022-09-24	Mellanie Amelia
354	Menjadi Detektif	Tercetak	2022-09-26	Mellanie Amelia
355	My First Toys	Tercetak	2022-09-30	Mellanie Amelia
356	Hello Lamb	Tercetak	2022-10-01	Mellanie Amelia
357	Bussu, Putri Berhati Emas	Tercetak	2022-10-02	Mellanie Amelia
358	Aku Sayang Adik	Tercetak	2022-10-10	Dyah Ayu Safitri
359	My Bedtime	Tercetak	2022-10-11	Dyah Ayu Safitri
360	Red Yellow Blue	Tercetak	2022-10-12	Dyah Ayu Safitri
361	Goodnight Sleepy Caterpillar	Tercetak	2022-10-12	Fernando Esa Roeswana
362	The Song Collector	Tercetak	2022-10-13	Fernando Esa Roeswana
363	Aiden Finds Animals	Tercetak	2022-10-14	Mellanie Amelia
364	Anggota Tubuh	Tercetak	2022-10-15	Mellanie Amelia
365	First Day of School	Tercetak	2022-10-16	Mellanie Amelia
366	Super Hero Stories 1 Set (6 buku)	Tercetak	2022-10-17	Mellanie Amelia
367	Pemaafnya Rasulullah	Tercetak	2022-10-25	Dyah Ayu Safitri
368	Menjadi Detektif	Tercetak	2022-10-26	Dyah Ayu Safitri

369	Snow White and The 7 Dwarfs	Tercetak	2022-10-27	Fernando Roeswana	Esa
370	Let's Play	Tercetak	2022-10-28	Fernando Roeswana	Esa
371	Dino Crunch	Tercetak	2022-10-29	Fernando Roeswana	Esa
372	Follow On the Move	Tercetak	2022-10-30	Fernando Roeswana	Esa
373	Buku anak anak	Tercetak	2022-10-28	Nur Hajja Aini	
374	My First 123	Tercetak	2022-11-04	Dyah Ayu Safitri	
375	Who's Afraid of the Dark?	Tercetak	2022-11-05	Dyah Ayu Safitri	
376	Down down in the Sea	Tercetak	2022-11-06	Dyah Ayu Safitri	
377	Hidden World Ocean	Tercetak	2022-11-07	Dyah Ayu Safitri	
378	Habitats and the animals who live in them	Tercetak	2022-11-04	Fernando Roeswana	Esa
379	The River an Epic Journey to the Sea	Tercetak	2022-11-05	Fernando Roeswana	Esa
380	Hidden World Forest	Tercetak	2022-11-06	Fernando Roeswana	Esa
381	Life-Size Animals	Tercetak	2022-11-07	Fernando Roeswana	Esa
382	Under The Sea	Tercetak	2022-11-16	Dwi Wulandari	Ismi
383	Paman Badut Berhidung Sawo	Tercetak	2022-11-17	Dwi Wulandari	Ismi
384	Kesatria Bayam dan Monster Lemak	Tercetak	2022-11-18	Dwi Wulandari	Ismi
385	Encyclopedia Bugs	Tercetak	2022-11-19	Dwi Wulandari	Ismi
386	Paman Badut Berhidung Sawo	Tercetak	2022-11-16	Mellanie Amelia	
387	Starwars	Tercetak	2022-11-18	Mellanie Amelia	
388	Kesatria Bayam dan Monster Lemak	Tercetak	2022-11-19	Mellanie Amelia	
389	Dogeng Ajaib	Tercetak	2022-11-24	Dysi Dyspriani	Polite
390	Pemaafnya Rasulullah	Tercetak	2022-11-25	Dysi Dyspriani	Polite
391	Minty and Tink	Tercetak	2022-11-26	Dysi Dyspriani	Polite
392	Berilah Senyumamu	Tercetak	2022-11-27	Dysi Dyspriani	Polite
393	Danny the Duckling	Tercetak	2022-11-25	Anita Dewi Kusumawati	Ratna
394	My Sparkling Colours Jungle	Tercetak	2022-11-26	Anita Dewi Kusumawati	Ratna
395	Dino Crunch	Tercetak	2022-11-27	Anita Dewi Kusumawati	Ratna
396	First Day of School	Tercetak	2022-11-28	Anita Dewi Kusumawati	Ratna